

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan struktural yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Besarnya kompleksitas permasalahan pembangunan akibat terus bertambahnya tantangan, dinamika lingkungan internal maupun eksternal, serta adanya pergeseran standar atau ukuran-ukuran mengenai kualitas hidup dan kesejahteraan sebagai suatu kondisi ideal yang ingin diwujudkan menyebabkan upaya pembangunan menjadi suatu proses yang harus terus berlanjut dan tidak pernah berakhir.

Sementara itu sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah menjadi semakin berat dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan kualitas pelayanan publik bersamaan dengan semakin luasnya kewenangan daerah. Di sisi lain, daerah dihadapkan pada berbagai kendala dalam pelaksanaan otonominya antara lain terbatasnya ketersediaan sumberdaya pembangunan terutama sumberdaya finansial.

Semakin besar dan luasnya permasalahan pembangunan, terus meningkatnya tantangan dan dinamika lingkungan internal maupun eksternal, meningkatnya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di tengah terbatasnya potensi sumberdaya yang dimiliki daerah, maka penyelenggaraan pembangunan harus dilaksanakan secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan adanya manajemen pembangunan yang mampu mengarahkan setiap kegiatan pembangunan agar secara efektif mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta mendukung terwujudnya visi daerah.

Oleh karena itu setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki benang merah dengan Misi dan Visi Pembangunan Daerah sehingga mampu memberikan peran yang optimal bagi pelaksanaan Misi dan perwujudan Visi Pembangunan Daerah.

Di samping itu, melaksanakan kegiatan pembangunan harus berdasarkan skala prioritas yang tajam sesuai dengan tingkat urgensi dan tingkat pengaruhnya terhadap pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah, serta terhadap pelaksanaan Misi dan terwujudnya Visi Pembangunan Daerah. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan, harus diupayakan agar setiap program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan saling bersinergi satu sama lain, serta harus mampu memanfaatkan sumberdaya secara efisien dengan mengutamakan orientasi setiap kegiatan kepada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dengan menghasilkan *outputs*, *outcomes*, *benefits*, serta *impacts* secara optimal. Dalam rangka itu, dibutuhkan adanya panduan bagi penyelenggaraan pembangunan berupa dokumen perencanaan pembangunan baik yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan duapuluh tahunan; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Pasal 5 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional. Sedangkan Pasal 19

ayat (3) undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa RPJMD harus sudah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik.

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2010-2015 yang telah dilantik pada tanggal 27 Juli 2010. RPJMD ini disusun dengan memperhatikan kewenangan daerah, mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, mencermati hasil-hasil yang telah dicapai, mewaspadai permasalahan dan tantangan yang dihadapi, serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dengan memperhatikan juga RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

## **I.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan**

### **I.2.1. Maksud**

RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2010 memuat Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga yang dijabarkan dalam bentuk tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran yang bersifat jangka pendek pada setiap bidang pembangunan serta memuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut yang meliputi prioritas, kebijakan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2010 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih hasil pemilihan kepala daerah langsung yang telah dilantik pada tanggal 27 Juli 2010 agar menjadi panduan bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu tahun 2010-2015.

### **I.2.2. Tujuan**

Tujuan Penyusunan RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 adalah :

1. Mendorong terwujudnya Visi dan terlaksananya Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih periode 2010 - 2015.
2. Mewujudkan keterkaitan antara setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga terpilih.
3. Meningkatkan sinergi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang, antar program, dan antar wilayah dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga tercapai efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumberdaya pembangunan.
4. Menjadi acuan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2010-2015.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan prakiraan maju pendanaan.

### **I.3. Landasan Hukum**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4697);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 – 2009;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2010);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2009);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 23 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 12);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 1).

#### **I.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

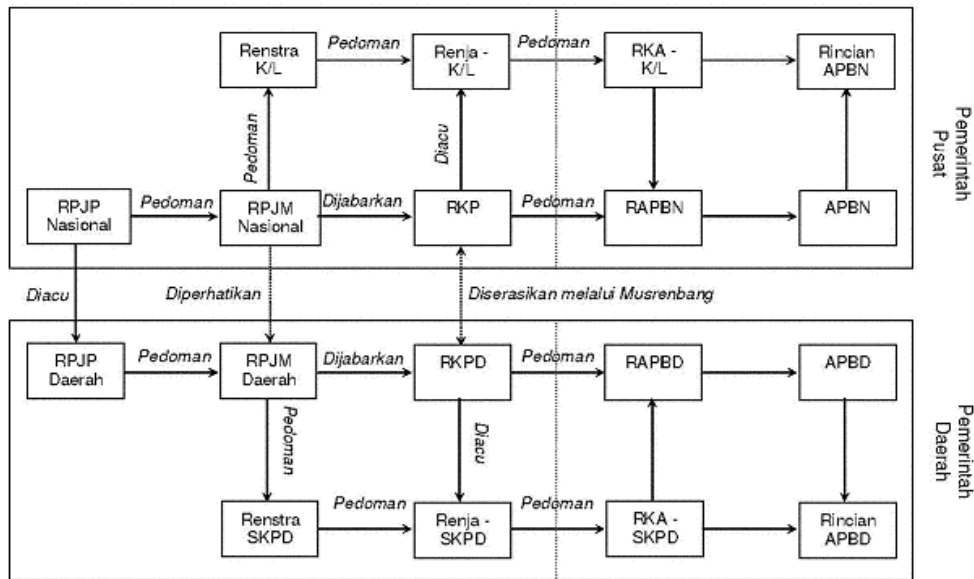
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tujuan perencanaan pembangunan nasional antara lain adalah menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarurusan pemerintah, maupun antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 - 2015 disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat nasional, provinsi, maupun dokumen perencanaan tingkat kabupaten yang sudah ada, baik dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat spasial maupun aspasial. Substansi RPJMD Kabupaten Purbalingga ini menyelaraskan dengan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nasional; prioritas, kebijakan dan program yang ada pada dokumen perencanaan pembangunan Propinsi Jawa Tengah; serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga. Mengingat Kabupaten Purbalingga secara administratif dan geografis berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang, Banyumas, dan Banjarnegara, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) ketiga kabupaten



tersebut sehingga dapat terwujud keselarasan antar wilayah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 harus menjadi pedoman dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah pada tingkat SKPD. Untuk operasionalisasi lebih lanjut, RPJMD ini akan dijabarkan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Gambar 1. Hubungan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya



### I.5. Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. PENDAHULUAN
- BAB II. KONDISI UMUM DAERAH
- BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

- BAB IV. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS  
PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
- BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA  
MENENGAH KABUPATEN PURBALINGGA
- BAB VII. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB VIII. P E N U T U P

## BAB II. KONDISI UMUM DAERAH

### II.1. Kondisi Geografis

#### II.1.1. Luas Wilayah dan Letak Geografis

Kabupaten Purbalingga secara geografis terletak di bagian barat daya wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi pada  $101^{\circ}11'$  –  $109^{\circ}35'$  Bujur Timur dan  $7010'$  –  $7029'$  Lintang Selatan. Adapun batas wilayah administrasi Kabupaten Purbalingga adalah:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Pemalang  
Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Banyumas  
Sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara  
Sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.

Jarak Ibu Kota Kabupaten Purbalingga ke Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah adalah 191 km. Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas 77.764 ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 kecamatan, 224 desa, 15 kelurahan, 886 dusun, 1.530 RW, dan 4.968 RT. Distribusi luasan dari setiap wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan per kecamatan ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II.1.1-1. Luas Wilayah dan Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2009

No	Kecamatan	Luas kecamatan		Jumlah desa/kelurahan
		Ha	Persentase	
1.	Kemangkon	4.514	5.80	19
2.	Bukateja	4.240	5.45	14
3.	Kejobong	3.998	5.14	13
4.	Pengadegan	4.174	5.37	9
5.	Kaligondang	5.054	6.45	18
6.	Purbalingga	1.473	1.92	13
7.	Kalimanah	2.251	2.89	17
8.	Padamara	1.726	2.23	14
9.	Kutasari	5.289	6.80	14
10.	Bojongsari	2.925	3.76	13
11.	Mrebet	4.788	6.16	19
12.	Bobotsari	3.228	4.16	16

13.	Karangreja	6.459	8.31	7
14.	Karangjambu	5.621	7.23	6
15.	Karanganyar	3.459	4.45	13
16.	Kertanegara	3.377	4.34	11
17.	Karangmoncol	6.028	7.75	11
18.	Rembang	9.160	11.79	12
<b>Jumlah</b>		<b>77.764</b>	<b>100,00</b>	<b>239</b>

Sumber: Purbalingga Dalam Angka 2009

### II.1.2. Kondisi Topografis

Secara fisiografis, Kabupaten Purbalingga terletak pada wilayah perbatasan antara Zona Serayu Utara dan Zona Vulkanik Kwarter. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian tempat antara 23 meter – 3.432 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kabupaten Purbalingga dibagi dalam dua katagori wilayah, yakni :

1. Bagian utara merupakan wilayah berbukit-bukit dengan kelerengan lebih dari 40 persen. Wilayah ini meliputi Kecamatan Karangreja, Karangjambu, Bobotsari, Karanganyar, Kertanegara, Rembang, sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.
2. Bagian selatan merupakan wilayah dengan tingkat kemiringan berkisar antara 0 – 25 persen. Wilayah ini meliputi Kecamatan Kalimanah, Padamara, Purbalingga, Kemangkon, Bukateja, Kejobong, Pengadegan, serta sebagian wilayah Kecamatan Kutasari, Bojongsari, dan Mrebet.

### II.1.3. Klimatologi dan Hidrologi

Wilayah Kabupaten Purbalingga sebagian wilayahnya terletak di lereng bagian selatan Gunung Slamet dengan rata-rata curah hujan 3.337 mm/tahun (2008) dan suhu udara berkisar antara 22<sup>o</sup>C – 33<sup>o</sup>C.

Kabupaten Purbalingga termasuk dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu, Sub-DAS Pekacangan dan Klawing dengan anak-anak sungai sebagai berikut :

1. Sungai Ponggawa
2. Sungai Gemuruh
3. Sungai Kajar
4. Sungai Lemberang
5. Sungai Tlahap

6. Sungai Soso
7. Sungai Lebak
8. Sungai Tunggunggunung
9. Sungai Laban
10. Sungai Kuning
11. Sungai Wotan
12. Sungai Gintung
13. Sungai Tambra
14. Sungai Muli

#### II.1.4. Geologi dan Bahan Tambang

Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri dari batuan sedimen klasik berupa batuan andesit, sirtu, batu pasir darat, batu lempung, dan trass dengan persebaran sebagai berikut:

Tabel II.1.4-1. Sebaran Sumber Daya Mineral Kabupaten Purbalingga Menurut Kecamatan Tahun 2009

Kecamatan	Sumber daya mineral							
	Ands	Btgp	Blp	Bps	Lp	Tras	Sirtu	Kal
1. Kemangkon					√		√	
2. Bukateja					√		√	
3. Kejobong						√		
4. Pengadegan	√							
5. Kaligondang			√	√			√	
6. Purbalingga							√	
7. Kalimanah					√			
8. Padamara								
9. Kutasari	√							
10. Bojongsari			√				√	
11. Mrebet	√			√			√	
12. Bobotsari				√				
13. Karangreja	√							
14. Karangjambu	√			√			√	
15. Karanganyar			√	√			√	
16. Kertanegara			√	√				
17. Karangmoncol	√	√	√	√			√	
18. Rembang	√	√	√	√		√	√	

Sumber: Inventarisasi Geologi dan Sistem Informasi Sumberdaya Mineral-BPPT

Ket: Ands : Andesit                      Bps : Batupasir  
 Btgp : Batu gamping                  Lp : Lempung  
 Blp : Batu lempung                   Kal : Kalsit

#### II.1.5. Jenis Tanah

Berdasarkan peta tinjauan skala 1 : 250.000 (CPT Bogor), jenis tanah yang ada di Kabupaten Purbalingga terdiri dari tanah aluvial, latosol,

andosol, grumusol, litosol, podzolik, dan regosol. Adapun rincian jenis tanah di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

Tabel II.1.5-1. Jenis Tanah di Kabupaten Purbalingga

No	Jenis tanah	Luas wilayah	
		Ha	%
1	Latosol coklat dan regosol coklat	14.943,750	19,22
2	Aluvial coklat tua	13.837,500	17,79
3	Latosol coklat dari bahan induk vulkanik	8.490,625	10,92
4	Latosol merah kuning	4.498,375	5,78
5	Latosol coklat tua	6.237,500	8,02
6	Andosol coklat	5.662,500	7,28
7	Litosol	568,750	0,73
8	Padzolik merah kuning	10.050,000	12,92
9	Grumusol kelabu	13.475,122	17,33
Jumlah		77.764,122	100,00

Sumber: RTRW Kabupaten Purbalingga 2004-2014

## II.1.6. Penggunaan Lahan

### II.1.6.1. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan untuk kepentingan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, kawasan terbuka hijau kota, kawasan khusus, dan kawasan transportasi.

#### II.1.6.1.1. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi yang terdapat di Kabupaten Purbalingga adalah kawasan hutan produksi tetap, yaitu kawasan hutan produksi yang eksploitasinya hanya dapat dengan tebang pilih dan tanam. Kawasan ini merupakan areal hutan yang dikuasai oleh Perum Perhutani. Kawasan hutan produksi diperuntukkan bagi areal hutan yang menghasilkan produk baik melalui tebang maupun pengambilan hasil produksi bentuk lainnya.

Lokasi hutan produksi di Kabupaten Purbalingga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Menhut-II/2004 dapat dibedakan dalam dua kelompok, dengan lokasi sebagai berikut:

1. Hutan Produksi (HP) dengan luas 629,1 Ha terdapat di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangjambu, dan Kecamatan Karangmoncol.
2. Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan luas 4.726,8 Ha terdapat di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol, dan Kecamatan Rembang.

#### **II.1.6.1.2. Kawasan Hutan Rakyat**

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Purbalingga adalah kawasan hutan yang dikelola dan dimanfaatkan oleh rakyat. Hutan rakyat di Kabupaten Purbalingga tersebar di wilayah bagian utara yang meliputi Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Rembang, dan Kecamatan Bobotsari dengan luas total 30.539,58 Ha.

#### **II.1.6.1.3. Kawasan Peruntukan Pertanian**

Kawasan pertanian di wilayah Kabupaten Purbalingga terdiri atas kawasan pertanian lahan sawah, kawasan pertanian tanaman lahan kering dan tanaman tahunan/perkebunan. Termasuk kawasan budidaya pertanian adalah unit lahan yang mempunyai tingkat kesesuaian bagi peruntukan usaha pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan serta unit lahan yang tidak dialokasikan untuk kawasan lindung. Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka pengaturan kawasan budidaya pertanian dilakukan berdasarkan sebaran potensi sumber daya lahan yang memenuhi syarat untuk dijadikan kawasan tersebut. Alih fungsi lahan pada kawasan budidaya pertanian untuk perluasan permukiman yang telah ada

dan lokasi industri diizinkan secara terbatas pada kawasan pertanian lahan kering dan kawasan pertanian lahan sawah dengan persyaratan tertentu.

#### **II.1.6.1.3.1. Peruntukan Pertanian Lahan Sawah**

Kawasan peruntukan pertanian lahan sawah adalah kawasan yang pengairannya dapat diperoleh secara alamiah, setengah teknis maupun teknis. Kawasan pertanian lahan sawah yang ada di Kabupaten Purbalingga pada saat ini seluas 25.207 hektar yang terdapat di seluruh wilayah kecamatan.

#### **II.1.6.1.3.2. Peruntukan Pertanian Hortikultura**

Kawasan pertanian hortikultura adalah kawasan pertanian bagi tanaman palawija, sayuran, bunga, dan buah-buahan yang pada umumnya menempati lahan kering.

Kawasan pertanian hortikultura terdapat di Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Padamara, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kutasari.

#### **II.1.6.1.3.3. Kawasan Peruntukan Perkebunan**

Kawasan tanaman perkebunan adalah kawasan bagi tanaman perkebunan yang menghasilkan bahan pangan atau bahan baku industri. Kawasan tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada saat ini seluas 14.764 hektar yang terdapat di Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Kertanegara, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Kaligondang, Kecamatan Rembang, Kecamatan



Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Bojongsari, dan Kecamatan Kutasari.

#### **II.1.6.1.3.4. Kawasan Peternakan**

Kawasan peternakan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi budidaya peternakan baik ternak besar, ternak kecil dan unggas serta lahan untuk padang penggembalaan ternak.

Lokasi kawasan peternakan terdapat di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Padamara, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Mrebet, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Rembang, Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kaligondang, dan Kecamatan Kemangkon.

#### **II.1.6.1.4. Kawasan Peruntukan Perikanan**

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha budidaya perikanan. Kawasan perikanan di Kabupaten Purbalingga tersebar di beberapa wilayah yang meliputi Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Padamara, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kutasari, dan Kecamatan Mrebet.

#### **II.1.6.1.5. Kawasan Pertambangan**

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang memiliki potensi bahan galian yang bernilai ekonomis yang pemanfaatannya perlu dikendalikan agar terjaga kelestariannya sehingga tidak menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan. Penetapan kawasan pertambangan merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.

Jenis bahan tambang yang terdapat di Kabupaten Purbalingga berupa batuan non mineral yang antara lain terdapat di wilayah Kecamatan Rembang seluas 4,973 hektar.

#### **II.1.6.1.6. Kawasan Peruntukan Industri**

Penentuan lokasi industri di Kabupaten Purbalingga diarahkan pada pengembangan lokasi industri yang dapat menampung industri kecil, sedang dan besar. Penentuan lokasi industri kecil diarahkan dalam rangka pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga terutama yang berbasis pada potensi setempat. Sedangkan lokasi industri sedang dan besar diarahkan pada kawasan-kawasan tertentu.

Lokasi peruntukan industri di Kabupaten Purbalingga meliputi :

1. Kawasan Industri yang direncanakan di Desa Kebutuh Kecamatan Bukateja dengan luas 110 Hektar.
2. Zona Industri direncanakan di Kecamatan Bobotsari seluas 6,1 hektar (Desa Banjarsari), Kecamatan Kemangkong seluas 38 hektar (Desa Jetis dan Desa Toyareka), dan wilayah perkotaan Purbalingga seluas 64 hektar (Kelurahan Mewek dan Kelurahan Karangmanyar), serta beberapa wilayah kecamatan yang meliputi Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karanganyar, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Kaligonang, dan Kecamatan Padamara.
3. Lokasi industri eksisting yang tersebar di Kecamatan Purbalingga (Kelurahan Kandanggang, Kelurahan Bojong, Kelurahan Penambongan, Desa Toyareka, Kelurahan Purbalingga Lor), Kecamatan Padamara (Desa Karanggambas, Desa Karangjambe, Desa Karangsantul), Kecamatan Bukateja (Desa Cipawon), Kecamatan Kaligondang (Desa Penolih), dan Kecamatan Kalimanah (Kelurahan Kalikabong, Kelurahan Mewek, Kelurahan Karangmanyar).
4. Sentra industri kecil dan rumah tangga yang membaur di permukiman.

#### **II.1.6.1.7. Kawasan Pariwisata**

Kawasan pariwisata adalah kawasan yang memiliki potensi (baik alam, ilmu pengetahuan, sejarah, budaya, dan buatan) yang dapat mendatangkan kunjungan wisatawan.

Lokasi kawasan pariwisata Kabupaten Purbalingga meliputi:

1. Peruntukan pariwisata alam yang terdapat di Kecamatan Karangreja (Pendakian Gunung Slamet, Goa Lawa, Agrowisata Serang, Gunung Lompong, Curug Silintang, dan Bumi Perkemahan Serang), Kecamatan Bojongsari (Desa Wisata Karangbanjar dan Bumi Perkemahan Munjul Luhur), Kecamatan Rembang (Curug Karang dan Curug Panyatan), dan Kecamatan Kemangkön (Wisata Air Congot di Desa Kedungbenda).
2. Peruntukan pariwisata budaya dan pengetahuan yang terdapat di Kecamatan Rembang ( Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman), Kecamatan Karangjambu (Situs Bandagai), Kecamatan Bobotsari (Situs Mujan), dan Kecamatan Karanganyar (Wisata Batu Menhier), Kecamatan Kertanegara (Wisata Batu Gilang), Kecamatan Purbalingga (Musium Profesor Purwakawaca, dan Masjid Agung Darussalam), Kecamatan Mrebet (Wisata Batu Putin, Situs Onje, dan Situs Batu Tulis Cipaku).
3. Peruntukan pariwisata buatan terdapat di Kecamatan Bojongsari (Owabong), Kecamatan Kutasari (Sanggaluri Park dan Kolam Renang Tirta Asri), dan Kecamatan Padamara (Akuarium Air Tawar Purbayasa Pancuran Mas).

#### **II.1.6.1.8. Kawasan Permukiman**

Kawasan permukiman yaitu kawasan selain kawasan lindung yang tidak/belum didayagunakan sebagai kawasan peruntukkan lain. Kawasan permukiman dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan.

#### **II.1.6.1.8.1. Kawasan Permukiman Perkotaan**

Kawasan permukiman perkotaan adalah ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokan permukiman penduduk dengan dominasi kegiatan non pertanian (pemerintahan, industri, perdagangan, jasa dan lain lain) untuk menampung penduduk pada saat sekarang maupun perkembangannya di masa yang akan datang.

Kawasan permukiman perkotaan meliputi Kawasan Perkotaan Purbalingga, Kawasan Perkotaan Bobotsari, Kawasan Perkotaan Bukateja, Kawasan Perkotaan Rembang dan IKK di sekitar Kawasan Perkotaan Purbalingga (IKK Kaligondang, IKK Kalimanah, IKK Padamara dan IKK Bojongsari). Lingkup kawasan perkotaan Purbalingga meliputi seluruh wilayah Kecamatan Purbalingga, sebagian Kecamatan Kalimanah, sebagian Kecamatan Kaligondang, sebagian Kecamatan Bojongsari dan sebagian Kecamatan Padamara. Sedangkan kawasan permukiman perkotaan lingkup IKK meliputi permukiman yang termasuk dalam *delineasi* IKK. Total seluruh kawasan permukiman perkotaan adalah seluas 4.969,28 hektar.

#### **II.1.6.1.8.2. Permukiman Perdesaan**

Kawasan permukiman perdesaan adalah ruang yang diperuntukkan bagi pengelompokan permukiman penduduk yang terikat dengan pola lingkungan perdesaan yang bercirikan masyarakat agraris.

Kawasan permukiman perdesaan meliputi batas fisik permukiman di luar Kawasan Perkotaan Purbalingga, Kawasan Perkotaan Bobotsari, Kawasan Perkotaan Rembang, Kawasan Perkotaan Bukateja dan 4 (empat) IKK di sekitar Kawasan Perkotaan Purbalingga (IKK Kalimanah, IKK Padamara, IKK Bojongsari, dan IKK Kaligondang) serta permukiman di luar masing-masing IKK di Kabupaten Purbalingga dengan luas mencapai 10.350,4 Ha.

#### **II.1.6.1.9. Kawasan Terbuka Hijau Kota**

Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/ jalur dan/ atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Fungsi utama (intrinsik) RTH adalah sebagai fungsi ekologis sebagai bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, habitat satwa, serta penahan angin.

Fungsi RTH dari aspek sosial adalah untuk memberi ruang ekspresi budaya lokal, media komunikasi warga, tempat rekreasi serta wadah dan/atau objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan. Fungsi RTH dari aspek ekonomi adalah sumber produk pertanian yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun dan sayur mayur serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain lain. Sedangkan dari fungsi estetika, RTH dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota, pembentuk faktor keindahan arsitektural dan menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sekurang-kurangnya 30 persen dari total luas wilayah. Mempertimbangkan luas wilayah perkotaan di Kabupaten Purbalingga pada akhir tahun perencanaan yaitu seluas 4.897,6 hektar, maka dibutuhkan lahan RTH perkotaan minimal seluas 1.469,3 hektar, dengan perincian 979,5 hektar RTH publik dan 489,8 hektar RTH privat.

RTH yang terdapat di kawasan perkotaan di Kabupaten Purbalingga meliputi beberapa fungsi lahan sebagai berikut:

1. RTH Pekarangan meliputi sebagian dari pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, dan taman atap rumah;

2. RTH taman dan hutan kota meliputi taman lingkungan Rukun Tetangga (RT), taman lingkungan Rukun Warga (RW), taman kelurahan, taman kecamatan, taman kota, hutan kota dan sabuk hijau (*green belt*);
3. RTH jalur hijau meliputi pulau jalan, median jalan, dan jalur pejalan kaki;
4. RTH fungsi tertentu meliputi sempadan sungai, sempadan mata air, dan pemakaman.

Adapun RTH Kawasan Perkotaan Purbalingga yang telah berfungsi selama ini antara lain berupa Alun-Alun Kota Purbalingga, Taman Kota Purbalingga (Taman Usman Janatin), Taman Gringsing, Stadion Gelora Goentoe Darjono di Kecamatan Purbalingga, Taman Sentul Garden di Kecamatan Padamara, dan sempadan sungai.

#### **II.1.6.1.10. Kawasan Khusus**

Kawasan khusus adalah kawasan yang diperuntukkan bagi pengembangan pelayanan administrasi pemerintahan serta pertahanan dan keamanan negara untuk menjamin keamanan dan pelayanan kepada masyarakat.

Lokasi kawasan khusus di Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Perkantoran pemerintah dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kelurahan/desa, serta perkantoran instansi vertikal.
2. Perkantoran atau instalasi militer termasuk Pangkalan Udara Wirasaba yang merupakan lapangan udara militer dengan luas mencapai 115,042 hektar dan Kawasan Batalyon Infanteri 406 Candrakusuma.

#### **II.1.6.1.11. Kawasan Transportasi**

Kawasan transportasi adalah kawasan yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pelayanan transportasi. Penyediaan kawasan ini dilaksanakan dalam rangka mengakomodir kebutuhan pelayanan transportasi.

Kawasan transportasi di Kabupaten Purbalingga meliputi lima terminal tipe C yang berlokasi di Kecamatan Kalimanah, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Bukateja, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Kejobong.

## **II.1.6.2. Kawasan lindung**

### **II.1.6.2.1. Kawasan Hutan Lindung**

Kawasan hutan lindung adalah hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahnya yang berfungsi sebagai pengatur tata air yaitu menjaga fungsi hidrologi tanah agar memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan air permukaan, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah (mencegah terjadinya lahan kritis).

Luas hutan lindung di Kabupaten Purbalingga sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Menhut-II/2004 adalah 9.236,1 hektar, dengan lokasi menyebar di Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karangjambu, Kecamatan Kutasari, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Karangmoncol, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Rembang.

### **II.1.6.2.2. Kawasan yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya**

Kawasan yang Memberikan Perlindungan pada Kawasan Bawahannya yang terdapat di wilayah Kabupaten Purbalingga meliputi kawasan yang mempunyai kriteria fisik sama dengan kriteria hutan lindung tetapi letaknya di luar kawasan hutan (kawasan konservasi lahan dan resapan air). Kawasan yang Memberikan Perlindungan pada Kawasan Bawahannya yang ada di Kabupaten Purbalingga seluas 3.529 hektar.

Lokasi kawasan resapan air di Kabupaten Purbalingga berada di sekitar kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Purbalingga bagian

utara, yaitu Kecamatan Kutasari (Desa Cendana, Karangcegak, Candiwulan, Karangjengkol, Candinata), Kecamatan Bojongsari (Desa Bumisari, Banjaran), Kecamatan Karangreja (Desa Serang, Kutabawa, Siwarak, Karangreja, Gondang, Tlahab Kidul, Tlahab Lor), Kecamatan Mrebet (Desa Binangun, Pengalusan, Sangkanayu, Onje, Tangkisan, Sindang), Kecamatan Bobotsari (Desa Talagening, Tlagayasa, Palumbungan, Limbasari, Banjarsari, Karangmalang), Kecamatan Karanganyar (Desa Ponjen, Karanganyar), Kecamatan Kertanegara (Desa Kranglean, Darma), Kecamatan Karangjambu (Desa Sirandu, Purbasari, Karangjambu, Sanguwatang, Jinkang, Danasari), Kecamatan Karangmoncol (Desa Sirau, Kramat, Tunjungmuli), dan Kecamatan Rembang (Desa Panusupan, Tanalum, Gunungwuled, Losari, Bantarbarang, Karangbawang, Bodaskarangjati, Wanogara Kulon).

#### **II.1.6.2.3. Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan lindung setempat berfungsi untuk melindungi lahan pada fungsi tertentu. Di wilayah Kabupaten Purbalingga kawasan ini antara lain: kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan sekitar mata air. Secara rinci rencana pengelolaan kawasan lindung setempat dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **II.1.6.2.3.1. Sempadan Sungai**

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Tujuan perlindungan ialah untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

Lokasi sempadan sungai di Kabupaten Purbalingga adalah:



1. Wilayah perlindungan Sungai Besar yang meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai sekurang-kurangnya 100 meter dari tepi sungai yaitu: Sungai Pekacangan, Sungai Serayu, dan Sungai Klawing;
2. Wilayah perlindungan Sungai Kecil yang meliputi kawasan sepanjang kanan dan kiri sungai sekurang-kurangnya 50 meter dari tepi sungai, yaitu: Sungai Ponggawa, Sungai Gemuruh, Sungai Kajar, Sungai Lembereng, Sungai Tlahab, Sungai Soso, Sungai Lebak, Sungai Tungtunggunung, Sungai Laban, Sungai Kuning, Sungai Wotan, Sungai Gintung, Sungai Tambra, dan Sungai Muli.

#### **II.1.6.2.3.2. Kawasan Sekitar Danau/Waduk**

Kawasan sekitar danau/waduk/bendungan adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk/bendungan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk/bendungan.

Lokasi kawasan sekitar danau/waduk di Kabupaten Purbalingga adalah di sekitar Bendung Slinga di Desa Kalikajar perbatasan Kecamatan Kaligondang dengan Kecamatan Mrebet yang memanfaatkan Kali Kemusuk dan Kali Klawing.

#### **II.1.6.2.3.3. Kawasan Sekitar Mata Air**

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi utama air.

Lokasi Kawasan Sekitar Mata Air di Kabupaten Purbalingga meliputi : Mata Air Situ Tirtomarto Desa Karangcegak, Mata Air Walik Desa Kutasari, Mata Air Tuk Gunung Desa Limbangan, Mata Air Bandawayu Desa Karangduren, Mata Air Mudal Desa Dagan, Mata Air Tuk Arus Desa Serayu Larangan, Mata Air Kali Talun Desa Karangtalun, Mata Air Cupit Urang dan Mata Air Kali Pulus Desa Karanggambas.

#### **II.1.6.2.3.4. Kawasan Lindung Spiritual**

Kawasan Lindung Spiritual adalah kawasan yang dilindungi karena memiliki nilai spiritual bagi masyarakat luas. Kawasan Lindung Spiritual di Kabupaten Purbalingga meliputi Petilasan Ardi Lawet di Desa Panusupan Kecamatan Rembang dan Masjid Onje di Desa Onje Kecamatan Mrebet.

#### **II.1.6.3. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan diperuntukkan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Kawasan tersebut dapat berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional dan keanekaragaman bentukan geologi yang berguna untuk ilmu pengetahuan yang harus dilindungi dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh alam dan kegiatan manusia. Kriteria Kawasan Sekitar Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah batas lingkaran sejauh 50 sampai 200 meter dari tempat tersebut.

Lokasi Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan di Kabupaten Purbalingga meliputi Monumen tempat Lahir Jenderal Soedirman di Desa Bantarbarang, Petilasan Ardi Lawet di Desa Panusupan Kecamatan Rembang, Desa Wisata Karangbanjar (Kecamatan Bojongsari), Situs Onje di Desa Onje Kecamatan Mrebet, Situs Mujan di Desa Banjarsari Kecamatan Bobotsari, Situs Bandagai di Kecamatan Karangjambu dan Situs Batu Tulis di Desa Cipaku Kecamatan Mrebet.

#### **II.1.6.4. Kawasan Rawan Bencana Alam**

Kawasan Rawan Bencana Alam merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Di wilayah Kabupaten Purbalingga kawasan ini

antara lain berupa kawasan rawan bencana tanah longsor, kawasan rawan bencana banjir, kekeringan, letusan gunung berapi, dan angin topan. Secara rinci rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **II.1.6.4.1. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor**

Wilayah rawan longsor di Kabupaten Purbalingga terdapat di kawasan lereng perbukitan terjal dan di tepian sungai. Kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Purbalingga merupakan kawasan yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi. Tanah di kawasan tersebut umumnya masih merupakan tanah lepas yang masih menumpang pada batuan dasarnya dengan kondisi tanah yang lapuk. Wilayah rawan longsor juga dapat diakibatkan oleh gerusan air sungai yang membentuk tebing terjal atau adanya penggundulan hutan. Selain itu, tingkat kelerengan juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya longsor.

Lokasi kawasan bencana tanah longsor meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Kemangkön (Desa Jetis, Kedungbenda, Pegandekan), sebagian kecil wilayah Kecamatan Kaligondang (Desa Sidareja, Cilapar), sebagian wilayah Kecamatan Karangjambu (Desa Karangjambu, Sirandu, Sanguwatang, Purbasari, Jinkang, Danasari), sebagian kecil wilayah Kecamatan Karanganyar, sebagian kecil wilayah Kecamatan Kertanegara, sebagian kecil wilayah Kecamatan Bojongsari (Desa Banjaran), sebagian kecil wilayah Kecamatan Bobotsari (Desa Banjarsari, Karangmalang), sebagian kecil wilayah Kecamatan Karanganyar (Desa Kalijaran, Brakas, Kaliori), dan sebagian kecil wilayah Kecamatan Mrebet (Desa Sindang, Tangkisan), sebagian wilayah Kecamatan Rembang (Desa Wlahar, Tanalum, Bodaskarangjati, Bantarbarang, Wanogara Wetan, Panusupan, Gunungwuled, Karangbawang), dan sebagian wilayah Kecamatan Karangmoncol (Desa Sirau, Tajug, Pepedan).

#### **II.1.6.4.2. Kawasan Rawan Bencana Banjir**

Kawasan Rawan Bencana Banjir merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal. Kawasan Rawan Bencana Banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Kriteria kawasan yang teridentifikasi sering dan berpotensi mengalami bencana banjir adalah di kawasan cekungan maupun kawasan sekitar sungai.

Lokasi Kawasan Bencana Banjir di Kabupaten Purbalingga meliputi kawasan di sekitar Sungai Klawing, Sungai Serayu, dan Sungai Pekacangan, serta sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Purbalingga. Kawasan rawan bencana banjir yang terdapat di Kabupaten Purbalingga yaitu Kecamatan Kemangkon (Desa Kalialang, Muntang, Sumilir, Jetis, Gambarsari, Toyareka), Kecamatan Purbalingga (Desa Toyareja, Jatisaba, Bancar), Kecamatan Kaligondang (Desa Lamongan, Penaruban, Tejasari, Cilapar), Kecamatan Kalimanah (Desa Sidakangen, Blater), Kecamatan Bojongsari (Desa Galuh, Banjaran), Kecamatan Bobotsari (Desa Banjarsari), Kecamatan Karanganyar (Desa Kaliori, Margasana, Kalijaran, Ponjen), Kecamatan Mrebet (Desa Sindang, Tangkisan), Kecamatan Bukateja (Desa Bajong, Kedungjati), Kecamatan Kejobong (Desa Lamuk), Kecamatan Rembang (Desa Makam, Sumampir, Bodaskarangjati, Bantarbarang, Wanogara Wetan). Kecamatan Karangmoncol (Desa Tajug, Pekiringan, Pepedan, Grantung), dan Kecamatan Kertanegara (Desa Kertanegara).

#### **II.1.6.4.3. Kawasan Rawan Bencana Kekeringan**

Kawasan Rawan Bencana Kekeringan merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana alam kekeringan atau tempat-tempat yang secara rutin setiap musim kemarau mengalami kekeringan dan kesulitan memperoleh air bersih.

Lokasi Kawasan Rawan Bencana Kekeringan di Kabupaten Purbalingga meliputi Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong, Kecamatan Kemangkon, Kecamatan Kaligondang, sebagian kecil Kecamatan Kutasari, dan sebagian kecil Kecamatan Bojongsari.

#### **II.1.6.4.4. Kawasan Rawan Bencana Angin Topan**

Kawasan Rawan Bencana Angin Topan merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami bencana angin topan atau tempat-tempat yang secara rutin dilanda angin topan. Angin topan adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km/jam atau lebih yang sering terjadi di wilayah tropis diantara garis balik utara dan selatan, kecuali di kawasan yang sangat berdekatan dengan khatulistiwa. Angin topan disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar kawasan sistem tekanan rendah yang ekstrem dengan kecepatan sekitar 20 Km/jam.

Lokasi kawasan bencana angin topan di Kabupaten Purbalingga seluas 41.532 hektar yang meliputi Kecamatan Kemangkon (Desa Kedungbenda, Bokol, Majasem, Senon, Pelumutan, Jetis), Kecamatan Kaligondang (Desa Pagerandong, Sidanegara, Arenan, Sempor Lor, Brecek, Cilapar), Kecamatan Kutasari (Desa Karangreja, Candinata, Karangklesem, Sumingkir, Meri, Kutasari, Munjul), Kecamatan Bojongsari (Desa Pekalongan, Beji, Metenggeng, Karangcegak, Bumisari), Kecamatan Bobotsari (Desa Banjarsari, Tlagayasa, Majapura, Karangduren, Kalapacung, Pakuncen, Gunungkarang), Kecamatan Karangreja (Desa Serang, Kutabawa, Karangreja, Siwarak, Tlahap Lor, Gondang), Kecamatan Karangjambu (Desa Sanguwatang, Purbasari, Sirandu, Karangjambu, Jinkang, Danasari), Kecamatan Karanganyar (Desa Ponjen, Kranglean, Langkat, Kalijajar, Brakas, Maribaya), Kecamatan Mrebet (Desa Sangkanayu, Pengalusan, Cipaku), Kecamatan Kejobong (Desa Kejobong, Pangempon, Langgar, Nangkod, Kedarpan), Kecamatan Pengadegan (Desa Tetel, Tumanggal, Bedagas, Larangan, Karangjoho), Kecamatan Rembang

(Desa Panunggalan, Tegalpingen, Gunungwuled, Losari, Bantarbarang, Wanogara Wetan, Lahar, Tanalun, Panusupan, Wanogara Kulon), Kecamatan Karangmoncol (Desa Kramat, Tunjungmuli, Tamansari), Kecamatan Padamara, (Desa Purbayasa, Bojanegara, Karangsentul), Kecamatan Bukateja (Desa Bukateja, Bajong, Kutawis), Kecamatan Kalimanah (Desa Kalikabong, Karangmanyar, Mewek, Selabaya, Babakan).

#### **II.1.6.4.5. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi**

Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Berapi merupakan kawasan yang sering/berpotensi tinggi mengalami/terkena dampak dari letusan gunung berapi, baik bahaya primer (awan panas, lontaran material pijar, hujan abu lebat, lava, dan gas beracun) maupun bahaya sekunder/ikutan yaitu bahaya yang terjadi setelah proses peletusan berlangsung. Bila suatu gunung api meletus akan terjadi penumpukan material dalam berbagai ukuran di puncak dan lereng bagian atas. Pada saat musim hujan tiba, sebagian material tersebut akan terbawa oleh air hujan dan tercipta adonan lumpur turun ke lembah sebagai banjir lahar dingin.

Wilayah yang potensial terkena letusan gunung berapi di Kabupaten Purbalingga mencapai luasan 8.015 hektar yang berada di wilayah lereng Gunung Slamet meliputi Kecamatan Karangreja (Desa Siwarak, Kutabawa, Serang, Karangreja, Tlahab Lor, Tlahab Kidul), Kecamatan Mrebet (Desa Pengalusan, Binangun, Sangkanayu), Kecamatan Bojongsari (Desa Bumisari, Metenggeng), dan Kecamatan Kutasari (Desa Karangjengkol, Candinata, Candiwulan, Cendana).

#### **II.1.6.5. Kawasan Lindung Geologi**

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi yang berada di daerah aliran sungai Klawing dan kawasan imbuhan air tanah berupa Cekungan Air Tanah Puwokerto-Purbalingga.

#### **II.1.6.6. Kawasan Lindung Lainnya**

Kawasan lindung lainnya berupa kawasan lindung plasma nutfah meliputi buah duku berada di Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang dan Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja serta kambing khas Kejobong di Kecamatan Kejobong.

### **II.2. Capaian Hasil-Hasil Pembangunan**

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari Usia Harapan Hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan paritas daya beli masyarakat. Semakin tinggi nilai IPM mencerminkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Di samping itu tingkat kesejahteraan masyarakat juga diukur berdasarkan beberapa indikator yang telah menjadi kesepakatan global dalam rangka pengurangan jumlah keluarga miskin yang tertuang dalam Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millenium Development Goals (MDG's)*. Hakekat MDG's adalah perbaikan kondisi kesehatan dan pendidikan secara substansial di negara-negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut, termasuk Indonesia. Adapun target-target MDG's yang harus dicapai sampai dengan tahun 2015 adalah :

1. Mengurangi separuh proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari \$ US 1 per kapita per hari.
2. Mengurangi separuh proporsi penduduk yang menderita kelaparan.
3. Menjamin baik laki-laki maupun perempuan di manapun untuk dapat menamatkan pendidikan dasar.
4. Mengurangi kesenjangan gender dalam pendidikan dasar dan menengah (Dikdasmen) pada tahun 2010 dan di semua tingkat pada tahun 2015.
5. Memberantas HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya, dimana pada tahun 2015 diharapkan mampu membalikkan tren penularan dari semakin meluas menjadi semakin sedikit.
6. Menurunkan dua pertiga Angka Kematian Bayi (AKB).

7. Menurunkan tiga perempat Angka Kematian Ibu (AKI).
8. Mengurangi hingga separuh penduduk tanpa akses air bersih, juga sebagai upaya pelestarian lingkungan.

Konsep pembangunan Pemerintah Kabupaten Purbalingga berusaha sejalan dengan *Millenium Development Goals (MDG's)*. Selain itu juga mengacu pada konsep pembangunan global yang dipublikasikan tahun 1990 oleh UNDP dalam *Human Development Report (HDR)*. Konsep pembangunan global menyatakan bahwa pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia, yaitu kebebasan politik, hak asasi manusia dan harga diri, hidup sehat dan berumur panjang, berilmu pengetahuan, serta mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk dapat hidup layak.

IPM Kabupaten Purbalingga dari tahun 2005 sampai dengan 2008 senantiasa mengalami peningkatan, dari sebesar 68,5 pada tahun 2005 menjadi sebesar 70,9 pada tahun 2008. Bila dibandingkan dengan rata-rata IPM Jawa Tengah, IPM Kabupaten Purbalingga masih berada di bawahnya. Namun dalam skala wilayah, IPM Kabupaten Purbalingga berada di atas Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Kebumen, dan masih mengejar IPM Banyumas yang sudah mencapai 71,77 pada tahun 2008. Selengkapnya perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga selama lima tahun seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2-1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2009

Tahun	IPM Kab. Purbalingga	IPM Provinsi Jawa Tengah
2005	68,5	69,8
2006	69,9	70,3
2007	70,38	71,2
2008	70,9	71,6
2009	71,51	72,1

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah



Berdasarkan berbagai komponen IPM di atas, terlihat adanya peningkatan kualitas masyarakat Purbalingga secara cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam jangka waktu lima tahun, Usia Harapan Hidup meningkat dari 68,5 tahun pada tahun 2005 menjadi 69,8 tahun pada tahun 2009. Angka melek huruf meningkat menjadi 94,67 persen di tahun 2009 dari 93,1 persen di tahun 2007. Rata-rata angka lama sekolah juga meningkat tajam dari 6 tahun pada tahun 2005 menjadi 6,5 tahun di tahun 2008. Sementara paritas daya beli masyarakat juga meningkat dari Rp. 586.600,- pada tahun 2004 menjadi Rp. 627.570,- pada tahun 2008.

Tabel II.2-2. IPM Kabupaten Purbalingga per Komponen Tahun 2005-2009

No	Komponen	Skor per komponen				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Usia Harapan Hidup (th)	68,5	69	69,6	69,6	69,8
2.	Angka melek huruf (%)	91,27	91,72	89,17	91,00	91,26
3.	Rata-rata lama sekolah (th)	6	6,80	6,46	6,5	7,00
4.	Paritas daya beli (ribu rp)	620,1	621,01	623,06	627,57	630,44

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009

Keberhasilan pembangunan juga diukur dari seberapa jauh kegiatan pembangunan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin. Secara nominal jumlah penduduk miskin sulit untuk dikurangi, namun secara proporsional dapat berkurang. Berdasarkan data makro hasil survey BPS, penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga terus mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2005, penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebesar 29,95 persen, berkurang menjadi sebesar 24,97 persen pada tahun 2009. Sementara persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 sebesar 20,43. Berikut kondisi penduduk miskin Kabupaten Purbalingga selengkapnya seperti terlihat pada tabel II.2-3.

Tabel II.2-3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

Tahun	Kabupaten Purbalingga	Provinsi Jawa Tengah
2005	29,95	20,9
2006	32,38	22,19
2007	30,24	20,43
2008	27,12	19,23
2009	24,97	17,72

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2005-2009

Dari aspek ekonomi, pembangunan Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan hasil yang cukup signifikan. Secara absolut PDRB Kabupaten Purbalingga baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, mengalami kenaikan yang cukup stabil. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga berkisar antara 3 sampai dengan 6 persen. Lesunya pasar dunia, kenaikan harga BBM dunia, dan turunnya permintaan pasar internasional dan nasional, ternyata tidak terlalu terasa dampaknya terhadap perekonomian Purbalingga. Bahkan pada tahun 2007 dan 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah maupun nasional.

Pada tahun 2005 laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga berada pada angka 4,18 persen dan pada tahun 2009 berada pada angka 5,84 persen. Berikut ini perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga dengan Provinsi Jawa Tengah tahun 2005-2009.

Tabel II.2-4. Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009

Tahun	Kabupaten Purbalingga		Provinsi Jawa Tengah	
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Inflasi	Pertumbuhan ekonomi (%)	Inflasi
2005	4.18	18,71	5.35	
2006	5.06	6,90	5.33	6.5
2007	6.19	6,52	5.59	6.24
2008	5.30	9,51	5.50	
2009	5.61	3.35	4.70	3.32

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, diolah.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga yang pada tahun 2005 masih di bawah pertumbuhan Jawa Tengah, pada tahun-tahun berikutnya mulai mengimbangi, bahkan berada di atas pertumbuhan Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Gambaran pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga per sektor dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.2-5. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga per Lapangan Usaha Tahun 2005-2009

No.	Lapangan Usaha	Tahun (%)					Rata - rata
		2005	2006	2007	2008	2009	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan	2.78	3.07	4.23	2.81	3.95	3.30
2.	Pertambangan dan penggalian	9.73	8.47	8.82	9.64	10.12	4.30
3.	Industri pengolahan	5.37	6.42	6.59	6.09	7.30	6.35
4.	Listrik, gas dan air minum	9.28	12.42	0.32	5.48	9.72	7.44
5.	Bangunan	8.36	6.82	6.93	7.54	8.37	7.60
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	3.72	4.60	7.16	5.00	7.19	5.53
7.	Pengangkutan dan komunikasi	1.45	2.04	5.33	6.58	6.64	4.41
8.	Keuangan, persewaan dan jasa	4.15	8.04	12.10	6.32	8.62	7.85
9.	Jasa-jasa	6.33	7.83	7.06	8.22	7.83	7.45

Sumber: BPS Kab. Purbalingga

Dalam lima tahun terakhir, sektor pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan tertinggi dibanding sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Purbalingga, diikuti sektor keuangan, persewaan, dan jasa; listrik, gas dan air minum; bangunan; jasa-jasa; dan terakhir sektor industri pengolahan.

Struktur ekonomi secara kuantitatif digambarkan dengan menghitung besarnya persentase peranan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor terhadap nilai total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2-6. Struktur PDRB Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 -2009 Atas Dasar Harga Berlaku

No	Sektor	Tahun (%)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, perikanan	33.44	33.52	33.44	33.06	32.75
2.	Pertambangan dan penggalian	0.65	0.65	0.67	0.68	0.71
3.	Industri pengolahan	10.41	10.35	10.40	10.43	10.08
4.	Listrik, gas, dan air minum	1.09	1.09	1.00	0.92	0.68
5.	Bangunan	8.05	8.10	8.05	8.01	8.15
6.	Perdagangan, hotel dan restoran	17.67	17.46	17.93	17.97	18.70
7.	Pengangkutan dan komunikasi	6.07	5.76	5.62	5.40	5.26
8.	Keuangan, persewaan, dan jasa	6.15	6.36	8.63	6.50	6.28
9.	Jasa-jasa	16.46	16.72	16.43	17.03	17.39

Sumber: BPS Kab. Purbalingga, diolah

Struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2005 – 2009 masih didominasi sektor pertanian. Pada tahun 2009, sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 32,75 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 33,06 persen. Sementara itu tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Purbalingga masih perlu untuk ditingkatkan. Nilai Tukar Petani (NTP) di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2010 menunjukkan angka sebesar 101,59.

Sektor penyumbang PDRB yang cenderung naik dibanding tahun 2008 antara lain sektor penggalian, sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor jasa-jasa. Meskipun masih didominasi sektor primer (pertanian), struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga terus mengalami pergeseran yang ditunjukkan dengan terus menurunnya peran sektor primer (pertanian) dan meningkatnya sektor sekunder dan tersier (industri dan jasa) meskipun berlangsung relatif lambat. Kondisi ini berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang memiliki struktur ekonomi dengan kontribusi yang besar di sektor industri pengolahan.

PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga terus mengalami kenaikan selama lima tahun terakhir, meskipun masih lebih rendah dibanding PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2005 PDRB per kapita penduduk Kabupaten Purbalingga mencapai Rp 3.325.494,00 dan pada tahun 2009 meningkat tajam menjadi Rp 5.838.901,00. Namun demikian,

peningkatan yang sangat signifikan ini belum bisa mengimbangi PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah karena struktur ekonomi Kabupaten Purbalingga masih didominasi oleh sektor ekonomi tradisional yakni sektor pertanian yang memiliki nilai tambah relatif kecil. Kondisi ini berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki struktur ekonomi dengan kontribusi yang besar di sektor industri pengolahan yang memiliki nilai tambah besar. PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.2-7. PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009

Tahun	PDRB per kapita (Rp.)	
	Kab. Purbalingga	Prov. Jawa Tengah
2005	3.325.494	6.275.651
2006	3.862.595	7.538.997
2007	4.377.449	8.281.309
2008	4.970.626	9.522.019
2009	5.838.901	10.228.762

Sumber: BPS Kab. Purbalingga & Provinsi Jawa Tengah

Meskipun PDRB per kapita Kabupaten Purbalingga relatif kecil namun terdistribusi secara relatif merata. Hal ini terlihat dari *Gini Ratio* yang berada pada angka di bawah 0,3 (ketimpangan rendah). *Gini Ratio* Kabupaten Purbalingga tahun 2005–2009 adalah sebagaimana pada tabel II.2-8.

Tabel II.2-8. Indeks Gini Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009

Tahun	Indeks Gini	
	Kab. Purbalingga	Prov. Jawa Tengah
2005	0.2713	0,28
2006	0.2873	0,27
2007	0.2727	0,25
2008	0.2676	0,25
2009	0.2625	0,25

Sumber: BPS Kab. Purbalingga & Prov. Jawa Tengah

Keterangan :

- |                          |   |                    |
|--------------------------|---|--------------------|
| a. $G < 0,3$             | = | ketimpangan rendah |
| b. $0,3 \leq G \leq 0,5$ | = | ketimpangan sedang |
| c. $G > 0,5$             | = | ketimpangan tinggi |

Kondisi perekonomian Kabupaten Purbalingga juga menunjukkan pemerataan yang cukup baik dilihat berdasarkan ketimpangan antarwilayah. Berdasarkan Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional/IKR), IKR Kabupaten Purbalingga berada pada kisaran angka 0,3 – 0,5 (ketimpangan sedang).

Tabel II.2-9. Indeks Williamson Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2009

Tahun	Indeks Williamson	
	Kab. Purbalingga	Prov. Jawa Tengah
2005	0.46	0,72
2006	0.47	0,75
2007	0.48	0,73
2008	0.49	0,74
2009	0.49	0,70

Sumber: BPS Kab. Purbalingga & Prov. Jawa Tengah

Keterangan :

- a. Indeks Williamson = 0, kesenjangan sangat rendah (merata sempurna)
- b. Indeks Williamson = 0,5 – 1, kesenjangan sangat tinggi (tidak merata sempurna)
- c. Indeks Williamson = 0,3 – 0,5, kesenjangan sedang
- d. Indeks Williamson = < 0,3, kesenjangan rendah

Peran besar sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga serta besarnya proporsi angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian menyebabkan tingginya pengaruh sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan perkapita serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Naik turunnya produksi dan nilai produksi sektor pertanian sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat. Meskipun demikian, apabila peningkatan produksi maupun nilai produksi tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup maka peningkatan produksi dan nilai produksi tersebut tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur nilai produk pertanian dibanding dengan kebutuhan hidup lainnya adalah nilai tukar petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Purbalingga tidak jauh berbeda dengan dibandingkan

dengan NTP Provinsi Jawa Tengah, NTP Provinsi Jawa Tengah sebesar 103,18 (2007) dan NTP Kabupaten Purbalingga sebesar 103,24 (2008).

Hasil-hasil pembangunan Kabupaten Purbalingga yang telah dicapai pada tahap lima tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2025 adalah sebagai berikut :

### **II.2.1. Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi**

Otonomi telah memunculkan sikap percaya diri perangkat daerah untuk menciptakan kreativitas, inovasi, dan terobosan-terobosan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan; meningkatkan kemampuan merumuskan kebijakan (*policy*) dan pengambilan keputusan secara lebih tepat, cepat, dan sesuai kebutuhan daerah; menumbuhkan upaya memberikan pelayanan secara lebih prima kepada masyarakat dan upaya menyelesaikan permasalahan-permasalahan lokal yang bersifat mendesak secara lebih cepat; serta semakin mendorong kehidupan sosial budaya masyarakat, ekonomi kerakyatan, dan kehidupan demokrasi. Dampak nyata dari penerapan otonomi daerah di Kabupaten Purbalingga antara lain adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas pelayanan publik, serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kondisi umum pemerintahan dan aparatur di Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa masih memerlukan penyesuaian secara terus-menerus sejalan dengan dinamika lingkungan, kebutuhan, dan peraturan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan belum optimal menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara kualitas SDM aparatur masih perlu ditingkatkan sesuai tuntutan dinamika perubahan dan kebutuhan. Dari sisi kuantitas, pada

tahun 2009 jumlah PNS di Kabupaten Purbalingga sebanyak 10.010 orang dengan rincian menurut golongan : golongan I sebanyak 423 orang, golongan II sebanyak 2.481 orang, golongan III sebanyak 4.150 orang, dan golongan IV sebanyak 2.956 orang. Dilihat dari tingkat pendidikan, PNS yang berpendidikan SD atau sederajat sebanyak 333 orang (3,33 %), berpendidikan SMP atau sederajat sebanyak 486 orang (4,85 %), berpendidikan SMA atau sederajat sebanyak 2.508 orang (25,05 %), berpendidikan D1 sebanyak 160 orang (1,60 %), berpendidikan D2 sebanyak 2.296 orang (22,94%), berpendidikan D3 sebanyak 1.009 orang (10 %), berpendidikan D4 sebanyak 7 orang (0,07 %), berpendidikan S1 sebanyak 3.078 orang (30,75 %), dan pendidikan S2 sebanyak 133 orang (1,33%).

3. Ketersediaan dan mutu prasarana, sarana, dan sistem pelayanan umum relatif masih kurang.
4. Kualitas pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah cukup memadai. Di bidang pelayanan perijinan melalui kebijakan *one stop service*, Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (KPMPT) telah mampu melayani 13 jenis perijinan dengan penerapan Standard ISO 14001. Sementara pelayanan administrasi kependudukan telah menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang didelegasikan ke setiap kecamatan.

### **II.2.2. Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban**

Di tengah semakin derasny arus penetrasi budaya global, semakin berkembang nilai-nilai individualisme, materialisme, dan hedonisme. Nilai-nilai ini berdampak pada terbaikannya nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kejujuran. Sementara di sisi lain perhatian terhadap pembangunan kebudayaan dan pembinaan serta pengembangan nilai-nilai nasionalisme, terutama pada kalangan generasi muda terasa



sangat kurang. Kondisi ini telah menyebabkan semakin melemahnya semangat nasionalisme serta menurunnya solidaritas sosial. Adanya indikasi kerawanan sosial yang muncul dalam bentuk gangguan keamanan dan ketertiban umum, menunjukkan belum berkembangnya budaya hukum. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat mengganggu dan mengurangi intensitas aktivitas sosial ekonomi masyarakat sehingga berpengaruh negatif terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan. Pada tahun 2009 angka pelanggaran hukum yang dilaporkan di Kabupaten Purbalinga sebanyak 309 kasus dan kecelakaan/pelanggaran lalu lintas sebesar 12.302 kasus. Sementara itu jumlah kejadian unjuk rasa politik sebanyak 15 kasus dan unjuk rasa terkait masalah ekonomi sebanyak 3 kasus. Berikut ditampilkan kondisi politik, hukum, keamanan, dan ketertiban selama tahun 2005-2009.

Tabel II.2.2-1. Kondisi Politik, Hukum, Keamanan, dan Ketertiban di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Tahun	Kasus pelanggaran hukum		Kasus unjuk rasa	
		Pidana	Pelanggaran lant.	Politik	Ekonomi
1.	2005	181	2.532	10	11
2.	2006	224	4.406	11	5
3.	2007	264	9.369	13	3
4.	2008	326	17.423	11	3
5.	2009	309	12.302	15	3

Sumber: SIPD Kabupaten Purbalingga

Proses demokratisasi yang telah berlangsung seiring dengan bergulirnya reformasi politik telah membawa perubahan mendasar terhadap kehidupan politik. Terbukanya keran demokrasi telah memungkinkan partisipasi politik rakyat yang semakin besar dalam segala jenjang. Namun demikian, berkembangnya kehidupan demokrasi belum diikuti dengan etika dan kedewasaan berpolitik. Demokrasi baru dimaknai sekadar sebagai kebebasan mengaktualisasikan dan mengartikulasikan pendapat, gagasan, dan aspirasi. Euforia politik di tengah irasionalitas politik dan kurangnya pemahaman dan penghayatan terhadap etika politik sangat rawan menimbulkan friksi dan konflik.

Kesadaran politik rakyat antara lain dapat diukur dari tingkat partisipasi rakyat dalam pemilihan umum (Pemilu). Tingkat partisipasi rakyat di Kabupaten Purbalingga dalam Pemilu tahun 2009 sebesar 71,23 atau turun sebesar 13 persen dari Pemilu tahun 2004 yang tingkat partisipasinya sebesar 84,3 persen.

Peta politik Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dari keterwakilan partai politik di lembaga legislatif. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memperoleh suara terbanyak yakni 13 kursi, turun 4 kursi dibanding pemilu Tahun 2004 sejumlah 17 kursi. Secara lebih rinci, perolehan kursi hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004 dan 2009 di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.2.2-2. Perolehan Kursi Parpol di Kabupaten Purbalingga pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009

No	Nama parpol	Perolehan kursi pada Pemilu 2004			Perolehan kursi pada Pemilu 2009		
		L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
1.	PDI-P	14	3	17	12	1	13
2.	Golkar	8	2	10	4	2	6
3.	PKB	5	1	6	4	1	5
4.	PAN	5	1	6	4	1	5
5.	PD	1	0	1	5	2	7
6.	PDP	0	0	0	1	1	2
7.	PMB	0	0	0		1	1
8.	PPP	3	1	4	1	1	2
9.	PKS	1	0	1	4	-	4
Jumlah		37	8	45	35	10	45

Sumber: KPU Kabupaten Purbalingga

### II.2.3. Kondisi Sosial Budaya

#### II.2.3.1. Gambaran Umum Kependudukan dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan yang ingin diwujudkan melalui upaya pembangunan sangat ditentukan oleh pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah penduduk sangat menentukan tingkat efektifitas pendayagunaan sumber daya pembangunan serta efektifitas penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan karena jumlah penduduk merupakan faktor pembagi dalam alokasi pemanfaatan

sumberdaya pembangunan maupun dalam pemanfaatan dan pendistribusian hasil pembangunan. Jumlah penduduk yang besar dengan sendirinya menuntut penyediaan alokasi belanja pemerintah yang besar pula guna memenuhi kebutuhan pelayanan sosial dan ekonomi. Dengan terbatasnya kemampuan anggaran pemerintah maka besarnya jumlah penduduk dengan sendirinya juga akan menyebabkan terbatasnya akses masyarakat terhadap berbagai fasilitas pelayanan sosial. Rendahnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan ketrampilan akan menyebabkan rendahnya kualitas dan produktivitas penduduk. Di samping itu jumlah penduduk yang besar juga akan meningkatkan faktor pembagi terhadap pendapatan regional sehingga menyebabkan kecilnya tingkat pendapatan per kapita. Penurunan pendapatan dan rendahnya kualitas penduduk dalam jangka panjang dapat menimbulkan implikasi yang kurang menguntungkan. Di bidang ekonomi, rendahnya tingkat pendapatan perkapita akan berimplikasi terhadap tingkat tabungan, investasi, distribusi pendapatan, migrasi penduduk, dan faktor lain yang mempengaruhi laju pembangunan. Sedangkan di bidang sosial, rendahnya tingkat pendapatan per kapita dan rendahnya kualitas penduduk akan saling mempengaruhi, yang kemudian akan berimplikasi terhadap peningkatan berbagai permasalahan sosial seperti meningkatnya angka kriminalitas, konflik sosial, kemiskinan dan sebagainya.

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Keadaan ini mengharuskan pemerintah untuk lebih memperhatikan upaya-upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk. Penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 mencapai 896.272 atau bertambah sebesar 16.321 jiwa dari keadaan tahun 2005 yang berjumlah 879.951 orang. Secara rinci jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2009 disajikan pada tabel berikut.

Tabel II.2.3.1-1. Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Menurut Kecamatan Tahun 2005-2009

No	Kecamatan	Banyaknya penduduk (jiwa)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Kemangkön	53.646	53.854	54.121	54.434	54.730
2	Bukateja	67.317	67.869	68.281	68.937	69.469

No	Kecamatan	Banyaknya penduduk (jiwa)				
		2005	2006	2007	2008	2009
3	Kejobong	41.923	41.966	42.109	42.363	42.632
4	Pengadegan	37.064	37.466	37.924	38.234	38.515
5	Kaligondang	58.428	58.643	58.954	59.146	59.352
6	Purbalingga	56.191	56.607	57.043	57.232	57.387
7	Kalimanah	49.166	49.447	50.207	50.791	51.094
8	Padamara	34.068	34.122	34.181	34.475	34.877
9	Kutasari	53.768	54.252	54.775	55.240	55.540
10	Bojongsari	54.644	54.895	55.129	55.349	55.697
11	Mrebet	69.698	70.037	70.620	71.152	71.518
12	Bobotsari	51.492	51.794	52.215	52.418	52.795
13	Karangreja	39.344	39.842	40.379	40.868	41.359
14	Karangjambu	23.350	23.461	23.501	23.668	23.776
15	Karanganyar	37.485	37.611	37.656	37.711	37.774
16	Kertanegara	33.918	34.016	34.101	34.155	34.248
17	Karangmoncol	55.850	56.134	56.319	56.559	56.817
18	Rembang	62.599	63.023	63.264	63.540	63.789
<b>Jumlah</b>		<b>879.951</b>	<b>885.039</b>	<b>890.779</b>	<b>896.272</b>	<b>901.369</b>
% Pertumbuhan		0,92	0,57	0,64	0,61	0,57

*Sumber: Purbalingga dalam Angka Tahun 2005 - 2010*

Dari sisi distribusi, persebaran penduduk Kabupaten Purbalingga relatif merata. Pada tahun 2009, jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Mrebet yaitu sebanyak 72.153 jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Karangjambu yaitu sebanyak 23.668 jiwa. Adapun rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,68 persen pertahun.

Berdasarkan umur, kondisi penduduk Kabupaten Purbalingga usia produktif (15 - 64 tahun) menunjukkan angka tertinggi, disusul kelompok usia belum produktif (0 - 14 tahun). Sedangkan kelompok umur yang sudah tidak produktif (65 tahun ke atas) menempati posisi paling rendah. Pada tahun 2009 penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Purbalingga mencapai 63,54 persen. Sementara kelompok usia belum produktif (0 - 14 tahun) sebesar 28,63 persen dan kelompok usia yang sudah tidak produktif (65 tahun ke atas) ada 7,83 persen. Komposisi ini memperlihatkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Purbalingga tergolong penduduk muda dengan tingkat pertumbuhan tinggi.

Berdasarkan tingkat pendidikan, pada tahun 2009 jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga sebagian besar masih berpendidikan SD atau sederajat (SD dan MI), yaitu sebesar 36,66%, disusul dengan jumlah penduduk lulusan SLTP (SMP dan MTs) sebesar 16,16% orang. Jumlah penduduk berpendidikan SLTA (SMA, MA, dan SMK) sebesar 9,34 orang, D1 dan D2 sebesar 0,85%, D3/D4/S1/S2/S3 sebesar 2,74%, sedangkan yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 6,09% serta yang tidak/belum tamat SD sebesar 28,11%.

Tabel II.2.3.1-2. Perkembangan Penduduk Menurut tingkat Pendidikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Pendidikan	Tahun (%)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Tidak/belum sekolah	8,10	8,30	6,83	6,09	4,94
2.	Tidak/belum tamat SD	29,20	29,10	23,22	28,16	25,25
3.	SD dan sederajat	38,30	37,50	37,34	36,66	38,93
4.	SMP dan sederajat	14,20	14,80	18,13	16,16	17,82
5.	SMA dan sederajat	8,70	8,70	8,44	9,34	9,27
6.	DI dan DII, D III, D IV, S1, S2, S3	1,40	1,50	3,26	3,59	3,79
Jumlah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Purbalingga Dalam Angka Tahun 2005-2010

Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga cenderung meningkat, hal ini mengindikasikan keberhasilan berbagai program pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini antara lain tercermin dari tren menurunnya proporsi Keluarga Pra Sejahtera dari tahun 2005-2009, meski sempat meningkat di tahun 2006 akibat kenaikan harga BBM.

Tabel II.2.3.1-3. Perkembangan Tahapan Keluarga Sejahtera Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2009

No	Tahun	Kategori keluarga				
		Pra- sejahtera	KS1	KS2	KS3	KS3+
1	2005	76.049	61.064	70.329	37.312	1.541
2	2006	88.334	46.226	58.541	61.755	2.697
3	2007	86.598	48.128	55.577	62.100	2.640
4	2008	82.785	50.413	60.232	63.945	2.395
5	2009	80.074	50.820	62.951	68.506	2.396

Sumber: BKBPP Kabupaten Purbalingga

Proporsi keluarga pra sejahtera di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2005, penduduk yang masuk kategori keluarga pra sejahtera sebanyak 33,28 persen, namun pada tahun 2009 proporsinya menurun menjadi 30,88 persen.

Beberapa indikator menunjukkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana (KB) sudah memenuhi harapan Program KB. Hal ini terlihat dari angka kepesertaan Keluarga Berencana aktif (peserta aktif/PA) menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) tahun 2009 yang hanya sebesar 25,15 persen, sedangkan peserta non-MKJP sebesar 74,85 persen. Sementara prevalensi pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur (15 – 49 tahun) sebesar 78,67 persen.

Tabel II.2.3.1-4. Peserta KB Aktif dan Metode Kontrasepsi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2009

No	Kecamatan	Jumlah PUS	Metode kontrasepsi			Persentase peserta KB aktif
			MKJP	Non MKJP	Jumlah	
1	2005	168.132	34.522	97.501	132.023	78,52
2	2006	170.522	31.287	102.996	134.253	78,73
3	2007	174.760	22.710	115.898	138.608	79,31
4	2008	178.054	35.184	108.183	143.367	80,52
5	2009	181.490	35.915	108.484	144.399	79,56

Sumber: BKBPP Kabupaten Purbalingga

### II.2.3.2. Pendidikan

Sumber daya manusia memiliki posisi strategis dalam pembangunan suatu negara. Upaya terpenting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2005–2009 dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan

pendidikan yang meliputi Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Angka Melek Huruf (AMH), serta Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) SD, SLTP, dan SLTA, Angka Putus Sekolah, dan Angka Melanjutkan Sekolah.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah angka lama sekolah didasarkan pada data jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan untuk penduduk berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan rekomendasi UNDP, tingkat capaian pendidikan ideal yang harus diraih oleh seorang penduduk adalah 15 tahun. Target angka ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan capaian tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Purbalingga. Tingkat capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2009 adalah sebagai berikut.

Tabel II.2.3.2-1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)  
Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Tahun	Rata-rata lama sekolah (tahun)	
		Kab. Purbalingga	Prov. Jateng
1.	2005	6,00	6,60
2.	2006	6,80	6,80
3.	2007	6,46	6,80
4.	2008	6,50	6,86
5.	2009	7,00	7,07

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah

Tabel di atas menunjukkan tahun 2005 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Purbalingga mencapai 6 tahun, tahun 2006 mengalami peningkatan menjadi 6,80, tahun 2007 turun menjadi 6,46 tahun. Pada tahun 2008 rata-rata lama sekolah mencapai 6,5 tahun, dan tahun 2009 diestimasi mencapai angka 7 tahun. Angka ini masih jauh dari target Wajib Belajar 9 Tahun, yaitu RLS sebesar 9 tahun.

Angka Melek Huruf (AMH) pada tahun 2009 diestimasi sebesar 94,67 persen, artinya penduduk usia 15 tahun ke atas sudah 94,67 persen dapat membaca dan menulis, sedangkan sisanya sebesar 5,33 persen masih buta huruf. Dari tahun 2005 sampai 2009 terjadi peningkatan AMH sebesar 3 persen. Meningkatnya AMH merupakan hasil dari berbagai kebijakan dan

program pemerintah dalam memberantas buta huruf, baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal.

Tabel II.2.3.2-2. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Tahun	Angka Melek Huruf (%)	
		Kab. Purbalingga	Prov. Jateng
1.	2005	91,27	87,40
2.	2006	91,72	88,20
3.	2007	89,17	92,30
4.	2008	91,00	89,24
5.	2009	91,26	89,46

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga dan Provinsi Jawa Tengah

Capaian Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2009 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 AMH mencapai 91,27 persen, tahun 2006 AMH mencapai 91,72 persen, dan tahun 2007 AMH mencapai 89,17 persen. Pada tahun 2008 AMH mencapai 91,00 persen, sedangkan tahun 2009 AMH mencapai 91,26 persen.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) digunakan untuk melihat berapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Dari data Angka Partisipasi Murni (APM) di bawah ini terlihat bahwa penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah di SD sebesar 100 persen. Kelompok penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah di SLTP sebanyak 66,22 persen, sedangkan sisanya tidak/belum sekolah atau tidak bersekolah lagi. Kelompok penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah di SLTA sebanyak 37,72 persen, sedangkan sisanya tidak/belum sekolah atau tidak bersekolah lagi.

Tabel II.2.3.2-3. APK SD, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kabupaten Purbalingga Tahun 2005- 2009

No.	TAHUN	SD	SMP/MTs	SMA/ MA/ SMK
1	2005	101,54	93,67	40,93
2	2006	111,51	94,96	38,08
3	2007	111,36	92,17	40,93
4	2008	113,66	96,69	38,08
5	2009	108,38	96,06	41,77

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga



Tabel II.2.3.2-4. APM SD, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No.	TAHUN	SD	SMP/MTs	SMA/ MA/ SMK
1	2005	93,44	70,60	25,31
2	2006	92,79	62,09	25,42
3	2007	94,78	68,93	25,67
4	2008	93,59	70,84	30,64
5	2009	91,07	68,49	31,24

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Purbalingga yang telah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan, telah menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik sebagaimana tercermin pada data-data indikator kinerja sebagai berikut:

1. Meningkatnya cakupan siswa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) usia 4 - 6 tahun dari 29,34 persen pada tahun 2005; 30,60 persen pada tahun 2006; 33,05 persen pada tahun 2007; dan 37,25 persen pada tahun 2008; menjadi 38,56 persen pada tahun 2009.
2. Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI dari 0,28 persen pada tahun 2005; 0,28 persen pada tahun 2006; 0,71 persen pada tahun 2007; 0,17 persen pada tahun 2008; menjadi 0,15 persen pada tahun 2009. APS SMP/MTs meningkat dari 0,62 persen pada tahun 2005 menjadi 1,11 persen pada tahun 2006. Kondisi ini terjadi seiring dengan memburuknya kondisi ekonomi akibat kenaikan harga BBM. Sedangkan pada tahun 2007-2009 APS terus mengalami penurunan. Pada tahun 2007 APS SMP/MTs sebesar 0,62 persen, pada tahun 2008 sebesar 0,18 persen, dan pada tahun 2009 menjadi sebesar 0,08 persen. Angka putus sekolah di tingkat SLTA pada tahun 2005 sebesar 0,89 persen dan pada tahun 2006 turun sedikit menjadi 0,88 persen. Sedangkan pada tahun 2007 menjadi 0,75 persen dan pada tahun 2008 turun cukup signifikan menjadi 0,31 persen. Namun pada tahun 2009 naik tajam menjadi 0,80 persen.
3. Pada tahun 2005 Angka Kelulusan SD/MI sebesar 98,01 persen, pada tahun 2006 sebesar 98,91 persen, pada tahun 2007 sebesar 99,39 persen, pada tahun 2008 sebesar 98,76 persen, dan pada tahun 2009 sebesar 97,79 persen. Pada tahun 2005 Angka Kelulusan SMP/MTs

sebesar 84,56 persen, pada tahun 2006 sebesar 84,87 persen, pada tahun 2007 sebesar 86,15 persen, pada tahun 2008 sebesar 87,98 persen, dan pada tahun 2009 menjadi sebesar 90,51 persen. Sedangkan Angka Kelulusan SLTA pada tahun 2005 sebesar 75,33 persen, pada tahun 2006 sebesar 75,33 persen, pada tahun 2007 sebesar 85,00 persen, pada tahun 2008 sebesar 81,66 persen, dan pada tahun 2009 menjadi sebesar 88,28 persen.

4. Meningkatnya Angka Melanjutkan Sekolah ke jenjang SMP/MTs pada tahun 2005 sebesar 81,36 persen menjadi 94,06 persen pada tahun 2009; dan Angka Melanjutkan Sekolah ke jenjang SLTA pada tahun 2005 sebesar 53,02 persen menjadi 85,25 persen pada tahun 2009.
5. Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV pada tahun 2005 sebesar 24,05 persen, pada tahun 2006 sebesar 24,97 persen, pada tahun 2007 sebesar 31,36 persen, pada tahun 2008 sebesar 32,30 persen, sedangkan pada tahun 2009 sebesar 48,94 persen.
6. Meningkatnya jumlah guru yang bersertifikat profesi sampai dengan akhir tahun 2009 mencapai 1.991 orang (33,02 persen) dari total pengajar/ guru PNS sebanyak 6.029 orang.

### **II.2.3.3. Kesehatan**

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat. Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan di puskesmas dan jaringannya serta peningkatan pelayanan kesehatan dasar lainnya.

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal melalui upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dengan indikator meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH), menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), persentase tenaga kesehatan penolong kelahiran, jumlah fasilitas pengobatan, jumlah tenaga kesehatan baik medis maupun non medis dan lain-lain.

Salah satu indikator IPM adalah Usia Harapan Hidup (UHH), yakni rata-rata ketahanan hidup yang dijalani seseorang hingga akhir hayatnya di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan lama hidup dan hidup sehat. Angka ini secara teoritis mempunyai hubungan terbalik dan korelasi yang tinggi dengan Angka Kematian Bayi. Artinya, jika terjadi penurunan Angka Kematian Bayi maka akan terjadi peningkatan Usia Harapan Hidup. Selain dipengaruhi oleh Angka Kematian Bayi, Usia Harapan Hidup juga menggambarkan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, membaiknya sistem pelayanan kesehatan, dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan bersih.

Dalam upaya meningkatkan Usia Harapan Hidup juga perlu diperhatikan upaya menurunkan Angka Kematian Bayi / Infant Mortality Rate (AKB/IMR) dan Angka Kematian Ibu / Maternal Mortality Rate (AKI/MMR). Upaya yang dilakukan tidak hanya meningkatkan pelayanan dan/atau meningkatkan sarana kesehatan tetapi juga mengidentifikasi permasalahan sosial ekonomi masyarakat, serta kultur dan tata nilai masyarakat terhadap kesehatan anak.

Tabel II.2.3.3-1. Usia Harapan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
Usia Harapan Hidup (tahun)	68,5	69,00	69,60	69,60	69,80

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Usia Harapan Hidup di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2005-2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2005 sebesar 68,50 tahun. Tahun 2006-2008 berturut-turut sebesar 69 tahun; 69,6 tahun; dan 69,6 tahun. Sedangkan pada tahun 2009 meningkat menjadi 69,8 tahun.

Angka Kematian Bayi (AKB/IMR) Kabupaten Purbalingga pada tahun 2005 sebesar 10 jiwa/1000 kelahiran hidup (kh), sedangkan pada tahun 2009 sebesar 5 jiwa/1000 kh. AKB ini dapat dipengaruhi oleh

kematian bayi akibat kesulitan pada saat persalinan dan kematian setelah persalinan. Angka Kematian Ibu (AKI/MMR) pada tahun 2005 menunjukkan angka 110 jiwa/100.000 kh, dan pada tahun 2009 mengalami penurunan menjadi 103 jiwa/100.000 kh.

Penolong persalinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga medis yang memiliki kompetensi kebidanan terus meningkat dari 69,20 persen pada tahun 2005; 69,30 persen pada tahun 2006; 84,65 persen pada tahun 2007, dan 88,24 persen pada tahun 2008, menjadi 94,40 persen pada tahun 2009. Bayi yang ditolong oleh tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan tenaga medis lain mempunyai peluang selamat lebih besar dibandingkan bayi yang ditolong oleh dukun bayi. Hal ini disebabkan tenaga kesehatan lebih memperhatikan tingkat kebersihan, pencegahan infeksi, memiliki alat-alat persalinan yang lengkap, dan melakukan pemeliharaan bayi pasca persalinan (*post partum*).

Data status kesehatan balita menunjukkan bahwa 96,73 persen balita pernah diberi Air Susu Ibu (ASI). Lamanya diberi ASI bervariasi antara 1 bulan sampai lebih dari 24 bulan. Inisiasi menyusui dini dan ASI dini sangat penting karena membangkitkan kedekatan emosional antara ibu dengan bayinya. Bayi yang mendapatkan ASI akan lebih tahan terhadap penyakit karena memperoleh kekebalan (*imune*) secara alamiah. Kesehatan yang baik pada masa balita akan menentukan kesehatan anak pada masa berikutnya, yang berimplikasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Kejadian gizi buruk pada balita tahun 2005 sebanyak 298 anak, sedangkan tahun 2009 sebanyak 600 anak. Secara nominal, kejadian gizi buruk menunjukkan peningkatan, tetapi jika dibandingkan dengan perkembangan jumlah penduduk, persentasenya mengalami penurunan.

Imunisasi merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan anak. Cakupan desa/kelurahan yang termasuk *Universal Child Immunization* (UCI) mengalami fluktuasi, meskipun ada kecenderungan terus meningkat. Pada tahun 2005 cakupan UCI sebesar 77,00 persen,

pada tahun 2006 sebesar 78,60 persen, dan pada tahun 2007 mengalami penurunan menjadi sebesar 60,67 persen. Pada tahun 2008 cakupannya meningkat menjadi 82,00 persen dan pada tahun 2009 menjadi 88,70 persen.

Tabel II.2.3.3-2. Kondisi Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Indikator	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Usia Harapan Hidup (tahun)	68,5	69,00	69,60	69,60	69,80
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	NA	8,11	6,34	6,75	10,8
3.	Angka Kematian Ibu (AKI)	NA	69,34	110,34	105,98	121,17
4.	Penolong kelahiran oleh tenaga medis (%)	69,20	69,30	85,04	85,40	91,09
5.	Cakupan pemberian ASI (%)	97,67	99,54	97,32	96,73	98,05
6.	Kejadian balita gizi buruk (kejadian)	298	264	204	90	600
7.	Cakupan imunisasi balita (%)	77,0	78,6	60,67	82,0	88,7
8.	Keluhan Kesehatan Utama Penduduk (%)					
	-Panas	13,39	14,25	14,93	10,96	13,87
	-Batuk	22,62	24,38	21,19	15,47	18,78
	-Pilek	23,27	26,51	19,30	17,54	22,84
	-Asma/sesak napas	3,12	2,81	2,80	1,74	1,19
	-Diare	1,81	2,55	1,89	1,44	1,21
	-Sakit kepala	12,84	12,38	13,30	8,97	8,31
	-Sakit gigi	1,82	2,31	2,41	2,47	1,61
	-Lainnya	21,13	14,81	24,18	15,76	17,97
9.	Kasus Penyakit Menular Berbahaya					
	-DBD	-	102	137	312	658
	-HIV/AIDS	0	0	2	1	1
	-Malaria	-	1332	478	130	668
	-CDR TB	-	36,38%	37,32%	46,57%	44,21%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Kualitas hunian sangat menentukan kualitas kesehatan masyarakat. Perkembangan cakupan hunian sehat dari tahun 2005 sampai dengan 2009 terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Cakupan rumah sehat pada tahun 2005 sebesar 69,50 persen, sedangkan pada tahun 2009 menjadi 91,05 persen.

Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Purbalingga memfasilitasi masyarakat dengan berbagai jaminan pembiayaan kesehatan. Ketersediaan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan pada tahun 2009 berupa jaminan Astek/Jamsostek sebesar 8.805 jiwa, Askes sebesar 47.413 jiwa, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) sebesar 253.273, Jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebesar 420.972 jiwa, dan ASABRI/POLRI sebesar 1.359 jiwa. Secara umum, ketersediaan jaminan kesehatan di Kabupaten Purbalingga terus meningkat.

Tabel II.2.3.3-3. Perkembangan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Purbalingga 2009

No	Jaminan kesehatan	Jumlah peserta (jiwa)
		2009
1.	JPKM	253.273
2.	Jamkesmas	420.972
3.	Jamkesda	123.248
4.	Askes PNS	47.413
5.	Jamsostek	8.805
6.	Asabri/Polri	1.359
Jumlah		855.070
6.	Belum dijamin	62.106

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Tenaga kesehatan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga guna mendukung pembangunan kesehatan pada tahun 2009 terdiri dari : dokter spesialis sebanyak 17 orang; dokter umum sebanyak 70 orang; dokter gigi sebanyak 21 orang; tenaga apoteker sebanyak 11 orang; tenaga perawat sebanyak 376 orang; bidan sebanyak 345 orang; ahli kesehatan masyarakat sebanyak 22 orang; ahli gizi sebanyak 34 orang; analisis laboratorium sebanyak 30 orang, ahli rontgen sebanyak 11 orang, dan bidan desa sebanyak 224 orang.

Tabel II.2.3.3-4. Perkembangan Tenaga Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No.	Tenaga kesehatan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Dokter spesialis	12	17	17	18	21
2.	Dokter umum	43	58	65	65	70

3.	Dokter gigi	20	19	18	18	21
4.	Apoteker	6	9	10	10	11
5.	Perawat	348	411	376	376	376
6.	Bidan	197	219	312	342	345
7.	Ahli Kesmas	10	20	18	18	22
8.	Ahli gizi	26	27	32	32	34
9.	Analisis laboratorium	23	25	27	27	30
10.	Ahli rontgen	5	7	9	9	11
11.	Ahli Kesehatan Lingkungan	57	53	53	53	54
12.	Dukun bayi	-	-	-	-	-
13.	Bidan desa	133	189	207	224	224
14.	Pendamping Bidan Desa		133	168	214	224

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Upaya untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan sekaligus mendorong semangat masyarakat dalam pembangunan kesehatan dan Program Keluarga Berencana juga terus dilakukan. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan antara lain juga dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat khususnya di Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), puskesmas pembantu (pustu), puskesmas, puskesmas rawat inap, dan Rumah Sakit Bersalin (RSB).

Untuk meningkatkan layanan kesehatan rujukan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terus dikembangkan, baik dari sisi kelengkapan fasilitas maupun tenaga medisnya.

Peranserta masyarakat dalam pembangunan kesehatan di Kabupaten Purbalingga pada saat ini cukup menggembirakan. Hal ini ditandai dengan terus meningkatnya jumlah lembaga keswadayaan masyarakat di bidang kesehatan. Pada tahun 2005 jumlah posyandu sebanyak 1.150 kelompok, sedangkan pada tahun 2009 sebanyak 1.179 kelompok sehingga mengalami peningkatan sebanyak 29 kelompok.

Tabel II.2.3.3-5. Perkembangan Prasarana/Lembaga Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2009

No.	Sarana kesehatan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1.	Puskesmas	22	22	22	22	22
2.	Puskesmas keliling	22	22	22	22	22
3.	Puskesmas pembantu	49	49	50	52	53
4.	Rumah Sakit	4	4	4	4	4

5.	Balai pengobatan	26	26	27	27	27
6.	Rumah sakit bersalin	1	1	2	2	2
7.	Apotik	24	35	40	40	41
8.	Poliklinik Kesehatan Desa	87	133	150	170	186
9.	Posyandu	1.150	1.158	1.179	1.179	1.179

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

Dari jumlah Posyandu yang ada, sebagian besar telah melakukan aktivitas secara rutin dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009, rasio balita per posyandu sebesar 39 sementara pada tahun 2005 sebesar 38. Kegiatan Posyandu dalam bidang kesehatan antara lain: penimbangan balita, imunisasi, pelayanan Keluarga Berencana, penyuluhan kesehatan, serta pencatatan dan pelaporan hasil kegiatan

Tabel II.2.3.3-6. Jumlah Posyandu, Jumlah Balita yang ada, Rasio Balita per Posyandu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No.	Tahun	Jumlah posyandu	Jumlah balita	Rasio balita per posyandu
1	2005	1.150	44.010	38
2	2006	1.158	43.265	37
3	2007	1.179	44.495	38
4	2008	1.179	46.404	39
5	2009	1.179	46.404	39

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga

#### II.2.3.4. Kepemudaan dan Olahraga

Kecenderungan meningkatnya angka kenakalan remaja dan meningkatnya kecenderungan perilaku negatif yang dilakukan oleh anak-anak muda, seperti konsumsi minuman keras dan narkoba, pencurian, perampokan, dan tindak kekerasan lainnya, menunjukkan adanya sesuatu yang luput dari perhatian dalam proses pembangunan selama ini. Gejala lain yang semakin kasat mata dalam kehidupan generasi muda adalah lunturnya semangat kebangsaan dan cinta tanah air, serta lunturnya apresiasi terhadap budaya bangsa dan nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Jumlah kasus penyalahgunaan napza pada tahun 2009 sebanyak 197 kasus, sedangkan kasus kenakalan remaja sebanyak 223 kasus.



Kondisi keolahragaan di Kabupaten Purbalingga baik olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat, masih memerlukan perhatian berkelanjutan. Jumlah organisasi olahraga dan kepemudaan di Kabupaten Purbalingga tidak mengalami perubahan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, yakni sebanyak 38 organisasi pemuda dan 20 organisasi olahraga. Dari sisi ketersediaan prasarana, sampai tahun 2009 Kabupaten Purbalingga belum memiliki gelanggang olahraga berstandar nasional. Ketersediaan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 antara lain satu buah stadion olahraga, 240 lapangan sepak bola, 31 unit lapangan tenis terbuka, dua unit lapangan tenis tertutup, 152 lapangan bulu tangkis, dan tiga unit kolam renang.

#### II.2.3.5. Kesejahteraan Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Purbalingga masih cukup besar. Pada tahun 2009 jumlah PMKS di Kabupaten Purbalingga sebanyak 26.947 orang dan baru ditangani sebanyak 6.628 orang.

Tabel II.2.3.5-1. Rekap Data Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2009

No.	Jenis PMKS	L	P	Jumlah	Sudah Dilayani
1	Anak balita terlantar (ABT)	788	734	1,522	242
2	Anak terlantar (AT)	2179	1629	3,808	442
3	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan (AKTK)	20	57	77	30
4.a	Anak nakal (AN)	143	2	145	260
4.b	Anak yang mengalami masalah hukum	72	6	78	
5	Anak jalanan (AJ)	140	17	157	147
6	Anak cacat (AC)	1,474	1,213	2,687	161
a.	Cacat tubuh (CT)	492	379	871	6
b.	Cacat rungu wicara (CRW)	242	186	428	
c.	Cacat netra (CN)	175	205	380	
d.	Cacat mental retardasi (CMR)	281	209	490	
e.	Cacat mental eks psikotik	101	96	197	
f.	Cacat ganda (CG)	117	82	199	
g.	Cacat bibir sumbing (CBS)	66	56	122	

Tabel II.2.3.5-2. Rekap Data Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2009

No.	Jenis PMKS	KK	JIWA		Sudah terlayani
1	Keluarga fakir miskin (KFM)	48656	63767	73331	3,175
2	Keluarga berumah tak layak huni	7631	11779	12353	319
3	Keluarga bermasalah sosial psikologis	110	148	177	3
4	Keluarga rentan	381	585	683	1
5	Komunitas adat terpencil (KAT)	143	382	406	
6	Korban bencana alam (KBA)	469	1052	1150	469
7	Korban bencana sosial (KBS)	45	94	105	45

Tabel II.2.3.5-3. Rekap Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2009

No.	Jenis PMKS	L	P	Jumlah	Sudah Terlayani
1	Wanita rawan sosial ekonomi (WRSE)		5210	5,210	264
2	Wanita yg menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah (WKTK)		44	44	
3	Lanjut usia terlantar (LUT)	1764	4068	5,832	232
4	Lanjut Usia yang Menjadi Korban Tindak kekerasan (LUTK)	1	-	1	
5	Penyandang cacat (Paca)	3,047	2,452	5,499	544
a.	Cacat tubuh (CT)	1054	588	1,642	54
b.	Cacat rungu wicara (CRW)	551	445	996	4
c.	Cacat netra (CN)	570	661	1,231	3
d.	Cacat mental retardasi (CMR)	417	366	783	
e.	Cacat mental eks psikotik	344	304	648	4
f.	Cacat ganda (CG)	111	88	199	
6 a	Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (PACABK)	320	335	655	50
b.	Penyandang cacat bekas penderita penyakit kronis (eks-kusta)	52	39	91	
7	Penyandang HIV / AIDS	0	1	1	
8	Tuna susila (TS)		91	91	
9	Pengemis	61	61	122	30
10	Gelandangan	9	0	9	21
11	Bekas narapidana (bekas napi)	678	19	697	142
12	Pekerja migran bermasalah (PMB)	13	11	24	
19	Korban penyalahgunaan napza	196	1	197	51

### **II.2.3.6. Budaya dan Kehidupan Beragama**

Pada saat ini telah terjadi pelunturan nilai-nilai luhur yang selama ini menjadi penuntun norma dan etika sosial di berbagai bidang kehidupan. Orientasi pembangunan pada masa lalu yang lebih difokuskan pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan pembangunan bidang sosial budaya, telah mengakibatkan berbagai dampak negatif, khususnya bagi pembangunan karakter bangsa. Berkembangnya budaya materialisme, konsumerisme, dan hedonisme; berkembangnya mentalitas menerabas dan kurangnya penghargaan terhadap kerja keras, karya, dan inovasi; serta meningkatnya tindak kekerasan, premanisme, dan kriminalitas, merupakan akibat kebijakan pembangunan yang mengabaikan pembangunan budaya. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kekeluargaan, dan keramah-tamahan semakin pudar bersamaan dengan menguatnya nilai-nilai individualisme dan materialisme. Demikian pula kebanggaan terhadap jatidiri bangsa semakin terkikis oleh nilai-nilai budaya asing yang dianggap lebih superior. Identitas nasional meluntur oleh cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, sementara nilai positif yang lebih relevan bagi upaya pembangunan bangsa dan karakter bangsa (*nation and character building*) justru diabaikan. Pembangunan bidang kebudayaan melalui pengembangan seni budaya sebagai media internalisasi nilai-nilai luhur guna mewujudkan harmoni sosial dan membangun karakter bangsa masih belum optimal.

Dalam kehidupan beragama, nilai-nilai agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Kehidupan beragama baru pada tataran ritual belum dalam bentuk pengamalan. Hal ini tercermin pada masih banyaknya perilaku asusila, penyalahgunaan narkoba, perjudian, serta praktik-praktik lain yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Selain itu, meningkatnya angka perceraian, ketidakharmonisan keluarga, pornografi dan pornoaksi, menunjukkan semakin lemahnya sendi-sendi moral masyarakat. Berbagai perilaku masyarakat yang menyimpang ini menggambarkan adanya kesenjangan

antara pemahaman ajaran agama dengan pengamalannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di kalangan peserta didik juga belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Hal ini dikarenakan belum optimalnya pelaksanaan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan mutu tenaga pendidik, kurang tertatanya kurikulum, terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya fasilitas pendukung lainnya. Sementara itu, lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai penjaga moralitas dalam masyarakat yang dinamis.

Peningkatan prasarana ibadah di Kabupaten Purbalingga cukup signifikan, yakni dari 4.821 buah pada tahun 2005 menjadi 5.110 buah pada tahun 2009, atau meningkat sebanyak 289 buah. Adapun lembaga pendidikan agama yang ada di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 berupa 69 pondok pesantren dan satu lembaga pendidikan Al Kitab.

Tabel II.2.3.6-1. Perkembangan Sarana Ibadah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Sarana Ibadah	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Masjid	848	848	857	1.119	1.121
2.	Langgar/mushola	3.952	3.952	3.957	3.958	3.960
3.	Gereja Kristen	16	16	16	18	18
4.	Gereja Katolik	4	4	5	10	10
5.	Pura/kuil/sangah	-	-	-	-	-
6.	Vihara/cetya/klenteng	1	1	1	1	1
Jumlah		4.821	4.821	4.836	5.106	5.110

Sumber : Sistem Informasi Profile Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010

### II.2.3.7. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Ketidaksetaraan posisi perempuan dan laki-laki dipengaruhi oleh berbagai norma yang berlaku dalam masyarakat yang bersumber pada kultur patriarki. Konstruksi sosial budaya ini mengatur status dan peranan,

atribut, stereotip, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Perbedaan gender ini tidak jarang merugikan laki-laki dan (terutama) perempuan. Peminggiran (*marginalisasi*) dan penidakberdayaan (*subordinasi*) terhadap perempuan membuat daya saing perempuan dalam berbagai aspek kehidupan relatif tertinggal dibanding laki-laki. Konstruksi gender yang tidak adil ini membawa implikasi yang sangat luas. Misalnya, rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi membuat posisi tawar perempuan terhadap laki-laki menjadi rendah. Relasi kuasa yang tidak seimbang ini tidak jarang melahirkan kekerasan terhadap perempuan. Rendahnya posisi tawar juga menyebabkan peran mereka dalam pengambilan keputusan keluarga rendah, bahkan untuk hal-hal yang menyangkut diri perempuan sendiri (seperti dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB dan pemilihan alat kontrasepsi). Konstruksi gender yang memosisikan laki-laki sebagai pencari nafkah tidak jarang menyebabkan pendidikan laki-laki lebih diutamakan dibanding perempuan. Akibatnya kualitas sumber daya perempuan menjadi relatif rendah.

Perempuan tidak jarang dihadapkan pada kondisi dilematis. Di satu sisi, perempuan dituntut untuk berperan di sektor publik, namun di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan tidak melupakan "kodrat"nya sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab sepenuhnya di sektor domestik. Tuntutan demikian membuat perempuan memikul beban ganda (*double burden*).

Kemiskinan perempuan secara langsung terkait pada status ekonomi yang rendah akibat rendahnya kualitas sumber daya (tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah) dan akses ekonomi (akses terhadap kredit, pemilikan lahan, dan sistem pewarisan), serta minimnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Kombinasi ketiadaan akses pada unsur ekonomi, sosial, dan kekuasaan yang dihadapi perempuan menyebabkan "*feminization of poverty*". Kondisi ini dapat mendorong perempuan ke dalam situasi rawan diperdagangkan (*trafficking*) dan dieksploitasi secara seksual.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga tidak akan optimal dalam mengurangi kemiskinan jika tidak menghilangkan diskriminasi gender. Membiarkan kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan perempuan sama artinya dengan mempersiapkan generasi yang bodoh dan miskin. Tanpa kesetaraan gender, kemiskinan dan keterbelakangan tidak mungkin dapat diatasi sepenuhnya.

Cara strategis untuk menanggulangi kemiskinan adalah menciptakan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) serta kebijakan yang sensitif gender. Perempuan harus diperlakukan secara terhormat dan dihargai setara dengan laki-laki. Semakin lama seorang ibu mengenyam pendidikan, maka semakin menurun angka kematian ibu dan bayi karena perempuan yang berpendidikan, lebih tahu mengenai kesehatan, perencanaan kehamilan, dan keluarga berencana. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu, rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Meningkatkan pendidikan dan peranan perempuan adalah salah satu kunci memutus rantai kemiskinan.

Upaya pemberdayaan perempuan tidak bisa dari satu sektor saja. Perubahan harus dilakukan dalam berbagai sektor, mulai dari pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan perempuan, hingga iklim dan tatanan sosial yang ramah terhadap perempuan. Hal penting lainnya adalah perubahan sistem yang selama ini timpang dan telah meminggirkan perempuan dari haknya sebagai manusia merdeka. Sistem yang tidak adil harus diubah menjadi sistem yang berperspektif keadilan agar mampu mendorong terciptanya sistem hukum, terwujudnya tata nilai serta moralitas yang adil gender.

Pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk menekan angka kemiskinan. Melalui pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kapasitas dan rasa percaya diri (*self confidence*), sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunan, termasuk untuk menekan angka kemiskinan.

Pemberdayaan perempuan yang dicanangkan dalam Tujuan Pembangunan Millenium atau *Millenium Development Goals (MDGs)* untuk mengurangi kemiskinan perempuan memiliki tiga dimensi. Pertama, *human capability*, yakni kemampuan manusia dalam hal pendidikan, kesehatan dan gizi, dengan menghilangkan kesenjangan pendidikan bagi perempuan dan laki-laki hingga sekolah menengah. Kedua, *aces to resources and opportunity*, akses terhadap sumber daya dan kesempatan yang mengacu pada aset ekonomi dan partisipasi politik. Ketiga, *security*, terutama kerentanan perempuan terhadap kekerasan.

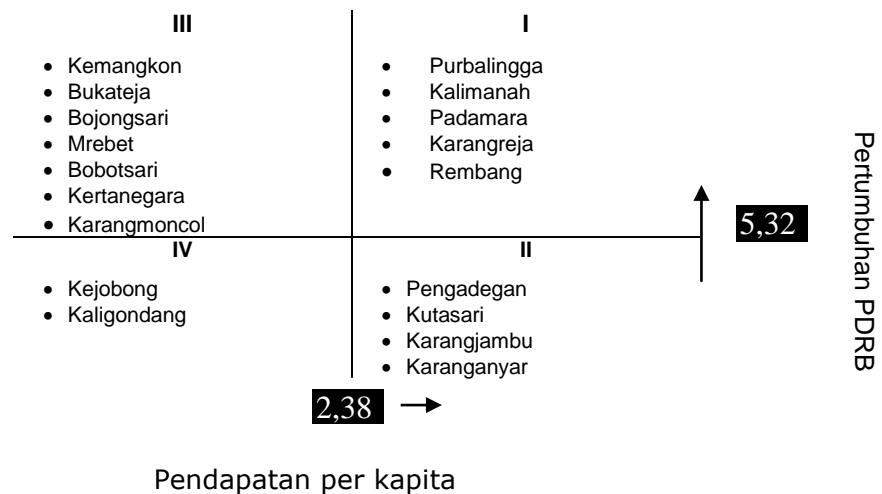
Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Measure*) diukur dari partisipasi perempuan di parlemen, persentase perempuan pekerja profesional, teknisi, kepemimpinan ketatalaksanaan, dan persentase perempuan pada angkatan kerja. Di Kabupaten Purbalingga partisipasi perempuan di parlemen tahun 2009 sebanyak 10 orang dari 45 orang atau sebesar 22,22 persen. Berdasarkan status pekerjaannya, persentase perempuan yang bekerja sebagai buruh/karyawan di Kabupaten Purbalingga lebih tinggi dibanding buruh/karyawan laki-laki, di mana persentase buruh perempuan sebesar 30,01%, sedang persentase buruh laki-laki sebesar 26,19%. Di samping itu persentase jumlah perempuan yang bekerja namun tidak dibayar angkanya jauh lebih tinggi dibanding pekerja laki-laki yang tidak dibayar, yaitu sebesar 25,93 persen untuk perempuan dan 5,80 persen untuk laki-laki. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender (PUG) masih perlu terus didorong. Program pembangunan yang sensitif gender perlu ditingkatkan agar perempuan dapat terlibat aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pemanfaatan hasil pembangunan.

#### **II.2.4. Perekonomian Daerah**

Kondisi perekonomian wilayah Kabupaten Purbalingga yang terdiri dari 18 kecamatan bila dibagi dalam Kuadran Tipologi Klasen terbagi menjadi empat kuadran, yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh,

daerah berkembang cepat, daerah maju tetapi tertekan, dan daerah relatif tertinggal.

Gambar 2. Dimensi Tipologi Klasen 18 Kecamatan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2009



Berdasarkan tipologi tersebut, terdapat kesenjangan perolehan PDRB kecamatan dan pendapatan per kapita antarkecamatan. Tipologi I adalah kecamatan yang sangat pesat pertumbuhannya dan pendapatannya tinggi, meliputi Kecamatan Purbalingga, Kalimanah, Padamara, Karangreja, dan Rembang. Ini menunjukkan kelima kecamatan tersebut merupakan pusat pertumbuhan, dan sebagian aktivitas perekonomian ada di lima kecamatan tersebut.

Tipologi II meliputi Kecamatan Pengadegan, Kutasari, Karangjambu, dan Karanganyar. Kecamatan tersebut memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi rendah. Hal ini diduga berkaitan dengan investasi regional dan lokal yang berkembang di Kabupaten Purbalingga sebagian besar berada di kecamatan tersebut. Demikian juga kecenderungan arah perkembangan kotanya.

Tipologi III yang meliputi Kecamatan Kemangkon, Bukateja, Bojongsari, Mrebet, Bobotsari, Kertanegara, dan Karangmoncol, merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan ekonomi tinggi tetapi pendapatan per kapita lebih rendah dari Kabupaten Purbalingga. Ini



mengindikasikan terjadinya kejenuhan pengembangan di daerah tersebut. Sementara kecamatan yang tertinggal, baik dilihat dari laju pertumbuhan PDRB maupun pendapatan per kapitanya, adalah kecamatan di tipologi IV meliputi Kecamatan Kejobong dan Kaligondang.

Perkembangan sektor-sektor ekonomi dengan menggunakan analisis Indeks Dominasi Sektor dan Indeks Potensi Pengembangan Sektor diperoleh sektor yang tidak dominan sampai dengan dominan dan sektor yang memiliki potensi perkembangan rendah sampai tinggi terlihat pada tabel 2.2.

Tabel II.2.4-1. Matriks Indeks Dominasi Sektor (IDS) dan Indeks Potensi Pengembangan Sektor (IPPS)

Kriteria	IPPSi < 1	IPPSi > 1
IDSi < 1	(1)	(2) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertambangan dan penggalian</li> <li>• Industri pengolahan</li> <li>• Bangunan</li> <li>• Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan</li> <li>• Pengangkutan, dan komunikasi</li> <li>• Listrik, gas, dan air bersih</li> </ul>
IDSi > 1	(3) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian</li> <li>• Perdagangan, hotel dan restoran</li> </ul>	(4) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa-jasa</li> </ul>

Sumber: Analisis, 2009

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada satu pun sektor pembentuk PDRB yang termasuk dalam sektor (1), yakni sektor yang tidak dominan yang belum berpotensi berkembang. Sektor (2) merupakan sektor yang tidak dominan yang berpotensi berkembang, meliputi sektor pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, bangunan, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, pengangkutan dan komunikasi, serta listrik, gas dan air bersih. Sektor ini di kemudian hari dapat dijadikan andalan daerah. Sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran masuk dalam sektor (3), yaitu sektor dominan yang belum berpotensi berkembang. Sementara sektor jasa-jasa masuk ke dalam sektor (4), yaitu sektor dominan yang berpotensi berkembang dan dapat dijadikan andalan daerah.

Sektor Pertanian merupakan pemberi kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga di mana sub sektor tanaman bahan makanan merupakan penyumbang terbesar di antara sub sektor lainnya. Produksi padi di Kabupaten Purbalingga, terutama padi sawah, secara umum selalu mengalami kenaikan. Padi sawah merupakan komoditas unggulan tanaman pangan di Kabupaten Purbalingga. Produksi tanaman padi sawah mengalami kenaikan berturut-turut mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, sehingga dalam lima tahun ke depan produksi padi sawah diharapkan akan terus mengalami peningkatan. Hal ini sangat berbeda dengan produksi padi ladang yang senantiasa berfluktuasi. Produksi padi ladang di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2005 sekitar 2.163 ton, turun 36,86 persen dari tahun sebelumnya, dan mengalami kenaikan berturut-turut mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, seperti terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.2.4-2. Produksi Padi Sawah dan Padi Ladang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2009

Produksi Padi	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Padi Sawah</b>					
Produksi (ton)	207.916	206.262	219.610	216.216	196.536
Rata-rata produksi (kw/ha)	63,31	62,54	62,79	63,92	56,65
<b>Padi Ladang</b>					
Produksi (ton)	2.162	2.075	2.920	2.879	3.129
Rata-rata produksi (kw/ha)	45,52	46,11	47,33	48,55	42,17

Sumber: PDA Kabupaten Purbalingga Tahun 2010

Perkembangan produksi palawija selama tahun 2005 – 2009 di Kabupaten Purbalingga secara umum cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2007 produksi palawija mengalami penurunan tajam hingga mencapai angka 290.322 ton. Sedang pada tahun sebelumnya produksi palawija telah mencapai angka 299.639 ton. Akan tetapi kenaikan yang cukup tajam kembali terjadi di tahun 2008, yaitu mencapai 293.676 ton.

Kemudian pada tahun 2009 kembali mengalami penurunan menjadi 236.868 ton.

Tabel II.2.4-3. Perkembangan Produksi Palawija di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2009

No	Jenis Komoditas	Produksi (ton)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	4	5	6	7	8
II	Palawija :					
	- Jagung	36.526	37.708	43.714	43.994	47.638
	- Ketela pohon	256.486	253.207	240.152	242.777	182.901
	- Ketela rambat	3.699	4.700	4.085	4.399	4.003
	- Kacang tanah	3.064	3.211	1.911	2.016	1.885
	- Kedelai	771	659	388	406	393
	- Kacang hijau	150	154	72	84	48
	Jumlah	200.696	299.639	290.322	293.676	236.868

Sumber: PDA Kabupaten Purbalingga Tahun 2010

Produksi tanaman sayur-mayur di Kabupaten Purbalingga cenderung fluktuatif. Produksi jenis sayur-mayur terbesar adalah kentang, dan yang paling rendah adalah labu siam. Produksi tanaman sayur-mayur pada tahun 2009 untuk kentang sebesar 6.122 ton dengan rata-rata produksi 183,84 kw/ha. Sedangkan produksi labu siam sebesar 51 ton dengan rata-rata produksi 85,00 kw/ha.

Tabel II.2.4-4. Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayur-mayur di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Jenis Sayur-Sayuran	Tahun									
		2005		2006		2007		2008		2009	
		Hasil Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Hasil Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Hasil Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Hasil Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Hasil Produksi (Ton)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)
1	Bawang daun	1.303	73,2	1.292	75,12	910	78,45	986	80,16	1.116	83,92
2	Cabe besar	1.498	60,4	1.569	61,77	1.243	58,36	1.488	59,06	1.558	59,92
3	Cabe rawit	221	19,91	229	19,91	239	19,92	252	20,17	349	25,84
4	Ketimun	442	119,46	568	135,24	1.041	130,13	1.088	134,30	706	135,81
5	Tomat	1.105	143,51	1.126	148,16	1.207	149,01	1.319	157,07	1.438	163,39
6	Buncis	413	60,74	411	61,34	307	80,79	369	85,87	318	83,63
7	Labu siam	-	0	35	70	77	85,56	67	83,20	51	85,00
8	Bayam	73	25,17	105	29,17	135	28,72	209	33,11	238	33,48
9	Kangkung	616	116,23	827	118,14	788	112,57	893	115,95	976	119,00
10	Terong	715	89,38	784	92,24	1.060	121,84	1.121	123,17	843	123,91
11	Kobis	7.932	229,25	8.550	232,34	6.255	239,66	6.058	240,38	5.524	247,70
12	Kacang-kacangan	1.801	37,29	1.767	36,66	2.404	54,51	2.762	62,07	3.084	67,78

13	Kentang	8.031	175,73	7.703	173,88	6.182	174,63	6.344	182,29	6.122	183,84
14	Pitsay	862	90,74	1.113	96,78	1.216	90,07	1.027	81,47	980	81,00
15	Wortel	3.685	188,97	3.890	195,48	3.673	190,31	3.261	182,18	3.596	197,60
16	Pete	6.584	4,22	1.000	0,43	1.206	3,96	1.404	40,83	2.734	42,08
17	Mlinjo	4.428	3,48	332	0,26	537	2,35	809	29,46	3.146	29,77

Sumber: Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2005- 2010

Sementara itu produksi buah-buahan di Kabupaten Purbalingga tidak terlalu tinggi. Produksi buah tertinggi adalah jeruk siam, sedangkan yang paling rendah produksinya adalah buah sirsak. Produksi buah jeruk siam pada tahun 2008 sebesar 145.066 ton dengan rata-rata produksi 52,42 kw/ha. Sedangkan produksi buah sirsak sebesar 494 ton dengan rata-rata produksi 40,13 kw/ha.

Tabel II.2.4-5. Luas Panen dan Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Jenis Buah-Buahan	Tahun									
		2005		2006		2007		2008		2009	
		Produksi (Kw)	Rata-rata Produksi (Kg/Ph)	Produksi (Kw)	Rata-rata Produksi (Kg/Ph)	Produksi (Kw)	Rata-rata Produksi (Kg/Ph)	Produksi (Kw)	Rata-rata Produksi (Kg/Ph)	Produksi (Kw)	Rata-rata Produksi (Kg/Ph)
1	Alpokate	793	46,4	964	51,55	702	58,50	889	58,78	150	59,88
2	Mangga	15.356	52,69	17.470	62,02	14.313	51,93	13.239	50,61	1.575	53,18
3	Rambutan	57.637	66,42	66.251	75,91	42.366	76,16	58.730	84,55	9.980	87,77
4	Duku / langsung	53.550	100,83	56.642	112,34	31.167	110,83	40.132	115,57	3.929	114,84
5	Jeruk siam	102.790	55,54	112.654	57,16	160.413	54,16	145.066	52,42	13.962	58,40
6	Durian	49.437	186,38	48.835	185,43	91.562	167,43	87.521	165,76	9.129	166,92
7	Jambu biji	11.074	28,14	12.178	30,81	9.625	35,29	8.977	33,59	935	37,08
8	Jambu air	2.866	39,75	1.457	52,17	570	66,20	3.018	53,89	314	56,64
9	Sawo	1.371	52,15	15.247	44,79	6.347	51,86	702	67,26	77	68,86
10	Pepaya	15.305	43,84	109.686	20,04	135.351	21,13	7.008	51,95	780	57,75
11	Pisang	93.290	18,13	39.967	14,23	40.435	13,62	172.086	22,29	17.668	25,43
12	Salak	41.964	15,54	1.840	50,15	862	49,34	41.128	14,34	3.765	14,66
13	Belimbing	1.622	49,41	7.081	54,98	7.618	56,26	1.173	59,14	134	59,31
14	Sukun	6.535	51,23	8.857	2,57	4.158	2,28	7.618	59,92	684	53,96
15	Nanas	9.938	2,8	2.208	51,53	2.626	58,51	5.116	2,38	470	2,21
16	Manggis	1.919	45,02	10.021	66,55	16.161	91,48	3.191	64,10	677	65,45
17	Nangka	9.128	61,67	463	30,99	379	39,64	21.059	102,06	2.500	109,90
18	Sirsak	515	28,02	3.732	47,51	3.224	57,25	494	40,13	62	42,82

Sumber Data: Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2005- 2010

Produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Purbalingga yang tertinggi adalah kelapa, dan yang paling rendah adalah kapuk randu. Produksi kelapa di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 sebesar 12.801 ton dengan luas panen 12,149 ha. Sedangkan produksi kapuk randu sebesar 1 ton dengan luas panen 7 ha.

Tabel II.2.4-6. Luas Panen dan Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Jenis Tanaman	Tahun										Produksi
		2005		2006		2007		2008		2009		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	
1	Kelapa	12.032	13.366	12.149	12.549	12.149	12.575	12.149	12.575	12.149	12.801	Kopra
2	Kelapa deres	5.168	52.879	5.219	53.490	5.249	53.860	5.249	53.860	5.249	54.942	Gula Cetak
3	Kopi robusta	14.644	824	1.320	619	1.268	611	1.268	611	1.268	18	Ose
4	Kopi arabika	-	-	-	-	54	18	54	18	84	623	Ose
5	Cengkeh	221	26	557	39	557	39	557	39	557	72	Bunga Kering
6	Panili	-	-	4	1	4	1	4	1	4	1	Biji Kering
7	Teh rakyat	164	101	169	106	169	112	169	112	169	114	Daun Basah
8	Lada	212	307	455	594	455	597	455	597	455	608	Biji Kering
9	Tebu	56	215	178	927	245	1.677	245	1.677	622	3.904	Gula
10	Kapuk randu	4	1	4	1	4	1	4	1	7	1	Serat
11	Melati Gambir	425	3.269	489	3.719	489	3.737	489	3.737	489	3.913	Bunga Basah
12	Nilam	607	5.039	785	5.481	766	5.345	766	5.345	797	5.561	Daun Kering
13	Casiavera	60	377	111	435	130	513	130	513	130	1.530	Kulit
14	Pinang	78	142	88	149	88	151	88	151	88	152	Biji Kering
15	Gelagah Arjuna	628	908	890	1.262	909	1.335	909	1.335	909	1.520	Bunga
16	Melinjo	146	419	90	422	90	428	90	428	90	436	Buah Basah
17	Pandan	58	310	57	311	57	322	57	322	57	328	Daun Basah
18	Sereh	70	670	70	672	70	675	70	675	70	689	Daun Basah
19	Kapulaga	-	-	-	-	45	13	45	13	45	14	Biji Kering
20	Karet	-	-	16	525	18	10	18	10	18	10	Getah
21	Kakao	-	-	-	246	10	2	10	2	10	3	Biji Kering
22	Empon-empon	37	382	42	400	-	-	-	-	-	-	Rimpang bsh

Sumber: Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2005- 2010

Populasi ternak (sapi perah, sapi potong, kuda, kerbau, domba, kambing, babi, ayam, dan itik) di Kabupaten Purbalingga terbanyak adalah ayam ras dan yang paling rendah populasinya adalah kuda. Populasi ternak ayam ras pada tahun 2009 sebesar 3.462.700 ekor. Sedangkan populasi sapi perah sebesar 112 ekor.

Tabel II.2.4-7. Populasi Ternak di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 - 2009

No	Jenis Ternak	2009				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Sapi perah	95	97	101	129	158
2	Sapi potong	17.435	18.147	18.982	20.498	21.536
3	Kuda	149	151	155	106	112

No	Jenis Ternak	2009				
		2005	2006	2007	2008	2009
4	Kerbau	4.978	5.078	5.269	5.417	5.581
5	Domba	29.042	31.318	35.175	37.333	40.719
6	Kambing	160.086	181.055	199.534	227.143	252.725
7	Babi	5.981	6.759	7.246	13.681	16.029
8	Ayam ras	2.480.950	2.557.674	2.700.980	2.873.600	3.462.700
9	Ayam buras	1.096.458	1.119.085	1.120.172	1.128.787	1.344.403
10	Itik	106.850	111.545	111.538	112.850	132.069

Sumber : Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2010

Meningkatnya jumlah penduduk dan tingkat pendapatan perkapita menyebabkan peningkatan permintaan terhadap produk daging, telur, susu, dan ikan. Peningkatan permintaan terhadap produk peternakan dan perikanan tersebut harus diimbangi dengan pertumbuhan populasi serta peningkatan produktivitas ternak dan ikan.

Produksi daging di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 telah mencapai 4.871.168 kg, yang sebagian besar disumbang dari produksi ayam ras pedaging. Sedangkan produksi telur di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2009 telah mencapai 11.897.777 kg, dan produksi susu mencapai 24.638 liter.

Tabel II.2.4-8. Produksi Daging, Telur dan Susu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2009

No	Produksi	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	4	5	6	7	8
1.	Daging ( kg )	3.962.521	4.249.142	4.197.589	4.292.985	4.871.168
2.	Telur ( kg )	5.812.046	8.078.685	8.185.998	9.235.231	11.897.777
3.	Susu ( liter )	31.306	26.456	24.638	34.638	24.638

Sumber : Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2010

Pembangunan perikanan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, dan kemandirian petani ikan dalam rangka pencapaian kecukupan pangan dengan mengembangkan usaha yang berwawasan agribisnis.

Produksi ikan (kolam, sawah, dan sungai) di Kabupaten Purbalingga yang tertinggi adalah ikan kolam, dan yang paling rendah produksinya adalah ikan sawah. Produksi ikan kolam pada tahun 2009

sebesar 8.134.950 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 107.879.141  
Sedangkan produksi ikan sawah sebesar 64.320 kg dengan nilai produksi sebesar Rp 1.625.620.

Tabel II.2.4-9. Produksi dan Nilai Produksi Ikan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Jenis	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Kolam					
	Produksi (kg)	3.341.993	3.676.000	6.337.629	7.757.680	8.134.950
	Nilai (Rp.)	375.888.942	39.804.825	65.952.839	94.446.767	107.879.141
2	Sawah					
	Produksi (kg)	57.764	57.764	23.340	54.020	64.320
	Nilai (Rp.)	519.875	519.875	1.006.811	1.395.575	1.625.620
3	Sungai					
	Produksi (kg)	220.525	231.000	250.001	253.185	257.006
	Nilai (Rp.)	1.984.724	2.663.636	2.858.195	2.557.294	3.027.050
4	UPR					
	Produksi (kg)	94.500	96.422	171.741	158.780	204.884
	Nilai (Rp.)	4.725.000	7.886.159	2.081.583	2.900.860	3.706.159

Sumber : Kabupaten Purbalingga dalam Angka Tahun 2010

Sektor industri di Kabupaten Purbalingga merupakan sektor yang dinamis. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingginya pertumbuhan PDRB sektor industri melampaui pertumbuhan sektor-sektor lainnya sehingga kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Purbalingga juga terus mengalami peningkatan.

Perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 tercatat sebanyak 94 perusahaan dengan 27.225 orang tenaga kerja. Jumlah industri besar tercatat sebanyak 32 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja 24.116 orang, sedangkan jumlah industri sedang sebanyak 62 perusahaan dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 3.109 orang.

Tabel II.2.4-10. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Jenis Industri	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Industri Besar					
	Perusahaan	26	25	29	32	32

	Tenaga Kerja	13.031	12.635	21.311	23.918	24.116
2	Industri Sedang					
	Perusahaan	29	30	77	62	62
	Tenaga Kerja	1.344	1.415	3.501	3.065	3.109
Jumlah						
	Perusahaan	55	55	106	94	94
	Tenaga Kerja	14.375	14.050	24.812	26.983	27.225

Sumber: Kabupaten Purbalingga dalam Angka

Jumlah industri kecil berdasarkan sektor yang terbina di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2005-2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari sejumlah 21.563 unit pada tahun 2005 menjadi 35.868 unit pada tahun 2009.

Serapan tenaga kerja pada sektor industri kecil di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2005 - 2009 secara umum terus mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar 68.290 orang pada tahun 2005 menjadi 98.670 orang di tahun 2009

Tabel II.2.4-11. Jumlah Unit Usaha dan Jumlah Tenaga Kerja pada Industri Kecil di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2009

No	Sektor	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1.	Unit Usaha (Unit)	21.563	21.653	34.236	34.261	35.868
2.	Tenaga Kerja (Orang)	68.290	68.942	92.011	92.011	98.670
3.	Nilai Produksi (Rupiah)	374.182.000	374.182.000	734.666.026	734.666.026	743.124.413

Sumber: SIPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010

Berbagai kebijakan dan langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan iklim investasi yang kondusif telah membuahkan hasil berupa berkembangnya investasi di Kabupaten Purbalingga. Perkembangan investasi di Kabupaten Purbalingga ditunjukkan dengan terus bertambahnya jumlah perusahaan swasta asing yang berorientasi ekspor. Pada saat ini tercatat sebanyak 17 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berorientasi ekspor dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 20.772 orang. Dari perusahaan PMA yang ada di Kabupaten Purbalingga, terdapat 260 plasma yang menyerap tenaga kerja sebanyak 11.183 orang. Nilai realisasi investasi PMA setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Pada tahun



2005 total nilai investasi PMA sebesar Rp. 95.009.996.000,- dan pada tahun 2009 meningkat menjadi sebesar Rp. 176.727.900.000,-. Berkembangnya investasi PMA maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Purbalingga terbukti telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi peningkatan dan pemerataan pendapatan perkapita masyarakat serta pengurangan angka pengangguran yang pada akhirnya juga meningkatkan daya beli masyarakat.

Tabel II.2.4-12. Pertambahan Nilai Investasi dan Total Nilai Investasi PMA di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Tahun	Pertambahan Nilai Investasi	Total Nilai Investasi	Jumlah Perusahaan
1.	2005	17.812.996.000	95.009.996.000	13
2.	2006	11.317.270.052	106.327.266.052	13
3.	2007	38.498.975.508	144.826.241.560	13
4.	2008	24.853.500.000	169.679.741.560	17
5.	2009	7.048.158.440	176.727.900.000	17

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Purbalingga

Perkembangan nilai ekspor di Kabupaten Purbalingga selama tahun 2005 – 2009 selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2009 jumlah perusahaan eksportir yang ada di Kabupaten Purbalingga mencapai sebesar 25 unit dengan nilai ekspor sebesar Rp. 710,411,243,221.82. Kondisi ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2005, dimana perusahaan eksportir yang ada baru mencapai 15 unit dengan nilai ekspor mencapai sebesar Rp. 161,316,714,374.40. Berikut adalah data perkembangan ekspor di Kabupaten Purbalingga tahun 2005-2009 :

Tabel II.2.4-13 Perkembangan Ekspor Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 – 2009

No	Tahun	Jumlah Perusahaan ( Unit )	Nilai Ekspor ( Rp )
1	2	3	4
1.	2005	15	161,316,714,374.40
2.	2006	18	236,754,397,519.60
3.	2007	19	383,202,191,467.28
4.	2008	23	559,564,178,822.33
5.	2009	25	710,411,243,221.82

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2010

Dalam upaya meningkatkan aktivitas perdagangan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perdagangan yang berupa pasar tradisional, kios, toko dan sebagainya. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan aktivitas jual beli masyarakat, mengingat perekonomian Kabupaten Purbalingga sebagian besar didukung oleh perekonomian rakyat. Kecenderungan terus berkembangnya pasar modern di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih bertumpu pada sektor-sektor tradisional akan berdampak buruk terhadap perekonomian rakyat akibat membanjirnya berbagai produk industri yang akan mengancam produk-produk lokal sejenis. Di samping itu, berkembangnya pasar modern akan memarginalkan usaha perdagangan retail rakyat sehingga lambat laun akan merusak perekonomian rakyat secara keseluruhan.

Jumlah prasarana perdagangan di Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan selama tahun 2005 – 2009, kecuali untuk jumlah pasar tradisional yang tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 34 unit. Di sisi lain, jumlah pasar modern mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 2005 terdapat 3 unit pasar modern, selanjutnya pada tahun 2008 berkembang menjadi 30 unit, dan pada tahun 2009 meningkat sangat pesat menjadi 37 unit.

Tabel II.2.4-14. Pasar di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2009

Tahun	Jenis Pasar	
	Toko Modern	Pasar Tradisional
1	2	3
2005	3	34
2006	5	34
2007	5	34
2008	30	34
2009	37	34

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Tahun 2009

Sektor koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Purbalingga. Data yang ada menunjukkan bahwa perkembangan jumlah koperasi secara umum mengalami peningkatan yang signifikan, dari 417 unit pada tahun 2007 menjadi 539 unit pada tahun 2009. Adapun jumlah koperasi unit desa tidak mengalami perkembangan yakni sejumlah 16 koperasi unit desa.

Tabel II.2.4-15. Jumlah Koperasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2007-2009

No	Uraian	Satuan	TAHUN		
			2007	2008	2009
1	2	3	6	7	8
1.	Koperasi Berbadan Hukum	Unit	181	223	224
2.	Koperasi Tidak Berbadan Hukum	Unit	220	220	299
3.	Koperasi Unit Desa	unit	16	16	16
	Jumlah	Unit	417	459	539

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka

Kabupaten Purbalingga memiliki cukup banyak potensi wisata baik yang sudah dikembangkan maupun yang belum. Secara umum, sektor pariwisata di Kabupaten Purbalingga mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir.

Tabel II.2.4-16. Penyebaran Obyek Wisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2009

Wilayah Potensi	Jenis Obyek Wisata		
	Alam	Buatan	Sejarah
<b>Wilayah I</b>			
Kec. Purbalingga			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makam Arsantaka,</li> <li>• Makam Narasoma</li> </ul>
Kec. Kutasari	Sendang Semingkir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam renang Tirta Asri</li> <li>• Taman Reptil</li> <li>• Museum Uang</li> </ul>	
Kec. Bojongsari		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Desa Wisata Karangbanjar</li> <li>• Obyek Wisata Air Bojongsari (OWABONG)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makam Giri Cendana</li> <li>• Alang-alang Bundel</li> </ul>
Kec. Padamara		Taman Aquarium-Purbasari Pancuran Mas	
Kec. Kemangkon			Batu Lingga Yoni dan Palus

Wilayah Potensi	Jenis Obyek Wisata		
	Alam	Buatan	Sejarah
<b>Wilayah II</b>			
Kec. Bukateja			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batu Lingga,</li> <li>• Makam Adipati</li> <li>• Wirasaba</li> </ul>
Kec. Karangmoncol			Makam Machdum Cahyana,
Kec. Rembang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curug Panyatan,</li> <li>• Curug Aul,</li> <li>• Curug Karang</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Batu Balincung,</li> <li>• Archa Shiwa</li> <li>• Ardi Lawet</li> <li>• Monumen Jend. Sudirman</li> </ul>
Kec. Pengadegan			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mahadewa,</li> <li>• Arca Ganesa</li> </ul>
<b>Wilayah III</b>			
Kec. Bobotsari			Batu Balok, Kemongkrong
Kec. Mrebet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curug Nini dan Putut Curug Ilang, G.Lampang,</li> <li>• Curug Slintang dan</li> <li>• Silawang, Tuk Arus</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Juru Sekam,</li> <li>• Batu Arkeologi</li> </ul>
Kec. Karangreja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendakian G. Slamet, Gua Lawa,</li> <li>• Wana Wisata Serang</li> </ul>	Kebun Strobery	

*Sumber: Disbudparpora Kabupaten Purbalingga*

Upaya pengembangan obyek wisata di Kabupaten Purbalingga telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya angka kunjungan wisata dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Purbalingga sebanyak 387.310 orang, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2008 dengan angka kunjungan sebanyak 1.256.517 orang. Pada tahun 2009 angka kunjungan wisata di Kabupaten Purbalingga sedikit mengalami penurunan menjadi 1.090.113 orang. Hal ini dimungkinkan karena tumbuhnya beberapa obyek wisata sejenis di daerah lain. Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu dilakukan upaya terus menerus untuk mengembangkan obyek dan potensi wisata yang ada guna meningkatkan daya tarik pariwisata di Kabupaten Purbalingga terutama potensi wisata yang belum sepenuhnya dikembangkan seperti potensi agro wisata di Desa Serang, Goa Lawa, Monumen Tempat Lahir Jenderal Soedirman dan sebagainya.

Meskipun angka kunjungan wisata di Kabupaten Purbalingga terus mengalami peningkatan tetapi dilihat dari sisi lama tinggal wisatawan masih belum mengalami peningkatan yang berarti yaitu rata-rata hanya 1

(satu) hari. Hal ini di samping disebabkan terbatasnya obyek wisata juga karena kurang tersedianya sarana penunjang pariwisata khususnya sarana penginapan yang memadai.

Tabel II.2.4-17. Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Obyek Wisata	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Walik	73.635	49.973	55.856	53.218	53.780
2	Goa Lawa	51.503	46.549	54.145	62.752	37.640
3	Owabong	260.988	577.700	930.297	1.147.540	994.476
4	Monumen Jenderal Soedirman	1.184	1.597	1.338	2.007	4.217
<b>Jumlah</b>		<b>387.310</b>	<b>675.819</b>	<b>1.041.636</b>	<b>1.256.517</b>	<b>1.090.113</b>

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka 2010

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ketersediaan lapangan kerja di Kabupaten Purbalingga cenderung tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja yang ada, terutama lapangan kerja bagi penduduk laki-laki. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2005 mencapai 406.236 orang. Angka tersebut cenderung mengalami peningkatan dan sampai dengan tahun 2009 jumlahnya mencapai 455.325 orang. Salah satu faktor yang menyebabkan makin tingginya jumlah angkatan kerja ini adalah banyaknya lulusan sekolah, terutama SMP, SMA yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan lulusan perguruan tinggi yang tidak mendapatkan pekerjaan.

Jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Purbalingga (berdasarkan definisi angkatan kerja dikurangi kesempatan kerja yang tersedia) selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 secara umum cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2007 yang mengalami peningkatan.

Tabel II.2.4-18. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005- 2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
<b>Kabupaten Purbalingga</b>						
1.	Angkatan Kerja	421.062	385.800	423.566	410.516	423.566
2.	Pengangguran	19.202	17.187	32.008	29.058	27.785

	(berdasarkan definisi angkatan kerja dikurangi oleh kesempatan kerja yang tersedia)	(4,56%)	(4.45%)	(7,56%)	(7.08%)	(6,56%)
<b>Provinsi Jawa Tengah</b>						
1.	Angkatan Kerja	16.634.255	16.408.175	17.664.277	16.690.966	17.087.649
2.	Pengangguran (berdasarkan definisi angkatan kerja dikurangi oleh kesempatan kerja yang tersedia)	978.952 (5.89%)	1.197.244 (7.29%)	1.360.219 (7.70%)	1.227.308 (7.35%)	1.152.267 (7,33 %)

Sumber: BPS Kabupaten Purbalingga

Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Purbalingga berkaitan erat dengan jumlah penduduk yang termasuk usia kerja. Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 yang sudah bekerja adalah 420.125 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar bekerja pada sektor Pertanian, kehutanan, pekebunan dan perikanan sebanyak 157.577 orang, sedangkan proporsi paling kecil bekerja pada sektor Listrik, gas dan air sebanyak 1.079 orang. Adapun sektor industri pengolahan menyerap angkatan kerja terbesar kedua yakni sebanyak 56.920 orang.

Tabel II.2.4-19. Banyaknya Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005 – 2009

No	Lapangan Usaha	Tahun									
		2005		2006		2007		2008		2009	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Pertanian, Kehutanan, Pekebunan, Peternakan dan Perikanan	138.837	36,86	154.006	37,59	154.006	37,59	113.157	29,51	157.577	37,51
2	Pertambangan dan Penggalian	1.188	0,32	2.339	0,57	2.339	0,57	2.263	0,59	2.402	0,57
3	Industri Pengolahan	84.378	22,40	88.201	21,53	88.201	21,53	107.716	28,09	90.562	21,56
4	Listrik, Gas dan Air Minum	606	0,16	1.051	0,26	1.051	0,26	847	0,22	1.079	0,26
5	Bangunan	28.491	7,56	26.143	6,38	26.143	6,38	26.811	6,99	26.843	6,39
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	75.435	20,03	81.064	19,79	81.064	19,79	74.063	19,31	83.234	19,81
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	11.394	3,03	15.094	3,68	15.094	3,68	13.398	3,49	15.498	3,69

8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	3.600	0,96	2.526	0,62	2.526	0,62	2.631	0,69	2.594	0,62
9	Jasa Kemasyarakatan	32.697	8,68	39.276	9,59	39.276	9,59	42.604	11,11	40.336	9,60

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Purbalingga

Pada sub sektor kehutanan, produksi kayu bulat merupakan produksi hasil hutan yang paling dominan di Kabupaten Purbalingga. Produksi kayu bulat antara tahun 2005-2009 mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan jumlah produksi pada tahun terakhir mencapai sebesar 20.326,16 m<sup>3</sup>. Produksi hasil hutan lainnya adalah kayu gergajian sebanyak 14.228,31 m<sup>3</sup>, kayu olahan sebanyak 8.130,46 m<sup>3</sup> dan hasil hutan ikutan (gondorukem dan damar) sebanyak 110.285 m<sup>3</sup>.

Tabel II.2.4-20. Produksi Hutan non-HPH Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

Jenis produksi	Produksi (m3)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Kayu bulat	65.210	81.855	2.402,06	23.554,98	20.326,16
Kayu gergajian	43.473	45.656	4.453	164.488,48	14.228,31
Kayu olahan			324,82	9.421,99	8.130,46
Hasil hutan ikutan					
a) Gondorukem		673,33	423,85	0	108.275
b) Damar	14.839	21.148	12.031	0	2.010

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Purbalingga

Luas areal hutan hasil reboisasi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 telah mencapai 5.373 ha. Kondisi ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya seluas 400 ha.

Tabel II.2.4-21. Luas Rehabilitasi Hutan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

Jenis	Luas (Ha)				
	2005	2006	2007	2008	2009
Lahan Kritis	16.809,69	14.584,51	11.903,11	8.695,25	8.343,25
Lahan Reboisasi	95,20	81,70	883,30	400	5.373,35

Sumber: Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Purbalingga

Di sektor pertambangan, potensi terbesar yang dimiliki oleh Kabupaten Purbalingga adalah berupa bahan galian golongan C. Jenis bahan tambang yang dihasilkan Kabupaten Purbalingga antara lain batu belah, batu olahan, andesit, tanah urug, pasir dan tanah liat. Lokasi penambangan bahan galian golongan C sebagian besar dilakukan di Sungai Klawing dan Sungai Serayu berupa pasir dan sirtu. Adapun persebaran data penambangan pasir dan sirtu di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel II.2.4-22. Data Penambangan Bahan Galian Pasir dan Sirtu di Kabupaten Purbalingga Tahun 2009

No	Jenis bahan galian	Lokasi	Luas areal (m <sup>2</sup> )	Kapasitas produksi per bulan
1	Pasir	Sungai Klawing, Desa Toyareja Kec. Purbalingga	900	7560 ton
2	Pasir	Sungai Klawing, Desa Toyareja Kec. Purbalingga	600	5490 ton
3	Pasir	Sungai Klawing, Desa Bokol Kec. Kemangkon	300	3240 ton
4	Pasir	Sungai Klawing, Desa Karang Kemiri Kec. Kemangkon	100	3240 ton
5	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	500	3240 ton
6	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	500	4320 ton
7	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	400	3240 ton
8	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	500	2160 ton
9	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	500	3240 ton
10	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	100	1080 ton
11	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	500	2160 ton
12	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	500	3240 ton
13	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	200	2160 ton
14	Sirtu	Sungai Serayu, Desa Karanggedang Kec. Kemangkon	400	3240 ton
15	Sirtu	Sungai Serayu, Desa Karanggedang Kec. Kemangkon	250	2160 ton
16	Sirtu	Sungai Serayu, Desa Karanggedang Kec. Kemangkon	750	3240 ton
17	Sirtu	Sungai Serayu, Desa Karanggedang Kec. Kemangkon	750	3240 ton
18	Sirtu	Sungai Serayu, Desa Cipawon Kec. Bukateja	100	1080 ton
19	Sirtu	Sungai Serayu, Desa Karangcengis Kec. Bukateja	750	4320 ton
20	Sirtu	Sungai Klawing, Desa Muntang Kec. Bukateja	500	3240 ton
21	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	300	90 m <sup>3</sup>
22	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	1000	1440 m <sup>3</sup>
23	Pasir	Sungai Klawing, Desa Kedungbenda Kec. Kemangkon	6000	Tidak tersedia
24	Pasir	Sungai Klawing, Desa Senon Kec. Kemangkon	3750	75 m <sup>3</sup>
25	Pasir	Sungai Klawing, Desa Bokol Kec. Kemangkon	600	30 m <sup>3</sup>
26	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	1000	450 m <sup>3</sup>
27	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	500	450 m <sup>3</sup>
28	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	500	400 m <sup>3</sup>
29	Pasir	Sungai Klawing, Desa Senon Kec. Kemangkon	2700	120 m <sup>3</sup>
30	Pasir	Sungai Klawing, Desa Toyareja Kec. Purbalingga	900	700 m <sup>3</sup>
31	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	Tidak tersedia	Tidak tersedia



No	Jenis bahan galian	Lokasi	Luas areal (m <sup>2</sup> )	Kapasitas produksi per bulan
32	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	Tidak tersedia	Tidak tersedia
33	Pasir	Sungai Klawing. Desa Karanggedang Kec. Bukateja	Tidak tersedia	Tidak tersedia
34	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	Tidak tersedia	Tidak tersedia
35	Pasir	Sungai Klawing, Desa Jetis Kec. Kemangkon	Tidak tersedia	Tidak tersedia

Sumber : Inventarisasi Data Sektoral Pertambangan dan Energi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga Tahun 2009

Berikut adalah perkembangan produksi hasil tambang di Kabupaten Purbalingga tahun 2005–2009.

Tabel II.2.4-23. Perkembangan Produksi Hasil Tambang di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Jenis Tambang	Tahun(m <sup>3</sup> )				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pasir	364.146	429.588	447.703	259.722	NA
2	Batu	337.113	351.517	378.521	392.470	NA
3	Kerikil	65.455	69.503	72.107	80.089	NA
4	Tanah Liat	166.799	168.872	173.458	182.483	NA

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga

Minyak tanah dan gas merupakan sumber energi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat Kabupaten Purbalingga sehari-hari. Gas dan minyak tanah pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi yang berupa bahan bakar untuk memasak. Pasokan gas di Kabupaten Purbalingga didistribusikan oleh dua unit Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBE) yang masing – masing berkapasitas tangki timbun 50.000 metrik ton yaitu SPBE PT. Serayu Gas Abadi di Desa Kedungjati Kecamatan Bukateja dan SPBE PT. Indomarketing World di Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari. Sedangkan untuk minyak tanah didistribusikan oleh dua agen minyak tanah yaitu PT. Sri Wijaya Bumi Pertiwi dengan kapasitas distribusi 20 tanki (masing-masing 5000 liter) per bulan dan PT. Asri Jaya Raharja dengan kapasitas distribusi 10 tanki (masing-masing 5000 liter) per bulan.

Sedangkan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Purbalingga telah berdiri sebanyak 10 unit, sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2.4-24. Daftar SPBU di Kabupaten Purbalingga

No	Nomor SPBU	Alamat	Kapasitas Pelayanan ( liter/bulan )		
			Premium	Solar	Pertamax
1	44.533.01	Jl. Mayjend. Sungkono	300.000	150.000	-
2	44.533.02	Selaganggeng	450.000	200.000	-
3	44.533.03	Bajong	240.000	75.000	-
4	44.533.04	Kedungmenjangan	400.000	200.000	-
5	44.533.05	Brobot	300.000	150.000	-
6	44.533.06	Kalimanah wetan	350.000	100.000	40.000
7	44.533.07	Babakan	300.000	200.000	40.000
8	44.533.08	Karang Reja	200.000	100.000	-
9	44.533.09	Karangmoncol	200.000	100.000	-
10	44.533.10	Kaligondang	250.000	150.000	-

Secara umum seluruh desa di Kabupaten Purbalingga sudah mendapatkan pelayanan listrik dari PLN, namun demikian masih ada sebagian kecil masyarakat, khususnya pada rumah tangga miskin di perdesaan yang belum menikmati fasilitas listrik. Di samping itu masih terdapat beberapa dukuh yang belum terjangkau jaringan listrik PLN karena faktor jarak dan jumlah rumah tangga calon pelanggan yang kurang memadai, sehingga kurang efisien apabila dibangun jaringan.

Sampai dengan tahun 2009 masyarakat yang telah menikmati fasilitas listrik adalah sebanyak 223.987 rumah tangga atau 98 persen. Sementara itu masih terdapat sekitar 3.875 rumah tangga atau 2 persen yang belum bisa menikmati fasilitas listrik. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk terus berusaha agar seluruh masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat menikmati fasilitas listrik.

Sampai dengan saat ini, Kabupaten Purbalingga tidak memiliki pembangkit listrik on-grid berskala besar sehingga semua pasokan listrik berasal dari luar Purbalingga. Ditinjau dari sistem transmisinya, wilayah Kabupaten Purbalingga dilalui oleh Transmisi Tegangan Tinggi 150 KV tersebar dari gardu induk Bojonegoro Jawa Timur sampai dengan gardu induk Sunyaragi Jawa Barat dan Jalur selatan dari gardu induk Ngawi Jawa Timur sampai dengan gardu induk Banjar di Jawa Barat. Transmisi tegangan ini masuk ke Kabupaten Purbalingga melalui gardu induk Kemangkong dan kemudian didistribusikan ke seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga.

Sumber energi yang potensial untuk dikembangkan guna mencukupi kebutuhan energi di Kabupaten Purbalingga adalah pemanfaatan energi air dan energi surya melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) dan tenaga surya (PLTS). Namun demikian berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan, pemanfaatan potensi sumberdaya air yang ada di Kabupaten Purbalingga sebagai pembangkit listrik dan pengembangan PLTS secara ekonomis kurang efisien karena potensi sumberdaya air yang ada pada masing-masing lokasi kapasitasnya terbatas, sedangkan pengembangan PLTS membutuhkan biaya yang mahal.

#### **II.2.5. Prasarana Wilayah**

Penyediaan prasarana wilayah merupakan unsur penting dalam mempercepat perkembangan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kelancaran seluruh aktivitas sosial ekonomi masyarakat sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur wilayah dan fasilitas umum yang ada. Secara umum ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah dan fasilitas umum dapat dikatakan masih belum merata, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Selanjutnya, kondisi ketersediaan beberapa jenis prasarana wilayah di Kabupaten Purbalingga dapat digambarkan sebagaimana uraian berikut ini.

### II.2.5.1. Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi yang ada di Kabupaten Purbalingga terdiri dari jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Kabupaten Purbalingga tidak dilewati jalan nasional. Hal ini menyebabkan Kabupaten Purbalingga secara konstelasi wilayah kurang strategis. Ruas jalan provinsi yang ada di Kabupaten Purbalingga sebagian besar masih dalam kondisi kejenuhan normal ( $DS < 0,75$ ). Namun demikian, lebar jalan dan kualitas permukaan jalan pada umumnya masih kurang memadai.

Tabel II.2.5.1-1. Daftar Nama Jalan Provinsi di Kabupaten Purbalingga

No	Nama Jalan	Panjang (km)	Lebar (m)	Kelas jalan
1.	Sokaraja-Kalimanah	5	6	IIIA
2.	Kalimanah-Purbalingga	5,5	6	IIIA
3.	Purbalingga-Bobotsari	9,71	6	IIIA
4.	Klampok-Purbalingga	12	7,3	IIIA
5.	Bobotsari-Karangreja	11	5	IIIA

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga

Dari tabel di atas terlihat bahwa jalan provinsi yang ada di Kabupaten Purbalingga sebagian besar memiliki lebar 6 meter. Lebar jalan provinsi yang ada difungsikan dengan pola 2 lajur - 2 arah dengan lebar tiap lajur 3 m. Lebar lajur seperti ini hanya mampu menampung lalu lintas dengan kecepatan rata-rata sampai 60 km/jam. Kondisi ini jelas kurang ideal dan perlu dibenahi. Seharusnya jalan provinsi mempunyai lebar perkerasan minimal 7 m dengan lebar tiap lajurnya 3,5 m sehingga mampu menampung kecepatan rata-rata sampai 80 km/jam.

Jaringan jalan di Kabupaten Purbalingga secara konstelasi regional menghubungkan wilayah Kabupaten Purbalingga dengan kabupaten/kota di sekitarnya, yaitu Kota Purwokerto, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Pemasang. Kondisi jalan yang ada di Kabupaten Purbalingga pada umumnya cukup baik, meskipun masih ada beberapa ruas jalan yang kondisinya kurang baik.

Secara keseluruhan, panjang jalan kabupaten dan provinsi di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 adalah 753,414 km. Struktur jaringan jalan yang ada membentuk pola konsentrik, dengan pusat kota

sebagai pusatnya dan jalan provinsi sebagai aksisnya. Panjang jalan kabupaten pada tahun 2009 adalah 710,204 km atau 94,26 persen dari total panjang jalan. Berdasarkan jenis perkerasannya, jalan kabupaten yang telah diaspal pada tahun 2009 mencapai 95,29 persen, sedangkan jalan yang belum beraspal sebesar 4,71 persen.

Tabel II.2.5.1-2. Kondisi Jaringan Jalan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

Kondisi Jalan	Tahun (km)				
	2005	2006	2007	2008	2009
1. Jalan Aspal	287,693	379,215	398,957	658,181	676,722
2. Jalan Tanah	83,479	54,295	54,295	8,600	6,100
3. Jalan Kerikil	337,186	276,694	256,952	43,423	27,382
<b>Jumlah A + B</b>	<b>710,204</b>	<b>710,204</b>	<b>710,204</b>	<b>710,204</b>	<b>710,204</b>

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Purbalingga

Pertumbuhan kendaraan bermotor roda empat di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir mencapai 15,44 persen. Pada tahun 2009 jenis kendaraan bermotor roda empat yang memiliki jumlah terbanyak adalah jenis Pick Up yaitu sebanyak 2.544 unit. Sementara jenis kendaraan bermotor roda empat yang memiliki jumlah terkecil adalah berjenis truk gandeng yaitu sebanyak 4 unit.

Tabel II.2.5.1-3. Jumlah Kendaraan Angkutan Roda Empat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Jenis Kendaraan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Mobil bus	554	623	620	642	666
2	Mobil penumpang	119	96	75	42	35
3	Mobil barang	18	17	44	28	24
4	Truk	968	943	927	1.013	1.109
5	Pick Up	2.116	2.147	2.221	2.295	2.544
6	Tangki	28	31	19	16	16
7	Kendaraan khusus	0	6	5	7	5
8	Truk gandeng	11	9	7	9	4
<b>Jumlah</b>		<b>3.814</b>	<b>3.872</b>	<b>3.918</b>	<b>4.052</b>	<b>4.403</b>

Sumber: Purbalingga Dalam Angka Tahun 2005 - 2010, diolah

Terminal di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 berjumlah lima buah terminal tipe C yang berlokasi di Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Bukateja.

Tabel II.2.5.1-4. Type Terminal Angkutan Umum di Kabupaten Purbalingga

No	Nama terminal	Lokasi kecamatan	Tipe	Rencana Pengembangan dalam RTRW Tahun 2011 -2013
1	Purbalingga	Kalimanah	C	C
2	Bobotsari	Bobotsari	C	A
3	Rembang	Rembang	C	C
4	Kejobong	Kejobong	C	C
5	Bukateja	Bukateja	C	C

Sumber: Purbalingga Dalam Angka

Transportasi umum di Kabupaten Purbalingga dilayani oleh angkutan kota dan angkutan perdesaan yang menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. Terdapat 14 jalur trayek angkutan kota yang dilayani oleh 211 unit kendaraan berwarna oranye. Angkutan perdesaan yang menjangkau seluruh wilayah melayani 22 trayek dengan 584 unit kendaraan.

Transportasi umum ke wilayah sekitar Kabupaten Purbalingga seperti Banyumas, Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Tegal dan Pemalang menggunakan bus umum. Terdapat 33 trayek dengan jumlah kendaraan mencapai 124 unit. Di Kabupaten Purbalingga juga terdapat bus umum tujuan kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung serta dilintasi angkutan bus trayek Purwokerto-Semarang.

#### **II.2.5.2. Prasarana Irigasi**

Jaringan irigasi mempunyai fungsi menjaga kontinuitas pasokan air ke lahan pertanian dan menjaga kelebihan limpasan air hujan agar tidak menjadi banjir. Jaringan irigasi di Kabupaten Purbalingga meliputi irigasi teknis dan setengah teknis serta irigasi sederhana.

Pada tahun 2009, luas daerah irigasi di Kabupaten Purbalingga seluas 6.044,02 ha. Kondisi ini sangat menguntungkan untuk

meningkatkan produksi pertanian yang luas lahannya terbesar dibandingkan dengan fungsi-fungsi lahan lainnya. Prasarana pengairan yang ada di Kabupaten Purbalingga berupa bendungan dan saluran irigasi. Bendungan tersebut bersumber dari beberapa sungai besar yang terdapat di Kabupaten Purbalingga, antara lain Sungai Serayu, Sungai Klawing, dan Sungai Pekacangan. Sistem irigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga dikelompokkan dalam tiga katagori yaitu irigasi teknis, irigasi setengah teknis, dan irigasi sederhana.

Tabel II.2.5.2-1. Data Penanganan Prasarana Irigasi UPTD Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	AREAL (Ha)	PANJANG SALURAN		JUMLAH BANGUNAN			KONDISI			
			INDUK (Km)	SEKUN DER (Km)	BEN DUNG	BANG. SADAP	BANG. BAGI	SALURAN		BANGUNAN	
								BAIK (%)	RUSAK (%)	BAIK (Bh)	RUSAK (Bh)
1	Sititirtomarto Mata Air	866,60	0,44	17,70	2,00	31,00	2,00	30,00	70,00	7,00	26,00
2	Limpakdau	792,31	1,96	8,84	3,00	20,00	1,00	30,00	70,00	11,00	13,00
3	Kedungjampang	462,04	0,00	1,35	1,00	8,00	0,00	55,00	45,00	8,00	1,00
4	Rabak	420,21	0,00	2,60	1,00	11,00	0,00	20,00	80,00	7,00	5,00
5	Larangan I	369,22	0,00	6,69	1,00	10,00	0,00	30,00	70,00	5,00	6,00
6	Larangan II	89,11	0,00	2,09	1,00	5,00	0,00	32,00	68,00	4,00	2,00
7	Kedungjeruk	8,00	0,00	0,60	1,00	1,00	0,00	30,00	70,00	2,00	3,00
8	Kedungsiung	238,00	0,00	3,50	1,00	15,00	0,00	28,00	72,00	7,00	9,00
9	Kalimanah	231,05	0,80	5,54	1,00	9,00	1,00	23,00	77,00	7,00	5,00
10	Kyai Wilah	218,20	0,45	1,87	1,00	2,00	0,00	18,00	82,00	2,00	1,00
11	Badak	129,50	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	36,00	64,00	1,00	0,00
12	Lingga Mata Air	125,00	0,00	1,70	1,00	0,00	0,00	47,00	53,00	1,00	0,00
13	Kedung Arus	122,50	0,00	0,55	1,00	0,00	0,00	80,00	20,00	1,00	0,00
14	Kedungklapa	109,79	0,00	3,70	1,00	1,00	2,00	41,00	59,00	0,00	4,00
15	Lemberang	105,00	0,00	1,20	1,00	2,00	0,00	41,00	59,00	1,00	2,00
16	Pribadi	99,00	0,00	2,00	1,00	4,00	0,00	25,00	75,00	5,00	1,00
17	Wadastarum	95,00	0,00	2,50	1,00	0,00	0,00	20,00	80,00	1,00	0,00
18	Karangreja	88,40	0,00	0,70	1,00	3,00	0,00	57,00	43,00	2,00	2,00
19	Siceting	74,00	0,00	2,50	1,00	4,00	0,00	80,00	20,00	3,00	3,00
20	Metenggeng	81,00	0,00	1,20	1,00	0,00	0,00	62,00	38,00	0,00	0,00
21	Brunyah Mata Air	75,50	0,00	0,50	0,00	2,00	1,00	20,00	80,00	2,00	1,00
22	Kleang	66,50	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	37,00	63,00	1,00	0,00
23	Prabuwulan Mata Air	65,35	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	75,00	25,00	0,00	0,00
24	Gumelar	63,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	75,00	25,00	1,00	0,00
25	Purwohadi	57,00	0,00	1,00	1,00	2,00	0,00	25,00	75,00	2,00	1,00
26	Klantang/karangtengil	55,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	25,00	75,00	1,00	0,00
27	Karanggaren	49,00	0,00	0,80	1,00	1,00	0,00	37,00	63,00	2,00	0,00
28	Candinata	42,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	33,00	67,00	1,00	0,00
29	Kajar II	41,20	0,00	1,40	1,00	0,00	0,00	35,00	65,00	1,00	0,00
30	Petir	41,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10,00	0,00	0,00
31	Paseh	40,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	75,00	25,00	0,00	0,00
32	Manggung	38,60	0,00	0,75	1,00	0,00	0,00	65,00	35,00	0,00	1,00
33	Kemusuk	37,00	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	28,00	72,00	0,00	1,00
34	Alang-Alang	36,00	0,00	1,00	1,00	5,00	0,00	25,00	75,00	0,00	6,00
35	Curug	34,00	0,00	0,50	1,00	4,00	0,00	75,00	25,00	2,00	4,00
36	Berem	33,00	0,00	0,60	1,00	1,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
37	Karangpetir	32,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	60,00	40,00	1,00	0,00

NO	NAMA DAERAH IRIGASI	AREAL (Ha)	PANJANG SALURAN		JUMLAH BANGUNAN			KONDISI			
			INDUK (Km)	SEKUN DER (Km)	BEN DUNG	BANG. SADAP	BANG. BAGI	SALURAN		BANGUNAN	
								BAIK (%)	RUSAK (%)	BAIK (Bh)	RUSAK (Bh)
38	Karangsari	30,00	0,00	0,50	1,00	1,00	1,00	20,00	80,00	2,00	0,00
39	Depok	29,00	0,50	0,50	1,00	3,00	1,00	85,00	15,00	3,00	2,00
40	Genting	25,00	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	62,00	38,00	0,00	1,00
41	Kedungsalak	25,00	0,00	1,50	1,00	0,00	0,00	90,00	10,00	0,00	1,00
42	Kracak	25,00	0,00	0,70	1,00	0,00	0,00	28,00	72,00	0,00	1,00
43	Tinggar	25,00	0,00	2,00	1,00	4,00	0,00	25,00	75,00	0,00	1,00
44	Batu	23,00	0,00	1,84	1,00	0,00	0,00	27,00	73,00	0,00	1,00
45	Gowok	22,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1,00
46	Kalitengah	19,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	20,00	80,00	2,00	0,00
47	Limbangan	19,00	0,00	0,75	1,00	1,00	0,00	40,00	60,00	0,00	2,00
48	Tanggulasih	17,78	0,00	0,80	1,00	1,00	0,00	62,00	38,00	0,00	2,00
49	Babakan	16,00	0,00	1,20	1,00	0,00	0,00	25,00	75,00	0,00	1,00
50	Sinangka	14,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	80,00	20,00	0,00	0,00
51	Sibayur	13,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1,00
52	Karangjengkol	18,72	0,00	0,70	1,00	0,00	0,00	40,00	60,00	1,00	0,00
53	Kedungpete	12,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	40,00	60,00	0,00	1,00
54	Kedungbelis	10,95	0,00	0,35	1,00	0,00	0,00	75,00	25,00	0,00	1,00
55	Kedoya	10,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	80,00	20,00	0,00	1,00
56	Bulakan	10,00	0,00	1,00	1,00	3,00	0,00	25,00	75,00	1,00	3,00
57	Kedungdamang	10,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	35,00	65,00	0,00	1,00
58	Waringain	8,00	0,00	0,50	1,00	0,00	0,00	80,00	20,00	1,00	0,00
59	Ampel	6,00	0,00	0,40	1,00	0,00	0,00	75,00	25,00	0,00	1,00
60	Tahun	5,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	80,00	20,00	0,00	0,00
61	Makam	120,00	0,00	0,60	1,00	0,00	0,00	85,00	15,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>6.044,02</b>	<b>4,15</b>	<b>109,32</b>	<b>59,00</b>	<b>155,00</b>	<b>9,00</b>			<b>99,00</b>	<b>119,00</b>

Sumber: Bidang Pengairan DPU, 2009

### II.2.5.3. Prasarana Air Bersih

Pelayanan air bersih dapat dibedakan menjadi layanan air bersih perpipaan dan perdesaan. Pada umumnya pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Purbalingga masih memanfaatkan sumber air tanah dengan menggunakan sumur dan sumur pompa.

Tabel II.2.5.3-1. Jumlah Pelanggan dan Air Minum yang Disalurkan PDAM Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No	Uraian	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
1	Pelanggan (orang)	20.552	20.547	22.025	22.829	24.062
2	Air Minum yang Disalurkan (m <sup>3</sup> )	5.305.516	5.485.841	5.799.692	5.192.033	6.638.901

Sumber : PDAM Kabupaten Purbalingga



Pelanggan PDAM di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2009 sebanyak 24.062 pelanggan dengan volume air yang disalurkan sebanyak 6.638.901 m<sup>3</sup>. Cakupan pelayanan air bersih pada daerah perkotaan di Kabupaten Purbalingga baru mencapai 15 persen yang meliputi sistem perpipaan sebanyak 14,3 persen dan sistem non-perpipaan yang terlindungi sebanyak 0,70 persen. Diperkirakan masih terdapat sekitar 85 persen masyarakat di perkotaan yang belum terlayani air minum, baik dengan sistem perpipaan maupun sistem non-perpipaan yang terlindungi yang sebagian besar merupakan keluarga miskin. Cakupan pelayanan air minum pada daerah perdesaan di Kabupaten Purbalingga baru mencapai 10 persen dari seluruh penduduk perdesaan, yang meliputi sistem perpipaan sebesar 7 persen dan sistem non-perpipaan yang terlindungi sebesar 3 persen. Wilayah kecamatan di Kabupaten Purbalingga yang rawan air minum sebanyak 8 kecamatan, sedangkan desa rawan air minum sebanyak 124 desa.

Guna meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum diperlukan peningkatan penyediaan prasarana air minum. Kendala utama dalam penyaluran air minum melalui jaringan perpipaan adalah kondisi topografi wilayah yang bervariasi di mana pada wilayah dengan topografi dengan kelerengan curam sangat sulit dipasang jaringan. Penyaluran air bersih kepada masyarakat di wilayah-wilayah tersebut harus menggunakan sistem pompa yang membutuhkan dana sangat besar.

Kabupaten Purbalingga kaya akan sumber mata air permukaan. Hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Purbalingga memiliki sumber mata air dengan debit yang cukup tinggi. Berikut ini adalah data mata air, lokasi, debit, serta penggunaan mata air tersebut.

Tabel II.2.5.3-2.Data Inventarisasi Sumber Mata Air di Kabupaten Purbalingga

No	Kecamatan	Desa	Dukuh	Nama mata air	Debit (lt/dt)	Penggunaan
1	2	3	4	5	6	7
1	Kemangkon	1. Pelumutan		1. Kedung ketur	2	Air bersih penduduk
				2. Kedung betur	3	Air bersih penduduk
		2. Panican		1. Tuk Putih	2	Air bersih penduduk
				2. Mlaten	2	Air bersih penduduk
		3. Bakulan		1. Kali Lanang	2	Air bersih penduduk

No	Kecamatan	Desa	Dukuh	Nama mata air	Debit (lt/dt)	Penggunaan
		4. Senon		1. Kreo	5	Air bersih penduduk
				2. Kalo Lotong	2	Air bersih penduduk
				3. Kali Kuning	2	Air bersih penduduk
2	Bukateja	1. Kebutuh	1. Kebutuh	1. Tuk Kebutuh	2	Air bersih penduduk dan irigasi
3	Kejobong	1. Sokanegara	1. Kontrangan	1. Susur Bual	1	Air bersih penduduk
		2. Langgar	1. Karang Sari	1. Warudoyong	2	Air bersih penduduk
		3. Krenceng	1. Juranggrawah	1. Sibenda	5	Air bersih penduduk
			2. Lempong	2. Lempong	5	Air bersih penduduk
			3. Krenceng kidul	3. Sigumet	5	Air bersih penduduk
		4. Kejobong	1. Kejobong	1. Cangkring	5	Air bersih penduduk
		5. Kedarepan	1. Bojongsari	1. Banyumudal	4	Air bersih penduduk
4	Kaligondang	1. Kembaran Wetan	1. Kalikidang	1. Kalikidang	10	Air bersih penduduk
			2. Sumur Bendung	2. Sumur Bendung	10	Air bersih penduduk
		2. Slinga	1. Pagendangan	1. Pagendangan	10	Air bersih penduduk
		3. Kalikajar	1. Trengiling	1. Trengiling	20	Air bersih penduduk
		4. Sidanegara	1. Sidanegara	1. Sidanegara	10	Air bersih penduduk
		5. Pagerandong	1. Makam wangi	1. Makam Wangi	10	Air bersih penduduk
5	Purbalingga					
6	Kalimanah					
7	Kutasari	1. Candinata	1. Belokan	1. Sikalbut	15	Air bersih penduduk
		2. Karangcegak	1. Karangcegak	1. Tuh sirah	300	Air bersih penduduk dan irigasi
			2. Tlaga	2. Tlaga	300	Air bersih penduduk dan irigasi
			3. Karangpandang	3. Tuk Wringin	100	Air bersih penduduk dan irigasi
		3. Kutasari	1. Walik	1. Teleng	200	Air bersih penduduk pemandian dan irigasi
		4. Semingkir	1. Karangpelus	1. Tuk Pelus	50	Air bersih penduduk
			2. Lemah Meteng	2. Sirah	75	Air bersih penduduk
		5. Limbangan	1. Kuyukan	1. Tuk Gunung	100	Air bersih penduduk dan irigasi
8	Mrebet	1. Cipaku	1. Pangebonan	1. Tuk Bata Putih	15	Irigasi
		2. Serayu Larangan	1. Karang Tengah	1. Tlaga	150	Air bersih penduduk
			2. Putut	2. Tuk Arus	200	Air bersih penduduk dan irigasi
			3. winong	3. Pajetan	75	Air bersih penduduk dan irigasi
			4. Laji	4. Rachang	25	Air bersih penduduk
9	Bobotsari	1. Karangduren		1. Bandawayu	100	Air bersih penduduk
		2. Talagening		1. Sambeng	15	Air bersih penduduk
				2. Lemberang	20	Air bersih penduduk
		3. Tlagayasa		1. Longrang	10	Air bersih penduduk
				2. Tlaga	36	Air bersih penduduk
		4. Dagan		1. Siares	10	Air bersih penduduk
				2. Mudal	1000	Irigasi
		5. Gunungkarang		1. Joho	15	Air bersih penduduk
				2. Depok	45	Air bersih penduduk dan irigasi
		6. Bobotsari		1. Kalisari	20	Irigasi
				2. Larangan	15	Irigasi
10	Karangreja	1. Serang	1. Gunungmalang	1. Gunungmalang	10	Air bersih penduduk
			2. Kaliurip	1. Sikopyah	15	Air bersih
		2. Siwarak		2. Sipeitung	15	Air bersih penduduk

No	Kecamatan	Desa	Dukuh	Nama mata air	Debit (lt/dt)	Penggunaan
				3. Pejangan	30	Air bersih penduduk
		3. Karangreja	1. Siaren	1. Banyumudal	75	Air bersih penduduk
				2. Prumpang I	5	Air bersih penduduk
				3. Prumpang II	3	Air bersih penduduk
				4. Rinden	25	Air bersih penduduk
				5. Lampar		
				6. Rancah	15	Air bersih penduduk
		4. Tlahap Lor		1. Ondar-andir	45	
				2. Watu lumpang	20	
		5. Tlahap Kidul		1. Sikadu	25	
				2. Pakis		Air bersih penduduk
		6. Bondang		1. Gintung	20	Air bersih penduduk
				2. Yastani	40	
		7. Sirandu		1. Wadas		
		8. Purbasari		1. Tetek	20	Air bersih penduduk
		9. Karang Jambu		1. Pringgading	15	Air bersih penduduk
				2. Keburen	25	Air bersih penduduk
		10. Sanguwatang		1. Gunungmalaya	20	Air bersih penduduk
		11. Jingsang		1. Cangkir Pejatan	30	Air bersih penduduk
11	Rembang	1. Losari	1. Balong	1. Sanaliran	10	
			2. Bedahan	1. Salanasu	10	Irigasi
			3. Losari	1. Kalibodas	15	Air bersih penduduk dan irigasi
				2. Tuk Kalisenjang	15	Irigasi
		2. Batubarang	1. Sumingkir	1. Tuk Kali Joko	10	Air bersih penduduk
			2. Batubarang	1. Tuk Trondo	10	Air bersih penduduk dan irigasi
				2. Pancur Alas	25	Air bersih penduduk dan irigasi
		3. Bodaskarang Jati	1. Gohong	1. Gohong	3	Irigasi
			2. Bodaskarangjati	1. Kali Warak	5	Air bersih penduduk
		4. Tenalum	1. Jurung	1. Curug	15	Air bersih penduduk dan irigasi
			2. Batar	1. Alas Trienon	25	Air bersih penduduk dan irigasi
		5. Wanogara Kulon	1. Antok jeruk	1. Gunung Payung	10	Air bersih penduduk
			2. Wanogara Kulon	1. Laban bede	9	Air bersih penduduk
				2. Gunung Putri	15	Air bersih penduduk
		6. Wanogara Wetan	1. RT 4 Kadus III	1. Pancuran	3	Air bersih penduduk
		7. Mlahar	1. Tlaga	1. Suteng	5	Air bersih penduduk
			2. Pelemahan	1. Pelemahan	2	Air bersih penduduk
12	Karanganyar	1. Kalingi	1. Kaliori	1. Pendeta Cara	4	Air bersih penduduk
				2. Cangkring	5	Air bersih penduduk
				3. Kali Apa	4	Air bersih penduduk
				4. Sigowak	4	Irigasi
		2. Margasana	1. Margasana	1. Tlagasari	5	Air bersih penduduk
				2. Nilamsari	5	Air bersih penduduk
		3. Kertanegara	1. Kertanegara	1. Sidok	7	Air bersih penduduk
				2. Jati	4	Air bersih penduduk
				3. Pancuran Blinten	5	Air bersih penduduk
		4. Kasih	1. Kasih	1. Belik Pucung	7	
		5. Kalijaran	1. Kalijaran	1. Belik Wadas	3	Air bersih penduduk
				2. Belik Banda I	3	Air bersih penduduk
				3. Belik Jurig	5	Air bersih penduduk
				4. Belik K.Jaran	5	Air bersih penduduk

No	Kecamatan	Desa	Dukuh	Nama mata air	Debit (lt/dt)	Penggunaan
				5. Belik Rukem	4	Air bersih penduduk
				6. Belik Hulu	5	Air bersih penduduk
				7. Belik II	4	Air bersih penduduk
				8. Belik Palang	4	Air bersih penduduk
		6. Karanganyar	1. Karanganyar	1. Kalimundu	5	Air bersih penduduk
		7. Karanggedang	1. Karanggedang	1. Braja	5	Air bersih penduduk
		8. Jambu Desa	1. Jambu Desa	1. Tuk Balong Tusun	4	Air bersih penduduk
		9. Karangtengah	1. Karangtengah	1. Belik Depok	4	Air bersih penduduk
				2. Belik Desapi	5	Air bersih penduduk
				3. Belik Hulu	6	Air bersih penduduk
				4. Belik Embel	5	Air bersih penduduk
				5. Belok Dodong	5	Air bersih penduduk
				6. Belik Bacin	5	Air bersih penduduk
				7. Belik Gasal	8	Air bersih penduduk
		10. Karangasem	1. Karangasem	1. Belik Sengon	10	Air bersih penduduk
		11. Ardiasa	1. Ardiasa	1. Tuk Bawang	5	
		12. Langkap	1. Langkap	1. Lawa Ijo	5	
				2. Siarus	5	
				3. Sungai Arus	9	Air bersih penduduk
		13. Maribaya	1. Martibaya	1. Belik Binangun	4	Air bersih penduduk
				2. Belik Larangan	5	Air bersih penduduk
		14. Desa Lumpang	1. Lumpang	1. Blok Beringin	10	Air bersih penduduk
		15. Brakas	1. Brakas	1. Blok ampel	8	Air bersih penduduk
				2. Blok Gai	6	Air bersih penduduk
		16. Darma	1. Darma	1. Siayam	5	Air bersih penduduk
		17. Krangean	1. Krangean	1. Pingit	2	Air bersih penduduk
13	Karangmoncol	1. Pepedan	1. Kadus II	1. Sumur Cangring	2	Air bersih penduduk
			2. Kadus II	1. Sumur Pelas	2	Air bersih penduduk
		2. Kramat	1. Kalisinga	1. kramat	10	Air bersih penduduk
		3. Grantung	1. Bantar benda	1. Cahyana		Air bersih penduduk
		4. Tamansari	1. Irisi/merbung	1. Rawa	3	Air bersih penduduk
			2. Ketjiban	1. Ropak Selan	3	Air bersih penduduk
		5. Balairaksa	1. Karangkemiri	1. Kedung Benda	5	Air bersih penduduk
		6. Sirau	1. Gintung	1. Gintung	5	Air bersih penduduk
14	Bojongsari	1. Bojongsari	1. Banyumudal	1. Murga	20	Kolam renang
		2. Patemon	1. Karangpule	1. Pucung	10	
				2. Sunggani	10	
		3. Kajongan	1. Karangbolong	1. Situ	15	AB untuk RSU
		4. Banjaran	1. Sawangan	1. Bayur	10	
		5. Karangbanjar	1. Munjul luhur	1. Sirah	10	Air bersih penduduk
		6. Mentenggeng	1. Mentenggeng	1. Kertaurip	10	Air bersih penduduk
		7. Punisari	1. Karangsari	1. Cimongah	10	Air bersih penduduk
				2. Bayur	2,5	Air bersih penduduk
15	Pengadegan	1. Pengadegan	1. Pengadegan	1. Keciét	40	MCK
			2. Gumenggeng	2. Keciét	60	MCK
			3. Pengilen	3. Keciét	35	MCK
		2. Bedagas	1. RT.05/III	1. Keciét	35	MCK
			2. RT.07/IV	2. Keciét	50	MCK
			3. RT.13/VII	3. Keciét	60	MCK
			4. RT.17/VIII	4. Keciét	30	MCK
			5. RT.19/IX	5. Keciét	30	MCK
		3. Pasunggingan	1. RT.12/V	1. Keciét	30	MCK
			2. RT.18/VIII	2. Keciét	40	MCK
			3. RT.20/IX	3. Keciét	35	MCK

No	Kecamatan	Desa	Dukuh	Nama mata air	Debit (lt/dt)	Penggunaan
		4. Karangjoho	1. RT.03/I	1. Keciety	30	MCK
			2. RT.03/II	2. Keciety	35	MCK
			3. RT.08/III	3. Keciety	45	MCK
		5. Tegal pingan	1. Karanglewas	1. Kembangruncang	50	MCK
		6. Larangan	1. Simabaya	1. Kembangruncang	60	MCK
		7. Petel	1. Masjid Al Huda	1. Kembangruncang	45	MCK
16	Padamara	1. Karanggambas		1. Kali Talun	100	Air bersih/MCK
				2. Cupit Urang	75	Air bersih/MCK
				3. K.Pelus	100	Air bersih/MCK
		2. Mipiran		1. Mipiran	50	

Sumber: DPU Bidang Pengairan Kabupaten Purbalingga.

#### II.2.5.4. Prasarana Persampahan

Berdasarkan hasil studi pada tahun 2001, setiap individu dalam jangka waktu satu tahun menghasilkan sampah tidak kurang dari 15 kg. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebesar 901.369 orang pada tahun 2009, maka jumlah sampah yang membebani lingkungan hidup pada tahun tersebut diperkirakan mencapai 13.520.535 kg. Penanganan sampah yang dilakukan setiap unit rumah tangga di Kabupaten Purbalingga mempunyai karakteristik sebagai berikut: dibakar 85,34 persen; diangkut petugas 10,64 persen; dibuang ke kali/selokan 1,77 persen; dan 2,23 persen dibuang ke tempat lainnya.

Jumlah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang terdapat di Kabupaten Purbalingga sebanyak 1 unit dengan luas 4,7 hektar yang pada saat ini baru dimanfaatkan seluas 1,8 hektar. Direncanakan TPA ini dipakai sampai dengan tahun 2020. Sistem pengelolaan sampah di TPA menggunakan sistem *open dumping* dengan jumlah tenaga pengelola sebanyak 17 orang. Jarak TPA dengan permukiman terdekat sejauh 0,5 km dan jarak dengan sungai terdekat sejauh 1 km. Adapun jumlah angkutan sampah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Purbalingga terdiri dari satu unit mini truck, dua unit truk *arm roll*, enam unit *dump truck*, 6 unit truk sampah dan 10 unit becak sampah.

#### II.2.5.5. Prasarana Telekomunikasi

Prasarana telekomunikasi merupakan infrastruktur yang menunjang kelancaran arus informasi dan komunikasi. Oleh karena itu,

keberadaan prasarana telekomunikasi akan sangat berpengaruh terhadap aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat.

Prasarana telekomunikasi dapat dibedakan menjadi jaringan kabel dan non kabel. Jaringan telepon kabel di Kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat. Namun kekurangan tersebut bisa diatasi dengan adanya telepon nirkabel dengan telepon seluler yang digunakan tiap individu berupa *handphone* baik menggunakan GSM maupun CDMA. Pelanggan telepon kabel di Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan pada tahun 2006 - 2007 sebanyak 1.035 SST dengan kapasitas terpakai 1.050 SST. Jumlah pelanggan telepon di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2007 sebanyak 7.535 SST.

Tabel II.2.5.5-1. Persebaran Tower Telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga Tahun 2008

No	Kecamatan	Nama Tower	Lokasi Tower
1	Purbalingga	Tower PRO XI Tower PT Indosat Tower PT Indosat Tower PT Indosat Tower PRO XI Tower Tower Tower	Kel. Purbalingga Lor Kel. Wirasana Kel. Bancar Desa Penambongan Desa Bojong Kel. Wirasana Kel. Purbalingga Kidul Kel. Purbalingga Kidul
2	Bukateja	Tower PT Indosat Tower PRO XI Tower Telkomsel Tower	Desa Bukateja Desa Bukateja Desa Karangcengis Desa Bukateja
3	Kalimanah	Tower PT Indosat Tower Telkomsel Tower PRO XI Tower PT Indosat Tower	Desa Kalikabong Desa Blater Desa Kalimanah Wetan Desa Blater Desa Blater
4	Bobotsari	Tower Telkomsel Tower PRO XI Tower Flexy	Desa Bobotsari Desa Bobotsari Desa Bobotsari
5	Kutasari	Tower Telkomsel Tower PT Indosat Tower Telkomsel	Desa Kutasari Desa Kutasari Desa Kutasari
6	Kemangkon	Tower Telkomsel Tower PT Indosat Tower PRO XL	Desa Panican Desa Panican Desa Panican
7	Padamara	Tower Telkomsel Tower PT Indosat Tower PRO XL Tower PRO XL Tower	Desa Padamara Desa Padamara Desa Meri Desa Padamara Desa Karangsentul
8	Rembang	Tower PT Indosat Tower Telkomsel Tower PRO XL	Desa Losari Desa Losari Desa Bodaskarangjati

No	Kecamatan	Nama Tower	Lokasi Tower
9	Kejobong	Tower Telkomsel Tower PT Indosat Tower PRO XL	Desa Kejobong Desa Kejobong Desa Kejobong
10	Karangreja	Tower Telkomsel Tower PT Indosat PT. Tower Bersama Tower PRO XL	Desa Siwarak Desa Kutabawa Desa Kutabawa Desa Siwarak
11	Kaligondang	Tower Telkomsel Tower PT indosat Tbk Tower PRO XL	Desa Kaligondang Desa Selakambang Desa Kaligondang
12	Bojongsari	Tower Telkomsel Tower PT Indosat Tower PRO XI	Desa Bojongsari Desa Bojongsari Desa Beji
13	Karanganyar	Tower Telkomsel Tower PRO XL Tower PT Indosat	Desa Karanganyar Desa Karanganyar Desa Jambudesa
14	Karangmoncol	Tower Telkomsel Tower PRO XL	Desa Pekiringan Desa Karangsari
15	Pengadegan	Tower Telkomsel Tower PT Indosat Tower PRO XL Tower	Desa Pengadegan Desa Gondang Desa Tegalpingen Desa Gondang
16	Karangjambu	Tower Telkomsel Tower PRO XL	Desa Karangjambu Desa Karangjambu
17	Mrebet	Tower Telkomsel	Desa Sangkanayu

Sumber: KPPT Kab. Purbalingga

## II.2.6. Lingkungan Hidup

Pada saat ini daya dukung lingkungan bagi kehidupan penduduk di Kabupaten Purbalingga masih cukup memadai. Namun disadari bahwa kualitas lingkungan hidup terus mengalami penurunan. Hal ini antara lain ditandai dengan gejala menurunnya kekayaan plasma nutfah, terutama berupa biota yang hidup di perairan umum, berbagai jenis binatang dan tanaman langka, serta terjadinya bencana alam seperti tanah longsor, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Degradasi kualitas lingkungan hidup ini selain merupakan penurunan kekayaan alam, juga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem yang akan berdampak negatif bagi kehidupan manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Pencemaran lingkungan hidup, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali, kurangnya perhatian terhadap kelestarian lingkungan, serta kurangnya upaya konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam yang rusak, telah mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan.

Karena kondisi geografisnya, di Kabupaten Purbalingga terdapat kawasan yang rawan terhadap ancaman longsor, banjir, kekeringan, dan/atau bencana alam lainnya. Kondisi rawan bencana ini, selain mengancam keselamatan jiwa penduduk, juga potensial mengakibatkan kerugian ekonomi yang cukup besar.

Wilayah Kabupaten Purbalingga termasuk bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu yang terbagi dalam tiga sub-DAS, yakni sub-DAS Klawing, sub-DAS Pekacangan, dan sub-DAS Gintung. Kondisi tutupan lahan yang ada dikategorikan ke dalam kondisi buruk dan sangat buruk (23,67 persen), sedang (65,62 persen), serta baik dan sangat baik (10,72 persen).

Kondisi lahan pada areal budidaya pertanian didominasi oleh lahan dengan kategori potensial kritis yaitu seluas 24.531,31 hektar (44,56 persen), lahan tidak kritis seluas 17.931,30 hektar (32,57 persen), lahan agak kritis seluas 9.546,28 hektar (17,34 persen), lahan kritis seluas 1.982,43 hektar (3,60 persen), dan lahan sangat kritis seluas 1.059,91 hektar (1,93 persen).

Pada saat ini, kondisi lahan di kawasan lindung di luar kawasan hutan sudah mulai rusak. Hal tersebut dapat dilihat dari luasnya lahan agak kritis yang mencapai 5.337,02 hektar (55,42 persen), lahan potensial kritis seluas 2.367,57 hektar (24,59 persen), lahan kritis seluas 1.375,31 hektar (14,26 persen), lahan tidak kritis seluas 539,52 hektar (5,60 persen), dan lahan sangat kritis seluas 10,25 hektar (0,11 persen).

Kondisi lahan kritis di areal kawasan hutan produksi di Kabupaten Purbalingga didominasi oleh lahan potensial kritis dengan luas 11.421,97 hektar (95,97 persen), disusul oleh lahan agak kritis dengan luas 480,21 hektar (4,03 persen). Sedangkan kawasan hutan lindung di wilayah Kabupaten Purbalingga kondisinya didominasi oleh lahan yang dikategorikan potensial kritis dengan luas 1.181,02 hektar.



## **BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN**

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam menyusun arah kebijakan keuangan daerah diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Kebijakan keuangan daerah yang baik akan berdampak pada penciptaan kondisi makro ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sejalan dengan fungsi alokasi serta mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah yang ada, perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah daerah menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam merumuskan kebijakannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, sudah saatnya digali semua potensi sumber daya dan modal dasar daerah yang dimiliki. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya keuangan. Selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan secara optimal sebagai pendukung utama berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah sehingga mampu mendukung kemandirian daerah.

### **III.1. Pendapatan Daerah**

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang bertanggung jawab, aspek pendapatan daerah sangat penting dan mendasar bagi terselenggaranya rumah tangga pemerintahan daerah. Sejalan dengan kepentingan tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga setiap tahun selalu berusaha keras mewujudkan peningkatan pendapatan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah berasal dari tiga sumber pendapatan, meliputi 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; 2). Dana Perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK); 3). Lain-lain Pendapatan yang Sah, yang terdiri dari hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.

Selama lima tahun terakhir, pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga cenderung meningkat. Pendapatan daerah pada tahun 2005 sebesar Rp 373.971.473.452,- dan terus meningkat setiap tahun menjadi sebesar Rp 733.944.393.788,- pada tahun 2009 dan sebesar Rp 724.034.035.618,- pada tahun 2010. Kondisi selengkapnya pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2005-2009 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1-1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2010

No.	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>40.755.770.201</b>	<b>47.632.931.727</b>	<b>52.744.391.340</b>	<b>63.795.293.807</b>	<b>83.177.000.901</b>	<b>79.803.180.820</b>
1.	Pajak Daerah	5.792.993.382	6.986.492.550	8.153.289.156	9.574.697.396	10.934.150.483	11.371.153.412
2.	Retribusi Daerah	26.713.862.209	28.020.633.663	31.339.628.114	37.427.113.074	53.214.418.146	55.759.036.636
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.534.893.310	2.392.631.783	3.554.854.394	6.096.250.275	7.551.832.506	7.738.500.541
4.	Lain-lain PAD yang Sah	4.714.021.300	10.233.173.731	9.696.619.676	10.697.233.062	11.476.599.766	4.934.490.231
<b>B.</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>295.968.014.961</b>	<b>437.578.150.310</b>	<b>488.217.133.556</b>	<b>545.954.837.600</b>	<b>552.967.243.889</b>	<b>554.264.416.173</b>
1.	Dana Bagi Hasil	19.575.014.961	26.213.150.310	32.430.133.556	37.021.767.600	39.080.761.889	44.666.895.173
2.	Dana Alokasi Umum	263.393.000.000	383.925.000.000	416.181.000.000	457.886.070.000	462.101.482.000	464.788.521.000
3.	Dana Alokasi Khusus	13.000.000.000	27.440.000.000	39.606.000.000	51.047.000.000	51.785.000.000	44.809.000.000
<b>C.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>37.247.688.308</b>	<b>28.758.117.350</b>	<b>45.683.013.651</b>	<b>73.692.474.915</b>	<b>97.800.148.998</b>	<b>89.966.438.625</b>
1.	Hibah	-	-	5.147.261.378	350.710.356	319.494.505	147.247.989

No.	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan dari Provinsi dan Pemda Lainnya	11.638.915.117	13.590.413.091	15.628.216.176	19.894.390.721	21.861.897.910	21.261.108.628
3.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	18.874.980.000	2.749.000.000	12.000.000.000	35.776.530.000	49.222.875.500	3.868.000.000
4.	Bantuan Keuangan dari Prov & Pemda lainnya	3.936.052.053	7.740.828.476	12.907.536.097	17.352.090.238	11.502.791.083	15.649.676.008
	Pendapatan Lainnya	2.797.741.138	4.677.875.783	-	318.753.600	14.893.090.000	49.040.406.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>373.971.473.470</b>	<b>513.969.199.387</b>	<b>586.644.538.547</b>	<b>683.422.606.322</b>	<b>733.944.393.788</b>	<b>724.034.035.618</b>

*Sumber: DPPKAD Kabupaten Purbalingga*

Data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu 2005-2009 mengalami fluktuasi. Rata-rata pertumbuhan pendapatan sebesar 18,87 persen per tahun. Tahun 2006 terjadi pertumbuhan sebesar 37,44 persen, dan tahun berikutnya tingkat pertumbuhan menurun menjadi 14,14 persen. Tahun 2008 tingkat pertumbuhan sedikit meningkat menjadi 16,50 persen, namun pada tahun 2009 turun lagi menjadi 7,39 persen.

Proporsi kontribusi pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2005-2009 masih didominasi oleh Dana Perimbangan, yaitu rata-rata sebesar 79,40 persen. Proporsi terbesar kedua disumbang oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu rata-rata sebesar 10,36 persen, dan yang terakhir dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu rata-rata sebesar 10,24 persen.

### **III.2. Belanja Daerah**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah. Urusan pemerintahan meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah, atau

antarpemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui pencapaian target sasaran-sasaran pembangunan yang diukur dengan berbagai indikator kinerja pembangunan dan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkembangan realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2009) mengalami kenaikan sebesar 110,25 persen, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel III.2-1. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

NO	URAIAN	REALISASI					
		2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>2</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>						
2.1	Belanja tidak langsung	236.701.337.832	282.402.379.069	321.042.333.443	400.082.563.794	461.370.345.752	549.370.863.026
2.1.1	Belanja pegawai	196.484.371.708	237.578.997.748	268.923.725.302	337.128.365.384	394.388.107.181	477.934.347.805
2.1.2	Belanja bunga	85.416.332	79.707.351	68.709.486	62.809.185	55.051.627	47.460.449
2.1.3	Belanja subsidi	57.453.542	167.536.345	358.469.000	351.977.250	425.263.000	342.748.625
2.1.4	Belanja hibah			0	1.097.000.000	4.142.908.450	12.774.147.841
2.1.5	Belanja bantuan sosial	17.719.088.505	16.269.119.200	16.025.996.175	16.691.534.562	13.497.549.526	7.742.293.450
2.1.6	Belanja bagi hasil kpd prov/kab/kota & pemdes	25.745.870	18.876.000	14.301.580	14.589.520	13.222.770	15.382.210
2.1.7	Belanja bantuan keuangan kpd prov/kab/kota & pemdes	18.964.316.000	25.602.555.000	35.280.883.500	44.049.360.993	47.788.974.000	48.643.667.146
2.1.8	Belanja tidak terduga			370.248.400	646.926.900	1.059.269.198	1.870.815.500
2.2	Belanja langsung	117.637.552.536	196.278.487.060	235.709.756.821	307.731.909.344	283.643.805.458	185.546.228.652
2.2.1	Belanja Pegawai	-	-	23.321.839.127	20.435.576.835	19.209.950.775	16.098.629.677
2.2.2	Belanja Barang Jasa	79.474.988.617	106.500.581.000	92.055.354.721	106.909.621.255	149.765.864.990	126.628.402.165
2.2.3	Belanja Modal	38.162.563.919	89.777.906.060	120.332.562.973	180.386.711.284	144.667.989.693	42.819.196.810
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>		<b>354.338.890.368</b>	<b>478.543.635.070</b>	<b>556.752.030.264</b>	<b>707.774.473.138</b>	<b>745.014.151.210</b>	<b>734.917.091.678</b>

Struktur belanja daerah dalam APBD Kabupaten Purbalingga sebagian besar digunakan untuk belanja tidak langsung. Selama kurun waktu lima tahun terakhir proporsi belanja pegawai dan operasional

mencapai sekitar 72 persen. Hal ini disebabkan karena relatif kecilnya pendapatan daerah apabila dibandingkan dengan kebutuhan belanja operasional dan belanja pegawai, di mana pendapatan daerah sebagian besar bersumber dari transfer fiskal yang diberikan Pemerintah Pusat yang besarnya sudah ditentukan. Sedangkan kebutuhan belanja gaji pegawai selalu cenderung mengalami kenaikan (sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat) melampaui kenaikan alokasi transfer fiskal dari Pemerintah Pusat.

### **III.3. Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Struktur pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan memungkinkan terjadinya anggaran defisit atau surplus. Apabila *budgeting performance* memperlihatkan terjadinya defisit anggaran, maka harus dikreasi jenis penerimaan daerah yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya, apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran daerah yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan alokasi surplus anggaran.

Selama lima tahun terakhir, pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga digunakan untuk menutup defisit. Penerimaan pembiayaan terbesar terjadi pada tahun 2008, yakni sebesar Rp 104.315.442.995,00. Kondisi selengkapnya pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga selama tahun 2005-2009 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3-1. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2009

No.	URAIAN	2005	2006	2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.821.125.402	40.882.222.808	78.154.777.409	104.315.442.995	73.795.103.083
1.	SILPA tahun anggaran sebelumnya	22.941.603.391	40.168.850.740	71.819.185.563	80.059.058.702	67.032.355.433
2.	Pencairan dana cadangan	0	0	0	15.000.000.000	
3.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	0	0	0	0	
4.	Penerimaan pinjaman daerah	3.879.522.011	0	2.223.000.000	4.115.000.000	3.000.000.000
5.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0	713.372.068	4.112.591.846	5.141.384.293	3.762.747.650
6.	Penerimaan piutang daerah	0	0	0	0	
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.284.857.746	4.351.370.171	27.971.274.990	12.911.220.746	16.333.191.106
1.	Pembentukan dana cadangan	0	0	15.000.000.000	-	10.000.000.000
2.	Penyertaan modal (investasi daerah)	5.958.637.000	3.804.128.432	6.142.000.000	3.047.500.000	3.700.000.000
3.	Pembayaran pokok utang	63.720.746	217.241.739	2.286.720.745	4.063.720.746	9.633.191.106
4.	Pemberian pinjaman daerah	262.500.000	330.000.000	3.223.000.000	5.800.000.000	3.000.000.000
5.	Pembayaran utang pihak ketiga			1.319.554.245	-	
C.	PEMBIAYAAN NETTO	25.395.138.778	31.676.842.620	25.129.697.756	49.922.880.995	130.257.602.659
D.	SILPA TAHUN BERKENAAN	40.168.850.740	71.819.185.563	80.059.058.702	67.032.355.433	46.392.154.555

Sumber: DPPKAD Kabupaten Purbalingga, 2005-2009

### III.4. Analisis Kemampuan dan Arah Keuangan Daerah

Sampai dengan saat ini ketergantungan keuangan daerah terhadap Pemerintah Pusat masih sangat besar. Rata-rata proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan APBD pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah berada pada kisaran 7 sampai dengan 10 persen. Proporsi PAD dalam APBD Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun berada pada angka sekitar 9 persen.

Besarnya ketergantungan keuangan daerah terhadap transfer fiskal dari Pemerintah Pusat yang besaran alokasinya sudah ditentukan menyebabkan terbatasnya keleluasaan Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan penganggaran, khususnya dalam mengalokasikan anggaran untuk membiayai berbagai program dan kegiatan pembangunan.

Terbatasnya besaran transfer fiskal yang bersifat *block grant* berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil di tengah terus membengkaknya kebutuhan belanja pegawai menyebabkan semakin mengecilnya alokasi belanja pembangunan. Sementara itu alokasi dana lain dari Pemerintah Pusat dan Provinsi merupakan *specific grant* yang penggunaannya sudah ditentukan. Upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah adalah dengan peningkatan PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Meskipun demikian, upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD tersebut tidak akan mampu meningkatkan PAD secara signifikan guna mencukupi kebutuhan belanja pemerintah daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kebijakan keuangan daerah yang dapat diambil adalah : (1) melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan; (2) melakukan efisiensi belanja.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Purbalingga pada lima tahun terakhir menunjukkan kinerja yang terus membaik yang ditandai dengan pertumbuhan yang cukup tinggi, yakni 4 – 6 persen per tahun. Meskipun demikian penerimaan daerah khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami kenaikan secara signifikan.

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun-tahun yang akan datang ditentukan berdasarkan realisasi penerimaan pendapatan yang diterima beberapa tahun ke belakang. Hal ini menjadi landasan analisis dalam menentukan target penerimaan pendapatan yang akan dicapai pada jangka waktu lima tahun ke depan, di samping juga memperhatikan faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi tingkat penerimaan pendapatan seperti perkembangan perekonomian daerah, perkembangan jumlah penduduk, dan lain-lain.

#### **III.4.1. Kebijakan Pendapatan Daerah**

Berdasarkan pada realisasi pendapatan daerah selama lima tahun terakhir (2005-2009), pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2010-2015 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel III.4.1-1. Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2015

No.	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	2	3	4	5	6
A.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	91,721,635,000	98,477,267,239	105,773,814,824	113,655,785,421	122,171,452,252
B.	DANA PERIMBANGAN	628,936,355,000	672,015,467,076	718,541,437,186	768,838,907,876	823,268,287,683
C.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	144,503,085,000	146,593,033,348	148,825,384,355	151,211,268,582	153,762,750,023
<b>JUMLAH</b>		865.161.075.000	917.085.767.662	973.140.636.365	1.033.705.961.879	1.099.202.489.958

Sumber: DPPKAD Kabupaten Purbalingga, diolah.

Pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 15 persen per tahun tetapi tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2006, pendapatan daerah Kabupaten Purbalingga mengalami kenaikan sebesar 37,43 persen sedangkan pada tahun 2009 pertumbuhannya hanya sebesar 7,39 persen. Hal ini disebabkan turunnya tingkat kenaikan dana perimbangan terutama DAU yaitu sebesar 47,84 persen pada tahun 2006 dan dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2009 yang tingkat pertumbuhannya hanya sebesar 1,28 persen. Oleh karena itu, pertumbuhan pendapatan daerah pada tahun 2010-2015 diproyeksikan rata-rata hanya sebesar 6 persen dengan perincian : pertumbuhan rata-rata komponen PAD sebesar 7 persen; dana perimbangan sebesar 7 persen; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 1 persen. Proyeksi pendapatan daerah ini (termasuk PAD) bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin mengalami perubahan disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Terdapat beberapa hal yang cukup penting terkait dengan prospek keuangan daerah, antara lain:

1. Peranan sektor pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan dari BUMD dalam memberikan sumbangan ke PAD tampaknya akan



semakin penting. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban kepada masyarakat; melakukan intensifikasi melalui perbaikan ke dalam; dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya. Di samping itu, guna meingkatkan penerimaan pendapatan yang berasal dari BUMD diperlukan langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja BUMD serta penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMD.

2. Dana Perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat.
3. Prioritas pembangunan daerah harus benar-benar fokus pada upaya peningkatan kualitas manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengembangan pendapatan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2010-2015) diarahkan pada:

1. *Pajak daerah*. Kebijakan yang diformulasikan adalah perluasan basis sasaran pajak daerah (ekstensifikasi) dengan prinsip nondiskriminasi dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); perbaikan manajemen yang berbasis pada profesionalisme SDM pemungut pajak serta perbaikan/penyederhanaan sistem dan prosedur tatalaksana pemungutan; peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif; optimalisasi pemanfaatan aset-aset daerah yang potensial; penerapan sistem *incentive and disincentive* sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik; dan didukung oleh *updating* data potensi pajak.

2. *Retribusi daerah*. Kebijakan yang diformulasikan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik yang terkait dengan penarikan retribusi daerah dan penegakan aturan secara berkelanjutan sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
3. *Perusahaan daerah*. Kebijakan yang diformulasikan adalah peningkatan efektivitas pengelolaan perusahaan daerah secara profesional sesuai prinsip tata pengelolaan bisnis yang baik.
4. *Dana perimbangan*. Kebijakan yang diformulasikan adalah peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan dana perimbangan.
5. *Aspek regulasi*. Kebijakan yang diformulasikan adalah peningkatan implementasi serta *review* peraturan daerah yang terkait pajak dan retribusi daerah.
6. *Aspek makro*. Kebijakan yang diformulasikan adalah penciptaan lingkungan usaha yang kondusif bagi investasi; peningkatan stimulus bagi peningkatan aktifitas perekonomian rakyat; dan peningkatan pendayagunaan potensi sumber dana masyarakat secara berkelanjutan, adil, dan merata.

#### **III.4.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Kabupaten Purbalingga disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat melalui efisiensi pemanfaatan *input* untuk menghasilkan *output* dan *outcome* secara efektif dan terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran, serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Formulasi kebijakan belanja daerah diarahkan pada pendayagunaan sumber daya fiskal secara efektif dan efisien untuk mencapai target

sasaran pembangunan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas yang tajam sesuai kebutuhan dan tantangan pembangunan.

Berdasarkan realisasi belanja daerah selama lima tahun terakhir (2005-2009), belanja daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2010-2015 diperkirakan akan tampak seperti dalam tabel berikut.

Tabel III.4.2-1. Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015

No	URAIAN	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	4	5	6	7	8
A.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	574,805,087,000	621,145,338,970	671,633,936,256	726,642,894,823	802,577,632,126
B.	BELANJA LANGSUNG	309,053,206,000	315,751,082,955	322,407,600,925	329,046,148,189	319,695,053,337
<b>JUMLAH</b>		<b>883,858,293,000</b>	<b>936,896,421,926</b>	<b>994,041,537,181</b>	<b>1,055,689,043,012</b>	<b>1,122,272,685,462</b>

Sumber: DPPKAD Kabupaten Purbalingga, diolah

Belanja daerah Kabupaten Purbalingga selama lima tahun terakhir masih tumbuh rata-rata sebesar 19 persen per tahun, tetapi pertumbuhannya senantiasa mengalami penurunan. Pada tiga tahun terakhir, belanja daerah mengalami pertumbuhan hanya sebesar 12 persen. Di sisi lain pertumbuhan belanja gaji selalu meningkat pada lima tahun terakhir tetapi tidak diiringi dengan kenaikan DAU yang seimbang dengan kenaikan gaji. Hal ini menyebabkan rendahnya kemampuan daerah untuk melakukan perannya sebagai *agent of development* yakni antara lain sebagai pendorong insentif dan pendorong motivasi rakyat dalam usaha untuk mengadakan perubahan dan pembangunan. Oleh karena itu kebijakan belanja daerah tahun 2010-2015 diperkirakan masih akan didominasi oleh belanja tidak langsung. Belanja daerah Kabupaten Purbalingga diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6 persen per tahun dengan rata-rata pertumbuhan Belanja Tidak Langsung sebesar 8 persen per tahun, sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar 2 persen per tahun kecuali pada tahun 2015. Proyeksi belanja daerah ini bersifat

indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin berubah disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan (2010-2015) diarahkan pada:

1. *Efisiensi dan efektivitas pendayagunaan anggaran.* Kebijakan yang diformulasikan adalah optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
2. *Prioritas.* Kebijakan yang diformulasikan adalah peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah; dan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi (tupoksi) SKPD dalam melaksanakan kewajiban daerah sesuai urusan yang ditangani.
3. *Tolok ukur dan target kinerja.* Kebijakan yang diformulasikan adalah penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian sasaran pada setiap program/kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
4. *Optimalisasi belanja langsung.* Kebijakan yang diformulasikan adalah peningkatan upaya pencapaian tujuan pembangunan secara efisien dan efektif serta relevansi alokasi belanja langsung sesuai kebutuhan nyata masyarakat dan tujuan pembangunan.
5. *Transparansi dan Akuntabilitas.* Kebijakan yang diformulasikan adalah peningkatan akses masyarakat terhadap informasi tentang belanja daerah serta peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, meliputi masukan, proses, keluaran, dan hasil.
6. *Rasionalitas anggaran.* Kebijakan yang diformulasikan adalah peningkatan rasionalitas alokasi besaran plafon anggaran belanja daerah pada setiap kegiatan, program, bidang, dan SKPD sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.

### III.4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Prinsip pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, sehingga defisit anggaran dapat diminimalkan. Apabila pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran, dana bisa digali dari pinjaman daerah, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman yang tercermin dari besaran Rasio Kemampuan Membayar Kembali Pinjaman atau *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)* sebesar 2,5 persen. Ketentuan peraturan perundangan memungkinkan bagi Daerah untuk menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu alternatif mendapatkan pembiayaan daerah. Untuk itu, perlu dipelajari dan disiapkan dengan baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Melihat perkembangan keuangan daerah selama lima tahun terakhir (2005–2010) dan belanja tahun 2010-2015 maka pembiayaan daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp 19,816,121,644,- sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel III.4.3-1. Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015

No.	URAIAN	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25,083,809,000	25,083,809,000	25,083,809,000	25,083,809,000	25,083,809,000	25,083,809,000
B.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6,386,591,000	6,017,008,337	5,715,246,600	5,468,860,189	5,267,687,356	6,386,591,000
C.	PEMBIAYAAN NETTO	18,697,218,000	19,066,800,663	19,368,562,400	19,614,948,811	19,816,121,644	18,697,218,000

Sumber: DPPKAD Kabupaten Purbalingga

Proyeksi pembiayaan daerah ini bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk berubah sesuai dengan perkembangan kondisi dan kebijakan yang ada.

Formulasi kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah atas dasar kemampuan APBD dan pinjaman daerah dalam jangka menengah yang selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. *Penerimaan pembiayaan.* Kebijakan yang diformulasikan adalah mendayagunakan sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).
2. *Pengeluaran pembiayaan.* Kebijakan yang diformulasikan adalah peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang berorientasi untuk peningkatan penerimaan PAD dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan, diharapkan pendapatan daerah dan kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dapat meningkat.

#### **III.4.4. Pembangunan Bersumber Dana Belanja Lainnya**

Untuk dapat melaksanakan seluruh program pembangunan guna mencapai seluruh sasaran pembangunan dan mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan dalam rangka pencapaian visi pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Mengingat keterbatasan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah maka dibutuhkan dukungan pendanaan dari sumber-sumber lainnya di luar APBD baik yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi maupun sumber-sumber lainnya yang sah. Dana pembangunan daerah yang bersumber dari Pemerintah Pusat dapat berupa dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan serta bentuk bantuan lainnya.

Mengingat sumber dana pembangunan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi tidak dapat dipastikan besaran dan perolehannya, maka dalam penyusunan kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2010 – 2015 diperhitungkan secara terpisah

berdasarkan perkiraan. Besaran penerimaan dana Tugas Pembantuan dan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2007 sampai tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel III.4.4-2. Belanja Tugas Pembantuan Tahun 2007-2010

NO	URUSAN	2007	2008	2009	2010
1	Kesehatan	2,060,261,272	10,125,500,000	5,000,000,000	11,000,000,000
2	Pertanian				
	- Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura	5,843,165,000	5,014,184,000	6,548,060,000	<b>2,359,525,000</b>
	- Perkebunan	448,352,000	582,853,000		
	- Peternakan	300,000,000	254,000,000	615,000,000	
3	Pertanahan				
4	Kelautan dan Perikanan		323,200,000	615,000,000	
5	Kehutanan	6,185,584,000	855,065,000		
6	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			1,000,000,000	
7	Ketenagakerjaan	505,325,000	735,595,000	5,177,700,000	1,871,842,000
8	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6,250,000,000	19,014,360,000	32,513,380,000	31,545,210,000
9	Perumahan			8,217,500,000	3,200,000,000
10	Perindustrian	1,000,000,000	730,066,000	700,000,000	600,000,000
		22,592,687,272	37,634,823,000	60,386,640,000	50,576,577,000

Proyeksi penerimaan Dana Tugas Pembantuan dan Dana Daerah Urusan Bersama tahun 2011 sampai dengan 2015 diperkirakan tidak mengalami kenaikan.

## **BAB IV. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Perumusan strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang efektif dan efisien sesuai tujuan perencanaan pembangunan daerah. Perumusan strategi pembangunan meliputi proses analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Identifikasi terhadap faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal didasarkan pada tingkat pengaruhnya terhadap kehidupan dan kinerja seluruh komponen yang terkait dengan proses pembangunan sehingga akan menentukan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

### **IV.1. Analisis Lingkungan Strategis Daerah**

#### **IV.1.1. Analisis Lingkungan Internal**

Faktor lingkungan internal yang dimiliki Kabupaten Purbalingga pada saat ini yang akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

##### **IV.1.1.1. Kekuatan (*Strengths*)**

1. Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
2. Jumlah dan kualifikasi aparatur Pemerintah Kabupaten Purbalingga relatif memadai.
3. Kapasitas sarana dan prasarana pemerintahan serta pelayanan sosial relatif memadai.
4. Kesadaran masyarakat terhadap pemeliharaan kesehatan relatif tinggi.
5. Tersedianya Kader Kesehatan dan Kader KB di seluruh wilayah.
6. Adanya kelembagaan pemerintahan desa/kelurahan yang telah mapan.
7. Kondisi agroekologis wilayah Kabupaten Purbalingga yang memungkinkan tumbuhnya berbagai jenis tanaman.
8. Banyaknya Perusahaan PMA dan PMDN.
9. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)



10. Besarnya proporsi penduduk usia produktif dan tersedianya tenaga kerja dalam jumlah relatif besar.
11. Tersedianya jaringan infrastruktur dan kemudahan akses transportasi di seluruh wilayah.
12. Pelayanan Perijinan dengan *one stop service* berstandar ISO 14001.
13. Situasi dan kondisi di bidang politik, keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang relatif kondusif.
14. Banyaknya potensi sumberdaya alam yang dapat didayagunakan untuk mendorong perekonomian dan pembangunan daerah.
15. Ikon Purbalingga sebagai destinasi wisata regional baru.
16. Banyaknya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan sebagai modal sosial dalam pembangunan.
17. Masih relatif tingginya kesadaran tentang nilai-nilai sosial di kalangan masyarakat.

#### **IV.1.1.2. Kelemahan (Weaknesses)**

1. Terbatasnya kemampuan keuangan pemerintah daerah.
2. Belum ada keseimbangan antara penerapan sistem karir dan sistem prestasi kerja dalam pembinaan karir PNS.
3. Kapasitas dan kompetensi serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh aparatur pemerintah daerah masih relatif terbatas.
4. Jumlah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi tingkat pendidikan DIV-S1 relatif rendah (48,94 %).
5. Penyelenggaraan pendidikan masih berorientasi pada tingkat kelulusan siswa dan kurang mengutamakan proses pendidikan menyeluruh yang memperhatikan aspek kemampuan interaksi sosial dan interpersonal, watak, budi pekerti, serta kecintaan terhadap budaya nasional dan semangat nasionalisme.
6. Kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik masih relatif rendah (tenaga pendidik yang memperoleh sertifikat kompetensi : 33,02 %).

7. Belum semua prasarana kesehatan melaksanakan manajemen mutu pelayanan kesehatan (*quality assurance* belum diterapkan di semua lembaga pelayanan kesehatan).
8. Terbatasnya prasarana dan sarana pelayanan KB.
9. Kualitas SDM kelembagaan pemerintah di tingkat desa/kelurahan relatif rendah.
10. Wilayah Kabupaten Purbalingga berada di luar jalur transportasi utama Pulau Jawa (daerah belakang).
11. Relatif rendahnya kepemilikan lahan pertanian oleh petani (+/- 0,24 ha per rumah tangga petani).
12. Relatif rendahnya kapasitas produksi, produktivitas, kualitas produk, dan akses pasar usaha mikro dan kecil.
13. Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
14. Belum tersedianya perangkat lunak regulasi di tingkat daerah bagi perlindungan pasar tradisional dan usaha perdagangan skala kecil.
15. Prasarana, sarana, dan pengelolaan sebagian besar pasar tradisional masih belum memadai.
16. Sistem informasi dan data potensi investasi belum tersedia secara memadai.
17. Kualitas tenaga kerja relatif rendah dan didominasi tenaga kerja berpendidikan rendah.
18. Belum optimalnya pendayagunaan potensi sumberdaya lokal.
19. Belum optimalnya peran dan fungsi organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dalam penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa.
20. Belum optimalnya pembinaan olahraga prestasi.
21. Relatif rendahnya kapasitas dan kualitas prasarana transportasi.
22. Kondisi topografi wilayah yang bervariasi serta banyak dipisahkan oleh sungai besar maupun kecil.
23. Banyak wilayah yang rentan terhadap kekeringan atau kekurangan air baku.

24. Akses masyarakat terhadap sanitasi masih relatif rendah.
25. Kualitas lingkungan permukiman masih relatif rendah.
26. Masih relatif rendahnya kesadaran akan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
27. Penegakan hukum di bidang lingkungan masih lemah.
28. Belum tersedianya sistem deteksi dini terhadap ancaman bencana alam.

#### **IV.1.2. Analisis Lingkungan Eksternal**

Faktor lingkungan eksternal yang diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

##### **IV.1.2.1. Peluang (*Opportunities*)**

1. Perkembangan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
2. Komitmen Pemerintah dalam penganggaran belanja bidang pendidikan yang cukup tinggi.
3. Adanya UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
4. Relatif tingginya kesadaran masyarakat terhadap program KB.
5. Adanya kebijakan otonomi dan desentralisasi fiskal sampai ke tingkat desa.
6. Relatif stabilnya permintaan pasar akan produk pertanian.
7. Terbukanya pangsa pasar produk-produk lokal di pasar regional, nasional dan internasional.
8. Semakin berkembangnya teknologi tepat guna yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas produksi bagi usaha mikro dan kecil.
9. Meningkatnya daya beli masyarakat.
10. Banyaknya pemilik modal yang ingin melakukan kegiatan investasi.

11. Tingginya minat terhadap wisata alam, budaya lokal, klasik, dan unik.
12. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di bidang kesehatan dan pendidikan.
13. Adanya komitmen untuk mencapai target-target MDGs.

#### **IV.1.2.2. Tantangan (*Threats*)**

1. Semakin tingginya desakan penduduk terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup.
2. Masih relatif tingginya laju pertumbuhan penduduk.
3. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik sebagai implikasi dari peningkatan standar kehidupan masyarakat dan proses demokratisasi.
4. Adanya dinamika lingkungan eksternal yang menghendaki terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik.
5. Adanya target pencapaian Millenium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015.
6. Adanya tuntutan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan manusiawi.
7. Adanya tuntutan pasar tenaga kerja yang membutuhkan SDM yang terdidik dan terampil.
8. Semakin berkembangnya budaya hedonisme dan individualisme yang melunturkan nilai-nilai luhur budaya bangsa serta semangat nasionalisme dan patriotisme.
9. Adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit degeneratif sebagai akibat menurunnya kualitas lingkungan hidup dan berkembangnya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produksi makanan serta kecenderungan mewabahnya penyakit transnasional (flu burung, flu babi, dan HIV).
10. Masih sering munculnya wabah penyakit epidemik (DBD, malaria, chikungunya).
11. Banyak daerah lain yang memiliki keunggulan komperatif dan kompetitif bagi pengembangan investasi.

12. Tuntutan pasar yang menghendaki adanya kontinuitas pasokan dan tingginya standar kualitas produk.
13. Era perdagangan bebas yang memungkinkan masuknya berbagai produk mancanegara yang sejenis dengan produk lokal dengan kualitas yang jauh lebih baik dan harga lebih terjangkau.
14. Bergesernya gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai pasar/toko modern.
15. Adanya kecenderungan daerah lain untuk membangun obyek wisata yang sama dengan yang ada di Kabupaten Purbalingga.

## **IV.2. Prioritas Pembangunan**

Berdasarkan analisis kondisi dan lingkungan strategis yang ada pada saat ini dan akan dihadapi pada lima tahun yang akan datang, disusun Prioritas Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 sebagai berikut:

### **1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik (Reformasi Birokrasi), dengan fokus pada :**

- a. Peningkatan profesionalisme aparatur melalui penyempurnaan manajemen kepegawaian, meliputi sistem karir, *recruitment*, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS.
- b. Penguatan kelembagaan pemerintah daerah agar berfungsi efektif dan efisien melalui penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama bagi setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

### **2. Pembangunan Pendidikan, dengan fokus pada :**

- a. Terjaminnya akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan peningkatan akses masyarakat, terutama keluarga miskin, terhadap layanan pendidikan menengah yang berkualitas (pendidikan dasar gratis bagi keluarga miskin).
- b. Penerapan metodologi pendidikan tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan interaksi sosial dan interpersonal, pendidikan watak dan budi pekerti, serta kecintaan terhadap budaya nasional dan semangat nasionalisme dengan memasukkan muatan lokal berupa pendidikan seni dan budaya daerah serta pendidikan budi pekerti.

- c. Pengembangan pendidikan vokasi (formal) dan pendidikan keterampilan (nonformal) yang bertujuan untuk mewujudkan keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan, serta untuk menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja.
- d. Pengembangan sekolah kejuruan dan pengayaan kurikulum dengan muatan pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan pada sekolah umum.
- e. Pengembangan pendidikan keterampilan nonformal.

**3. Pembangunan Kesehatan dan Keluarga Berencana**, dengan fokus pada Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan merata melalui :

- a. Revitalisasi Program Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (JPKM);
- b. Revitalisasi posyandu/ posdaya; penyediaan prasarana, sarana, dan tenaga kesehatan secara memadai di seluruh wilayah;
- c. Meningkatkan status RSUD dari tipe C menjadi tipe B;
- d. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk;
- e. Peningkatan jangkauan pelayanan KB bagi keluarga miskin;
- f. Revitalisasi peran kader KB.

**4. Pembangunan Perdesaan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat**, dengan fokus pada:

- a. Pemantapan otonomi desa melalui penguatan otonomi kultural dan struktural masyarakat perdesaan, serta desentralisasi pembangunan desa dan desentralisasi pengelolaan anggaran desa yang mencerminkan semangat keadilan.
- b. Pemenuhan kebutuhan pangan dan papan, terutama bagi keluarga miskin.
- c. Pemantapan pemenuhan kebutuhan pangan bagi keluarga miskin; pemantapan ketahanan pangan berbasis potensi lokal; penuntasan pemenuhan rumah layak huni bagi keluarga miskin; fasilitasi penyediaan rumah sehat sederhana bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- d. Pemenuhan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi yang

layak.

**5. Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas**, dengan fokus pada:

- a. Peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
- b. Penyediaan benih/bibit varietas unggul yang teruji.
- c. Pengembangan pertanian organik.
- d. Pengembangan komoditas unggul sesuai potensi agroekologis.
- e. Optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya alam lokal bagi usaha pertanian.
- f. Peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur pertanian.

**6. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi**, dengan fokus pada:

- a. Fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
- b. Pengembangan dan peningkatan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- c. Peningkatan daya saing industri kecil dan industri kreatif.
- d. Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat.

**7. Pengembangan Usaha Perdagangan**, dengan fokus pada pemantapan usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah melalui revitalisasi pasar tradisional dan pengaturan pasar modern.

**8. Pengembangan Investasi dan Pembangunan Ketenagakerjaan**, dengan fokus pada:

- a. Pengembangan dan penguatan industri padat karya dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang memiliki nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.
- b. Penciptaan lingkungan bisnis (*business environment*) yang semakin

kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi dengan menitikberatkan pada perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur perijinan, dan perbaikan sistem informasi.

- c. Peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial.

**9. Pembangunan Pariwisata dan Seni Budaya**, dengan fokus pada:

- a. Pengembangan dan peningkatan kapasitas serta kualitas obyek pariwisata.
- b. Pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah guna meningkatkan apresiasi masyarakat dan pelestarian seni budaya daerah.
- c. Pengenalan dan peningkatan apresiasi siswa terhadap seni budaya daerah dengan memasukkan pendidikan seni dan budaya daerah sebagai muatan lokal dan kegiatan ekstra kurikuler pada pendidikan formal.

**10. Pembangunan Kepemudaan dan Keolahragaan**, dengan fokus pada :

- a. Peningkatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk semakin menanamkan semangat kepeloporan dan nasionalisme di kalangan generasi muda.
- b. Peningkatan pembinaan mental, kesehatan jasmani, dan peningkatan prestasi olahraga.

**11. Pembangunan Infrastruktur**, dengan fokus pada:

- a. Peningkatan aksesibilitas seluruh wilayah, terutama wilayah-wilayah tertinggal, dalam rangka mendorong keserasian pertumbuhan antarwilayah dan menciptakan kawasan pusat pertumbuhan baru melalui pembangunan jalan tembus antarwilayah dan percepatan pengembangan wilayah-wilayah cepat tumbuh.
- b. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi untuk menunjang peningkatan produksi pertanian.

**12. Pembangunan Lingkungan Hidup**, dengan fokus pada:

- a. Rehabilitasi lahan kritis dan terlantar serta pengembalian fungsi kawasan lindung.
- b. Pelestarian sumber daya genetik (kekayaan plasma nutfah).



- c. Peningkatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran serta kerusakan lingkungan.
- d. Optimalisasi pemeliharaan dan pengelolaan mata air, daerah tangkapan air, dan daerah aliran sungai.

## **BAB V. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 merupakan penjabaran dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 untuk tahap 5 (lima) tahun kedua. Oleh karena itu Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 harus selaras dengan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025. Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 adalah **Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia**. Adapun Misi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 adalah :

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik;
2. Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, dan Demokratis Berlandaskan Hukum;
3. Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Berkualitas, Bermoral, Memiliki Jati Diri dan Semangat Nasionalisme;
4. Mewujudkan Ekonomi Masyarakat Purbalingga yang Semakin Meningkat dan Berkeadilan;
5. Mewujudkan Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Prasarana dan Sarana Wilayah;
6. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

RPJP Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga tahap II Tahun 2010-2015 ditekankan pada upaya meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar yang semakin berkualitas, memperkokoh perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi kerakyatan yang

ditunjang penyediaan berbagai prasarana sosial ekonomi yang semakin meningkat kapasitas dan kualitasnya, serta mendorong terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **V.1. Visi**

Visi pembangunan daerah adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi, dilaksanakan kebijakan-kebijakan dasar penyelenggaraan pembangunan selama periode perencanaan yang dirumuskan dalam bentuk misi yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tingkat pencapaian visi yang merupakan *resultante* dari keberhasilan pelaksanaan seluruh misi tercermin dari tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang diukur melalui tingkat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan visi pembangunan daerah, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan daerah merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu daerah untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 merupakan Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga terpilih yang telah dikomunikasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan masyarakat sebelum proses pemilihan kepala daerah dilaksanakan. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2010-2015 adalah **PURBALINGGA YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERKEADILAN DAN BERAKHLAK MULIA.**

Sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi pembangunan, Visi Pembangunan

Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 – 2015 merupakan kelanjutan visi pembangunan Tahun 2005-2010. Hal ini mengingat adanya berbagai keberhasilan yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya, selain masih ada beberapa hal yang harus terus ditingkatkan. Penyelenggaraan pembangunan pada tahap sebelumnya telah berhasil meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Purbalingga. Namun demikian, hal-hal tersebut masih harus terus ditingkatkan, mengingat parameter tentang kesejahteraan terus mengalami perkembangan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial dan ekonomi. Di samping itu, adanya dinamika lingkungan eksternal menuntut adanya peningkatan daya saing daerah secara terus menerus.

Meskipun secara prinsip Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga 2010-2015 sama dengan Visi Pembangunan Tahun 2005-2010, tetapi dilakukan beberapa penajaman dengan menambah kata “maju” dan “berkeadilan”. Penambahan kata “maju” didasarkan pada pemikiran bahwa pembangunan Kabupaten Purbalingga yang akan dilaksanakan di samping bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, daya saing, dan kesejahteraan, juga harus mampu mewujudkan suatu kondisi yang lebih baik dari masa sebelumnya serta lebih baik dibanding dengan daerah lain.

“Purbalingga yang maju” menunjukkan adanya *progress* mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas manusia, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya paritas daya beli masyarakat, serta meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya pemenuhan kebutuhan perumahan secara layak, meningkatnya akses masyarakat terhadap sanitasi, tersedianya infrastruktur secara memadai, lestariannya sumber daya alam, dan terpeliharanya fungsi lingkungan hidup.

Kemandirian daerah adalah kemampuan nyata pemerintah dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Maksud dari Visi

“Purbalingga yang mandiri” adalah bahwa dengan keuletan dan kerja keras, seluruh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan akselerasi pembangunan guna meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan daerah. Hal ini dilakukan melalui strategi, kreasi, dan inovasi yang diciptakan dan dikembangkannya sendiri, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar ketergantungan terhadap pihak lain secara bertahap dapat dikurangi.

Maksud dari “Purbalingga yang berdaya saing” adalah bahwa dengan kemajuan dan kemandiriannya tidak menjadikan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengisolasi diri dari pengaruh dan perkembangan, serta dinamika lingkungan, melainkan justru senantiasa berupaya meningkatkan kemampuan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga mampu mengikuti dinamika dan mampu bersaing di era otonomi dan globalisasi.

Maksud dari “Purbalingga yang sejahtera” yaitu bahwa tujuan akhir dari pembangunan yang dilaksanakan adalah mewujudkan masyarakat Purbalingga yang sejahtera. Sejahtera yang dimaksud di samping terpenuhinya kebutuhan yang bersifat fisiologis dan material, juga mencakup kebutuhan yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih, serta harga diri (mampu, mandiri, kompeten, reputasi, prestise, dan apresiasi) dan kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Maksud “berkeadilan” adalah bahwa kesejahteraan yang telah dicapai sebagai hasil dari upaya pembangunan yang telah dilaksanakan, harus dapat dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Purbalingga yang tercermin dari berkurangnya kesenjangan tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah, terutama antara wilayah perdesaan dengan perkotaan, kesenjangan antarstrata sosial ekonomi, serta kesenjangan antarindividu termasuk antara penduduk laki-laki dan perempuan. “Berkeadilan” juga mengandung maksud bahwa seluruh masyarakat

ditempatkan secara setara sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan, memperoleh kesetaraan dalam mendapatkan pelayanan pemerintah serta setara di hadapan hukum.

Maksud dari “berakhlak mulia” adalah bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

## **V.2. Misi dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015**

### **V.2.1. Misi I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**

Meningkatnya kesadaran politik rakyat sejalan dengan proses demokratisasi sebagai implikasi dari reformasi di segala aspek kehidupan mengakibatkan semakin menguatnya tuntutan masyarakat untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Di samping itu adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi semakin menuntut terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui Misi ini diharapkan agar penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Purbalingga dapat dijalankan secara transparan; akuntabel; efektif dan efisien; memiliki strategi yang jelas; mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan penyelenggaraan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat. Pemerintah Daerah juga dituntut untuk semakin dapat mewujudkan keadilan dan menegakkan hak asasi manusia.

#### **Tujuan :**

Tujuan pelaksanaan Misi ke-1 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) adalah mewujudkan kelembagaan pemerintah daerah dan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien; transparan; akuntabel; memiliki strategi yang jelas; mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

**V.2.2. Misi II : Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, Tertib, dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)**

Salah satu prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan adalah terwujudnya lingkungan sosial yang aman, damai, dan tertib. Di sisi lain meningkatnya kesadaran politik masyarakat di tengah euforia demokrasi pasca reformasi harus diimbangi dengan upaya-upaya untuk mengembangkan etika politik sehingga terhindar dari praktek demokrasi yang anarkis dan sebaliknya akan dapat diwujudkan kehidupan demokrasi yang lebih bermartabat. Sedangkan pembangunan bidang hukum dan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelenggaraan *good and clean governance*.

Perbedaan pemahaman terhadap keragaman agama dan budaya; perbedaan kondisi sosial-ekonomi; masalah kemiskinan dan kepadatan penduduk; berbagai permasalahan sosial lain seperti merebaknya peredaran miras dan narkoba, prostitusi, perjudian, dan premanisme; serta kecenderungan meningkatnya kriminalitas, merupakan faktor-faktor potensial untuk timbulnya gangguan ketertiban, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

Melalui misi ini diharapkan agar dapat diwujudkan rasa aman, tenteram, dan damai dalam kehidupan masyarakat dengan mengeliminasi ketegangan dan ancaman konflik; menurunkan angka kriminalitas; meningkatkan ketertiban umum; mengembangkan semangat kebangsaan

dan cinta Tanah Air; mewujudkan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis; memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; mengembangkan budaya hukum, meningkatkan kesadaran hukum, serta menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.

**Tujuan :**

1. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang dengan meningkatkan kesadaran sosial masyarakat serta pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM); mewujudkan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi; serta mewujudkan supremasi hukum dan hak asasi manusia sehingga akan meningkatkan akselerasi pembangunan.
2. Mewujudkan kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatkan partisipasi politik rakyat, serta meningkatkan peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

**V.2.3. Misi III : Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Semakin Berkualitas, Berakhlak Mulia, Beretika, serta Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme**

Kualitas manusia dan kualitas kehidupan manusia merupakan tujuan yang sebenarnya dari upaya pembangunan. Kualitas manusia di samping diukur dari aspek-aspek yang bersifat lahiriah seperti tingkat pendidikan dan derajat kesehatan, juga diukur dari kualitas moral dan intelektual yang tercermin dalam perilaku dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Kualitas manusia yang dicita-citakan di samping diukur dari beberapa hal tersebut, juga diukur dari kepribadian/jatidiri dan kecintaan terhadap kebudayaan dan tanah air serta tertanamnya semangat nasionalisme. Sedangkan kualitas kehidupan manusia diukur dari



terpenuhinya kebutuhan dasar serta tersedianya secara memadai berbagai prasarana dan sarana guna terwujudnya kehidupan yang berkualitas.

Implementasi misi ini antara lain dilaksanakan melalui peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, kesejahteraan keluarga, kesejahteraan sosial, keadilan gender, perlindungan anak dan keberdayaan masyarakat dalam bidang sosial kemasyarakatan; mengembangkan kehidupan beragama dan meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat; meningkatkan kerukunan hidup inter dan antarumat beragama; mengembangkan kesetiakawanan sosial, toleransi, dan budaya demokrasi dalam segala aspek kehidupan masyarakat; memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui internalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa; mengembangkan semangat nasionalisme; meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap seni dan kebudayaan termasuk terhadap budaya lokal untuk mengembangkan kepekaan emosional dan meningkatkan kualitas moral dan intelektual masyarakat serta memantapkan landasan spiritual dan moral dalam pembangunan daerah.

**Tujuan :**

1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya derajat kesehatan, tingkat pendidikan dan kualitas intelektual; terwujudnya kesetaraan gender; berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; berkembangnya semangat gotong royong; serta semangat dan wawasan kebangsaan sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan sosial.
2. Memantapkan jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga yang tercermin pada berkembang dan meningkatnya apresiasi terhadap budaya yang sesuai dengan nilai kepribadian bangsa.

#### **V.2.4. Misi IV : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga yang Semakin Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pendayagunaan Seluruh Potensi Daerah**

Pembangunan ekonomi menduduki posisi yang sangat strategis karena keberhasilan pembangunan ekonomi akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat sebagai hasil dari pembangunan ekonomi akan meningkatkan daya beli yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses berbagai sumber daya dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan dan semakin meningkatkan aktifitasnya dalam bidang ekonomi.

Upaya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dilakukan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan produksi dan nilai tambah pada masing-masing sektor ekonomi. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta meningkatkan pendapatan per kapita riil seluruh masyarakat apabila tidak terdistribusi secara merata.

Pembangunan ekonomi yang hanya berorientasi pertumbuhan bisa jadi hanya akan mendorong berkembangnya industri padat modal dan tidak berbasis sumber daya lokal sehingga kurang berarti dalam mengurangi pengangguran dan kurang memberikan efek berganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian rakyat. Selain itu, berkembangnya industri yang tidak berbasis potensi lokal (*footloose*) menyebabkan tumbuhnya perekonomian yang rapuh. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi selain diarahkan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, juga harus diarahkan guna meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita riil dan kesejahteraan seluruh masyarakat dengan mendayagunakan seluruh potensi daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Melalui misi ini diharapkan pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai melalui pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan yang berkualitas yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai tambah secara agregat tetapi juga semakin memperluas

kesempatan kerja serta tidak berakibat pada kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

**Tujuan:**

1. Mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.
2. Meningkatkan pendapatan per kapita riil masyarakat secara lebih merata dengan mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; meningkatkan peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi dengan didukung investasi swasta yang ramah tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan.

**V.2.5. Misi V : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah, Terutama untuk Mendorong Keserasian Pertumbuhan Antarwilayah dan Pemerataan Pelayanan Sosial**

Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi berbagai prasarana dan sarana yang meliputi prasarana pendidikan dan kesehatan, transportasi, irigasi dan pengairan, perumahan dan permukiman, prasarana persampahan, prasarana energi, telekomunikasi, serta berbagai prasarana pelayanan sosial, ekonomi, dan pemerintahan, prasarana perkotaan dan prasarana wilayah lainnya.

**Tujuan :**

Tujuan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan misi ke-5 (Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah, Terutama untuk Mendorong Kereserasian Pertumbuhan Antarwilayah dan Pemerataan Pelayanan Sosial) adalah menyediakan infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi secara merata di seluruh wilayah sehingga mampu mendorong pembangunan sosial dan ekonomi, meliputi jalan dan jembatan, prasarana perhubungan, irigasi, permukiman, kelistrikan, dan telematika sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

**V.2.6. Misi VI : Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Hayati**

Eksplorasi sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup akibat aktifitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan telah menimbulkan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti pencemaran air dan udara, timbulnya berbagai penyakit, merosotnya hasil tangkapan ikan sungai, hilangnya populasi berbagai spesies flora dan fauna khas/langka, munculnya lahan rusak termasuk deforestasi, terjadinya banjir dan tanah longsor, sulitnya mendapatkan air pada musim kemarau, berpindahnya aliran sungai, dan sebagainya.

Sementara itu pesatnya peningkatan jumlah penduduk bersamaan dengan terus menurunnya luasan lahan pertanian menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya konversi sawah dan lahan pertanian produktif lainnya serta rendahnya peningkatan produksi pertanian. Di sisi lain, bertambahnya kebutuhan lahan pertanian dan penggunaan lainnya akan mengancam keberadaan hutan dan keseimbangan tata air. Memburuknya kondisi hutan akibat deforestasi yang meningkat pesat dan memburuknya penutupan

lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai menyebabkan menurunnya ketersediaan air untuk pertanian dan kebutuhan lainnya.

Pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai salah satu sumberdaya yang potensial juga belum berkembang sebagaimana mestinya. Pengembangan nilai tambah keanekaragaman hayati dapat menjadi alternatif sumber daya pembangunan yang dapat dinikmati baik oleh generasi sekarang maupun mendatang.

Keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang juga menghadapi tantangan akibat perubahan iklim dan pemanasan global. Untuk mengantisipasi berbagai hal tersebut di atas dibutuhkan kebijakan besar yang bersifat kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**Tujuan:**

Pembangunan lingkungan hidup bertujuan menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; memulihkan kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat; memelihara kekayaan keragaman sumberdaya hayati dan kekhasan sumber daya alam, melalui perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

**V.3. Sasaran Kinerja Pembangunan Daerah**

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Purbalingga selama periode tahun 2010-2015 diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan di berbagai bidang yang secara kumulatif diarahkan untuk mewujudkan visi pembangunan kabupaten Purbalingga. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut, terlebih dahulu harus dapat dicapai sasaran-sasaran jangka pendek pada masing-masing bidang pembangunan berdasarkan indikator-indikator kinerja tertentu.

### **V.3.1. Sasaran Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.**

1. Terwujudnya aparaturnya pemerintah daerah yang profesional, bersih, dan berwibawa agar dapat menjadi penggerak pembangunan daerah dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Indikator :

- a. Menurunnya jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS.
  - b. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik.
  - c. Menurunnya jumlah temuan hasil pemeriksaan auditor.
2. Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang mampu berfungsi secara efektif dan efisien serta senantiasa mampu menjawab tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan eksternal.

Indikator :

- a. Meningkatnya jumlah SKPD yang menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
  - b. Meningkatnya jumlah SKPD yang memenuhi kualifikasi Standar Nasional dan Internasional dalam pelayanan publik.
  - c. Terwujudnya website *e-procurement*.
3. Terwujudnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, memiliki strategi yang jelas, mampu memberikan arahan dan supervisi dalam penyelenggaraan administrasi publik dan pembangunan; responsif terhadap berbagai permasalahan, tuntutan, dan kebutuhan masyarakat; mampu bersikap dan bertindak profesional; serta mampu menggerakkan partisipasi rakyat, berkeadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Indikator :

- a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran tepat waktu.
- b. Meningkatnya efisiensi penggunaan input dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
- c. Meningkatnya kegiatan tepat waktu, tepat mutu tepat sasaran dan tepat manfaat.

- d. Terwujudnya hasil audit dengan opini wajar tanpa pengecualian.

**V.3.2. Sasaran Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, Tertib, dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).**

1. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat di segala bidang.

Indikator :

- a. Menurunnya angka kriminalitas.
- b. Menurunnya angka pelanggaran perda.
- c. Menurunnya tindak kekerasan dan konflik dalam kehidupan masyarakat.

2. Meningkatnya kesadaran sosial masyarakat, serta meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak asasi manusia (HAM).

Indikator :

- a. Meningkatnya jumlah kelompok swadaya masyarakat.
- b. Menurunnya kasus tindak kekerasan dalam masyarakat.
- c. Menurunnya kasus *trafficking*.

3. Tersusunnya produk hukum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dinamika sosial-ekonomi guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, serta meningkatkan akselerasi pembangunan.

Indikator :

- a. Berkurangnya jumlah Peraturan Daerah yang kedaluarsa/tidak sesuai dengan peraturan/perundangan yang lebih tinggi.
- b. Tidak adanya produk hukum yang dibatalkan pemerintah pusat.

4. Terwujudnya kehidupan politik yang sehat, demokratis, dan dinamis, meningkatnya partisipasi politik rakyat, serta meningkatnya peran dan fungsi lembaga politik sehingga semakin mendorong efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Indikator :

- a. Meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Kepala Daerah.
- b. Meningkatnya jumlah Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan prakarsa DPRD.
- c. Penetapan APBD tepat waktu.

**V.3.3. Sasaran Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Semakin Berkualitas, Berakhlak Mulia, Beretika, serta Memiliki Jatidiri Dan Semangat Nasionalisme**

1. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesejahteraan keluarga.

Indikator :

- a. Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera.
- b. Menurunnya laju pertumbuhan penduduk.
- c. Meningkatnya jumlah keluarga sesuai norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Indikator :

- a. Meningkatnya usia harapan hidup.
- b. Menurunnya angka kematian bayi.
- c. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan.
- d. Menurunnya presentase gizi kurang.
- e. Menurunnya presentase gizi buruk.
- f. Meningkatnya pemberian asi eksklusif.
- g. Meningkatnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

3. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat.

Indikator :

- a. Meningkatnya Angka melek huruf.
- b. Meningkatnya rata-rata lama sekolah.
- c. Meningkatnya angka partisipasi sekolah.

4. Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak.

- a. Meningkatnya indeks pembangunan gender.



- b. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender.
  - c. Menurunnya presentase tenaga kerja di bawah umur.
  - d. Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan.
  - e. Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak.
5. Meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi keluarga.
- a. Meningkatnya presentase penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tertangani.
  - b. Menurunnya jumlah rumah tangga miskin.
6. Terwujudnya masyarakat yang berkarakter tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi, yang dicerminkan dengan meningkatnya kualitas intelektual; berkembangnya norma dan etika yang sesuai dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa dan nilai-nilai agama; berkembangnya budaya baca tulis; meningkatnya toleransi dan kesetiakawanan sosial; serta berkembangnya semangat gotong royong sehingga dapat terwujud harmoni dan dinamika dalam kehidupan sosial.

Indikator :

- a. Menurunnya angka kenakalan remaja.
  - b. Menurunnya kasus penggunaan Narkoba dan Miras.
  - c. Meningkatnya jumlah karangtaruna yang aktif.
  - d. Meningkatnya angka kunjungan ke perpustakaan.
  - e. Menurunnya konflik horisontal dalam kehidupan masyarakat.
7. Semakin kokohnya jatidiri dan kepribadian masyarakat Purbalingga.

Indikator :

- a. Meningkatnya jumlah kelompok/paguyuban seni budaya tradisional.
  - b. Meningkatnya kegiatan pentas kesenian tradisional.
8. Meningkatnya semangat dan wawasan kebangsaan.

Indikator :

- a. Terlaksananya peringatan hari-hari besar nasional.
- b. Meningkatnya kegiatan forum lintas etnis dan agama.

**V.3.4. Sasaran Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga yang Semakin Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pendayagunaan Seluruh Potensi Daerah.**

1. Terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan yang mampu dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai, serta tersedianya instrumen jaminan pangan sampai ke tingkat rumah tangga.

Indikator :

- a. Stabilitasnya angka inflasi.
  - b. Meningkatnya indeks konsumsi non pangan.
  - c. Meningkatnya daya beli masyarakat.
  - d. Meningkatnya uji laboratorium pada makanan yang beredar.
  - e. Meningkatnya angka pola pangan harapan.
2. Semakin meningkat dan meratanya pendapatan per kapita riil masyarakat serta menurunnya angka pengangguran dan kemiskinan.

Indikator :

- a. Meningkatnya pendapatan per kapita.
  - b. Menurunnya kesenjangan pendapatan antar individu (indek Gini).
  - c. Menurunnya kesenjangan ekonomi antar wilayah (indek Williamson).
  - d. Menurunnya angka pengangguran.
  - e. Menurunnya angka kemiskinan.
3. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif Kabupaten Purbalingga dengan sektor pertanian dan sektor pariwisata sebagai basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien guna menghasilkan produk berkualitas dengan nilai tambah dan daya saing tinggi; terus meningkatnya peran sektor industri dan jasa dengan menghasilkan produk yang lebih berkualitas serta memiliki nilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Indikator :

- a. Meningkatnya kesejahteraan petani yang ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani.
  - b. Meningkatnya investasi di sektor agribisnis.
  - c. Menurunnya penggunaan pupuk dan obat kimia di sektor pertanian.
  - d. Meningkatnya angka kunjungan wisata.
  - e. Meningkatnya nilai tambah sektor-sektor pendukung sektor wisata (PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran; PDRB sektor pengangkutan dan telekomunikasi; PDRB sektor pertanian; serta PDRB sektor industri).
  - f. Meningkatnya proporsi sektor industri dan jasa dalam PDRB.
  - g. Meningkatnya jumlah UMKM.
4. Meningkatnya investasi swasta, baik dalam negeri maupun asing, yang mampu menyerap tenaga kerja, mendorong aktivitas ekonomi lokal, dan ramah lingkungan, guna menyediakan lapangan kerja dengan tingkat upah memadai dan menanggulangi kemiskinan.

Indikator :

- a. Meningkatnya jumlah PMA dan PMDN.
- b. Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN.
- c. Meningkatnya Upah Minimum Kabupaten.
- d. Menurunnya angka pengangguran.

**V.3.5. Sasaran Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah, Terutama untuk Mendorong Keserasian Pertumbuhan Antarwilayah dan Pemerataan Pelayanan Sosial.**

1. Tersedianya infrastruktur yang memadai dan saling terintegrasi

Indikator :

- a. Persentase panjang jalan kabupaten yang beraspal.
- b. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.
- c. Menurunnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak ringan.
- d. Menurunnya persentase jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat.
- e. Panjang jembatan.

- f. Meningkatnya luas lahan beririgasi teknis.
  - g. Jumlah prasarana pelayanan kesehatan.
  - h. Jumlah prasarana pelayanan pendidikan.
  - i. Jumlah pasar tradisional.
  - j. Jumlah pasar modern.
2. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman  
Indikator :
    - a. Menurunnya luasan kawasan kumuh.
    - b. Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni.
    - c. Meningkatnya cakupan jamban.
    - d. Meningkatnya cakupan air bersih.
    - e. Meningkatnya cakupan saluran pembuangan limbah.
    - f. Meningkatnya cakupan layanan persampahan.
  3. Terpenuhinya pasokan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berbagai aktivitas sosial ekonomi.  
Indikator :
    - a. Meningkatnya rasio elektrifikasi.
    - b. Jumlah rumah tangga pengguna kayu bakar.
  4. Terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern untuk mewujudkan masyarakat informasi.  
Indikator :
    - a. Jumlah desa tidak terjangkau layanan telekomunikasi.
    - b. Jumlah warung internet.
    - c. Jumlah *hot spot area*.
    - d. Jumlah jenis pelayanan publik secara *online*.
    - e. Persentase instansi pemerintah menggunakan teknologi informatika.

**V.3.6. Sasaran Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Hayati.**

1. Terjaganya fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, serta pulihnya kondisi dan fungsi lingkungan hidup yang mengalami degradasi akibat eksploitasi sumber daya alam dan dampak aktivitas sosial ekonomi masyarakat  
Indikator :
  - a. Menurunnya luas lahan kritis.
  - b. Menurunnya tingkat pencemaran udara, air dan tanah.
2. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam.

Indikator :

- a. Terjaganya keragaman hayati (*biodiversity index*).
  - b. Jumlah kasus pelanggaran perusakan lingkungan hidup.
3. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Indikator :

- a. Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki dokumen perencanaan lingkungan (AMDAL, UKL, UPL).
- b. Jumlah dan persentase perusahaan yang memiliki IPAL.
- c. Meningkatnya kelompok peduli lingkungan.
- d. Menurunnya penggalian tambang tanpa izin.
- e. Menurunnya kasus pencurian kayu di hutan.

## **BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2010-2015 pada prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan daerah melalui pentahapan pembangunan dan serangkaian kebijakan dan program dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan jangka menengah dan sasaran-sasaran jangka pendek yang telah ditetapkan. Agar upaya mewujudkan visi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara efektif maka penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga tahun 2010-2015 akan dilaksanakan melalui tahapan tahunan mulai tahun pertama ( tahun 2011 ) sampai dengan tahun ke lima ( tahun 2015 ). Pentahapan pembangunan tersebut dimaksudkan agar program-program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan terfokus pada sasaran dan tujuan tertentu sesuai skala prioritas.

### **VI.1. PENTAHAPAN PEMBANGUNAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2010-2015**

Dalam rangka mencapai Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 - 2015 telah ditetapkan 6 (enam) misi sebagai garis-garis besar kebijakan pembangunan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Mengingat keterbatasan potensi sumberdaya pembangunan yang dimiliki, maka untuk dapat mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Purbalingga dibutuhkan strategi berupa penetapan prioritas-prioritas pembangunan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan tahapan sebagai berikut :

## **Misi Ke-1 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)**

### **Tahun I (2011)**

Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penataan kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan kualitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan titik berat pada peningkatan administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah, peningkatan kualitas pengawasan serta peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.

### **Tahun II (2012)**

Peningkatan upaya pengendalian dan evaluasi pembangunan antara lain melalui pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik serta optimalisasi administrasi keuangan dan pengelolaan aset daerah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam audit keuangan, serta optimalisasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dokumen perencanaan tata ruang.

### **Tahun III (2013)**

Pemantapan kualitas pelayanan publik melalui penyusunan dan implementasi *Standard Operating Procedure* (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penerapan Standar Nasional dan Standar Internasional pada pelayanan publik, dan pemantapan kualitas manajemen data dan informasi daerah antara lain melalui Sistem Informasi Manajemen terintegrasi.

### **Tahun IV (2014)**

Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, kualitas sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan, peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan, penataan kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta mengakomodasi tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan.

### **Tahun V (2015)**

Pemantapan reformasi birokrasi melalui penguatan kualitas administrasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekat melalui pengembangan sistem pembinaan administrasi dan peningkatan kompetensi aparatur, penguatan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, peningkatan kualitas dan efektivitas kerjasama antar pemerintah daerah, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur sesuai bidang tugas, dan peningkatan disiplin aparatur dengan penerapan *reward and punishment*.

### **Misi ke-2 (Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, Tertib, dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM))**

#### **Tahun I (2011)**

Pemantapan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat serta peningkatan kesadaran kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat.

#### **Tahun II (2012)**

Peningkatan keamanan dan ketertiban umum.

#### **Tahun III (2013)**

Pengembangan dan peningkatan kualitas kehidupan demokrasi.

#### **Tahun IV (2014)**

Optimalisasi peran dan fungsi lembaga politik dan peningkatan partisipasi politik rakyat melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga politik dan peningkatan kesadaran politik rakyat dalam rangka peningkatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum.

#### **Tahun V (2015)**



Peningkatan kesadaran kebangsaan dan sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum serta budaya hukum melalui peningkatan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal.

**Misi ke-3 (Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Semakin Berkualitas, Berakhlak Mulia, Beretika, serta Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme)**

**Bidang Pendidikan**

**Tahun I (2011)**

Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dasar dalam rangka menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pendidikan dasar dan peningkatan kapasitas prasarana dan sarana pendidikan menengah terutama pendidikan kejuruan guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah serta menyiapkan lulusan yang trampil.

**Tahun II (2012)**

Peningkatan kualitas pendidikan dasar sesuai standar pelayanan minimal dan peningkatan kapasitas pendidikan menengah melalui peningkatan kualitas prasarana, sarana dan tenaga kependidikan pendidikan dasar serta peningkatan kapasitas prasarana dan sarana pendidikan menengah bersamaan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan antara lain melalui pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kependidikan serta inisiasi implementasi metodologi pendidikan yang tidak hanya berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*) tetapi juga berorientasi pada pembinaan watak dan budi pekerti.

**Tahun III (2013)**

Pelaksanaan standar pelayanan minimal pada seluruh pelayanan pendidikan dasar serta peningkatan pelayanan pendidikan menengah dengan menyediakan sekolah menengah kejuruan pada seluruh wilayah

kecamatan dan implementasi metodologi pendidikan yang berorientasi pada pembinaan watak dan budi pekerti.

#### **Tahun IV (2014)**

Peningkatan kualitas pendidikan dasar sesuai standar nasional dan peningkatan kualitas pendidikan menengah sesuai standar pelayanan minimal serta pemantapan implementasi metodologi pendidikan yang berorientasi pada pembinaan watak dan budi pekerti.

#### **Tahun V (2015)**

Pemantapan kualitas pendidikan dasar serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan menengah yang berkualitas sesuai SPM serta pemantapan implementasi metodologi pendidikan yang berorientasi pada pembinaan watak dan budi pekerti.

### **Bidang Kesehatan**

#### **Tahun I (2011)**

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan KB melalui peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesehatan dan KB serta pemerataan tenaga kesehatan dan KB terutama diarahkan dalam rangka peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan dan KB di seluruh wilayah serta peningkatan akses pelayanan kesehatan dan KB khususnya bagi masyarakat miskin.

#### **Tahun II (2012)**

Melanjutkan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan KB dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana dan sarana pelayanan kesehatan dan KB serta pemerataan tenaga kesehatan dan KB sesuai dengan standar pelayanan minimal bersamaan dengan upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan KB bagi masyarakat miskin.

**Tahun III (2013)**

Melanjutkan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan KB dalam rangka mempersiapkan terwujudnya pelayanan kesehatan dan KB sesuai Standar Pelayanan Minimal pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan dan KB serta terwujudnya akses pelayanan kesehatan dan KB bagi seluruh masyarakat.

**Tahun IV (2014)**

Pemantapan pelaksanaan SPM pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta KB.

**Tahun V (2015)**

Peningkatan SPM dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

**Bidang Kesejahteraan Sosial****Tahun I (2011)**

Peningkatan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar terutama bagi masyarakat miskin, penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan perlindungan anak, serta peningkatan keberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender.

**Tahun II (2012)**

Melanjutkan upaya peningkatan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar lainnya terutama bagi masyarakat miskin, peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan perlindungan anak, serta peningkatan keberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender.

### **Tahun III (2013)**

Melanjutkan upaya peningkatan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar lainnya terutama bagi masyarakat miskin, peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan perlindungan anak, serta peningkatan keberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender melalui revisi dan inovasi program-program pemberdayaan masyarakat.

### **Tahun IV (2014)**

Melanjutkan upaya peningkatan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar lainnya terutama bagi masyarakat miskin, peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan perlindungan anak, serta peningkatan keberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender melalui revisi dan inovasi program-program pemberdayaan masyarakat.

### **Tahun V (2015)**

Memantapkan perlindungan kelompok masyarakat yang rentan dalam rangka mewujudkan target MDG's melalui akselerasi pemenuhan kebutuhan dasar dan hak-hak dasar lainnya terutama bagi masyarakat miskin, peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan perlindungan anak, serta peningkatan keberdayaan masyarakat dan kesetaraan gender melalui implementasi inovasi program-program pemberdayaan masyarakat.

### **Misi ke-4 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga yang Semakin Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pendayagunaan Seluruh Potensi Daerah)**

### **Tahun I (2011)**

Peningkatan pendayagunaan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas dan perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi,

pengembangan pariwisata dan pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan.

**Tahun II (2012)**

Optimalisasi pendayagunaan potensi ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas produksi usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan produksi pertanian dalam arti luas dan perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, pengembangan prasarana pariwisata dan pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan.

**Tahun III (2013)**

Peningkatan keunggulan komparatif dan kompetitif ekonomi lokal melalui peningkatan kapasitas dan kualitas produksi usaha mikro kecil dan menengah, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi pertanian dalam arti luas dan perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana pariwisata, pengembangan industri padat karya dan ramah lingkungan yang mendayagunakan potensi lokal serta pengembangan sektor jasa dalam rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

**Tahun IV (2014)**

Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kualitas dan daya saing produk sektor primer dan sekunder serta pengembangan sektor jasa dan industri kreatif.

**Tahun V (2015)**

Pemantapan ekonomi daerah melalui pemantapan daya saing produk lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas sektor jasa serta peningkatan kapasitas dan kualitas industri kreatif.

**Misi ke-5 (Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah, Terutama untuk Mendorong Keserasian Pertumbuhan Antarwilayah dan Pemerataan Pelayanan Sosial)**

**Tahun I (2011)**

Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi yang ditekankan pada pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dan jembatan dalam rangka meningkatkan aksesibilitas antar wilayah serta pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana irigasi dan sumberdaya air guna menunjang peningkatan produksi pertanian dan pengendalian dampak kerusakan akibat bencana alam.

**Tahun II (2012)**

Melanjutkan upaya peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi terutama pemeliharaan dan rehabilitasi jalan dalam rangka meningkatkan kelancaran transportasi barang dan jasa antar wilayah, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana irigasi dan sumberdaya air guna menunjang peningkatan produksi pertanian dan pengendalian dampak kerusakan akibat bencana alam, serta peningkatan cakupan penyediaan air bersih dan sanitasi permukiman.

**Tahun III (2013)**

Pemeliharaan prasarana transportasi dan pembukaan akses baru antar wilayah dalam rangka meningkatkan kelancaran transportasi barang dan jasa antar wilayah, pemeliharaan, rehabilitasi, dan perluasan jaringan irigasi dalam rangka semakin meningkatkan produksi pertanian, peningkatan cakupan penyediaan air bersih, sanitasi permukiman dan pengelolaan persampahan.

**Tahun IV (2014)**

Perluasan akses transportasi antar wilayah dalam rangka mewujudkan keserasian pertumbuhan antar wilayah dan pemerataan pembangunan, perluasan jaringan irigasi dalam rangka terus meningkatkan produksi

pertanian, peningkatan cakupan penyediaan air bersih, sanitasi permukiman dan pengelolaan persampahan, serta perluasan jaringan distribusi energi.

#### **Tahun V (2015)**

Melanjutkan perluasan akses transportasi antar wilayah dalam rangka memantapkan keserasian pertumbuhan antar wilayah dan pemerataan pembangunan, pemeliharaan dan rehabilitasi prasarana irigasi dan sumber daya air, pemantapan penyediaan air bersih, sanitasi permukiman dan pengelolaan persampahan, serta perluas jaringan distribusi energi.

#### **Misi ke-6 (Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Hayati)**

#### **Tahun I (2011)**

Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau.

#### **Tahun II (2012)**

Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau.

#### **Tahun III (2013)**

Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau.

#### **Tahun IV (2014)**

Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau.

#### **Tahun V (2015)**

Pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemeliharaan dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau.

### **VI.2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM JANGKA MENENGAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2010-2015**

Visi Pembangunan Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan 6 (enam) misi, keberhasilannya ditentukan oleh tingkat pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat akan ditempuh melalui beberapa kebijakan dan program pembangunan sebagai berikut :

#### **VI.2.1. Kebijakan untuk Mencapai Tujuan Misi Ke-1 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)**

1. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan, kualitas sistem pengendalian, dan evaluasi pembangunan dengan :
  - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
  - c. Program Penyediaan dan Penyempurnaan Data dan Informasi Daerah.
2. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan lahan dan ruang; mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup; mengurangi dampak negatif pemanfaatan ruang



terhadap bidang sosial dan ekonomi; mendorong aktivitas sosial dan ekonomi; serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Program Penataan Ruang Daerah.

3. Penyesuaian kelembagaan pemerintah daerah dan pemerintahan desa sesuai tuntutan kebutuhan dan dinamika lingkungan serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku melalui :
  - a. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah.
  - b. Program Pembinaan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Desa.
4. Penguatan kualitas administrasi pemerintah daerah dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta penguatan fungsi pengawasan melekat melalui pengembangan sistem pembinaan administrasi dan peningkatan kompetensi aparatur dengan :
  - a. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Pemerintah Daerah dan Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa.
  - b. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah.
  - c. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah.
  - d. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  - e. Program Penyusunan Produk Hukum serta Pembinaan dan Pelayanan Hukum.
  - f. Program Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
  - g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.
  - h. Program Fasilitasi Pers dan Pembinaan Kehumasan.
  - i. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan.
  - j. Program Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Administrasi Kearsipan.
  - k. Program penataan Adminstrasi Kependudukan.

5. Penguatan kapasitas pengawasan fungsional melalui peningkatan jumlah auditor yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan melalui Program Pengawasan Pemerintahan dan Pembangunan.
6. Peningkatan kualitas dan efektivitas kerjasama antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak dan kerjasama antardaerah dalam rangka meningkatkan akses sumber daya bagi akselerasi pembangunan serta peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam pendayagunaan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sumber daya pembangunan dan potensi daerah melalui Program Pengembangan Kerjasama Daerah.
7. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia aparatur sesuai bidang tugas dan peningkatan disiplin aparatur dengan penerapan *reward and punishment* melalui :
  - a. Program Pembinaan dan Peningkatan Kualitas SDM Aparatur.
  - b. Program Peningkatan Kualitas Administrasi Kepegawaian.

**VI.2.2. Kebijakan untuk Mencapai Tujuan Misi ke-2 (Mewujudkan Purbalingga yang Aman, Damai, Tertib, dan Demokratis Berlandaskan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM))**

1. Optimalisasi peran dan fungsi lembaga politik dan peningkatan partisipasi politik rakyat melalui peningkatan kapasitas lembaga-lembaga politik dan peningkatan kesadaran politik rakyat dalam rangka peningkatan budaya politik yang sehat, demokratis, dan dinamis berdasarkan hukum melalui :
  - a. Program Pembinaan Kehidupan Sosial Politik.
  - b. Program Peningkatan Kapasitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Peningkatan kesadaran kebangsaan dan sosial, kesetiakawanan sosial, kesadaran hukum, serta budaya hukum melalui peningkatan penanaman nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal melalui :
  - a. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan.
  - b. Program Penyusunan Produk Hukum serta Pembinaan dan Pelayanan Hukum.

- c. Program Internalisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Pendidikan Budi Pekerti.
3. Peningkatan keamanan dan ketertiban umum melalui :
- a. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat.
  - b. Program Pembinaan dan Penegakan Perda.

**VI.2.3. Kebijakan untuk Mencapai Tujuan Misi ke-3 (Mewujudkan Masyarakat Purbalingga yang Semakin Berkualitas, Berakhlak Mulia, Beretika, serta Memiliki Jatidiri dan Semangat Nasionalisme)**

1. Peningkatan internalisasi nilai-nilai moral termasuk nilai-nilai luhur budaya; peningkatan dan pengembangan seni budaya, budaya membaca dan menulis, budaya produktif; serta kesadaran terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal secara sistematis dan terintegrasi dengan kurikulum pendidikan formal dengan :
  - a. Program Pendidikan Seni Budaya Daerah.
  - b. Program Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
2. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan keluarga dengan menitikberatkan pada peningkatan kuantitas dan kualitas kepesertaan Keluarga Berencana (KB) serta peningkatan upaya pemberdayaan keluarga melalui :
  - a. Program Peningkatan Pelayanan, Perlindungan dan Pembinaan Kepesertaan KB.
  - b. Program Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Institusi KB.
  - c. Program Pemberdayaan Keluarga.
3. Peningkatan fasilitasi kegiatan kepemudaan dan keolahragaan untuk meningkatkan pembinaan mental, kesehatan jasmani, dan peningkatan prestasi olahraga melalui :
  - a. Program Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Pemuda.
  - b. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga.

4. Peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas dan kualitas upaya kesehatan keluarga serta kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam bidang kesehatan melalui :
  - a. Program Peningkatan Kualitas Kesehatan Lingkungan.
  - b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Kesehatan.
  - c. Program Penyediaan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan.
  - d. Program Kesehatan Matra.
  - e. Program Pemantapan Fungsi Manajemen Kesehatan.
  - f. Program Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Obat, Makanan, dan Minuman.
  - g. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
  - h. Program Pelayanan KIA, Remaja, dan Usila.
  - i. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
  - j. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata.
  - k. Program Penyediaan, Pemerataan, dan Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan.
  - l. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
5. Peningkatan keberdayaan masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan prakarsa, swadaya, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui inovasi upaya pemberdayaan masyarakat di bidang sosial dan ekonomi, serta peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan desa dan masyarakat dengan :
  - a. Program Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Masyarakat.
  - b. Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat.
6. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam segala bidang kehidupan serta perlindungan anak melalui kebijakan pembangunan yang peka gender dan hak-hak anak dengan Program

Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7. Peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan dengan menitikberatkan pada upaya untuk menjamin akses seluruh masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan menengah sesuai standar pelayanan minimal (SPM) melalui :
  - a. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Program Pendidikan Dasar.
  - c. Program Pendidikan Menengah.
  - d. Program Pendidikan Non-Formal.
  - e. Program Pendidikan Luar Biasa.
  - f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
  - h. Program Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.
8. Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (*teaching to the test*), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budi pekerti, kecintaan terhadap budaya nasional dan semangat nasionalisme yang didukung dengan memasukkan muatan lokal berupa pendidikan seni dan budaya daerah serta pendidikan budi pekerti melalui :
  - a. Program Internalisasi Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa dan Pendidikan Budi Pekerti.
  - b. Program Pendidikan Seni Budaya Daerah.
9. Peningkatan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan menitikberatkan pada pengembangan sistem identifikasi, pendataan, dan *updating* data PMKS, serta sistem penanganan PMKS melalui :
  - a. Program Pembinaan Kesejahteraan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Keluarga Miskin.
  - b. Program Penanggulangan Bencana.

10. Peningkatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan hidup pokok masyarakat dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan :
- a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
  - b. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian.
  - c. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan.
  - d. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perikanan.
  - e. Program Pembinaan, Peningkatan Keterampilan dan Penempatan Tenaga Kerja.
  - f. Program Penyiapan dan Fasilitasi Transmigrasi.
  - g. Program Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM.
  - h. Program Fasilitasi Permodalan bagi UMKM.
  - i. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
  - j. Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah.
  - k. Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi.
  - l. Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni.
  - m. Program Pendidikan Anak Usia Dini.
  - n. Program Pendidikan Dasar.
  - o. Program Pendidikan Menengah.
  - p. Program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  - m. Program Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Obat, Makanan, dan Minuman.
  - q. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
  - r. Program Penyediaan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Pelayanan Kesehatan.

11. Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, prasarana pendidikan keagamaan, lembaga keagamaan, serta pengembangan kerukunan hidup beragama melalui Program Pembinaan Kehidupan Beragama.

**VI.2.4. Kebijakan untuk Mencapai Tujuan Misi ke-4 (Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Purbalingga yang Semakin Berkualitas dan Berkeadilan melalui Pendayagunaan Seluruh Potensi Daerah)**

1. Konservasi, rehabilitasi dan peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka mempertahankan fungsi ekologis hutan dan meningkatkan manfaat ekonomi hutan bagi masyarakat melalui :
  - a. Program Peningkatan Produksi dan Kualitas Produk Kehutanan.
  - b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
2. Peningkatan upaya ketercukupan dan penganekaragaman konsumsi pangan yang aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat melalui Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
3. Pengembangan agribisnis dengan fokus pada revitalisasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan inovasi, serta penyerapan teknologi agar mampu meningkatkan kuantitas, kualitas, dan daya saing produk pertanian melalui :
  - a. Program Pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan.
  - b. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani.
  - c. Program Pengembangan Jejaring Kerja dan Kerjasama Pertanian.
  - d. Program Kaji Terap Teknologi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
  - e. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, Mutu Produk Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
  - f. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Pertanian.
  - g. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

- h. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Peternakan.
  - i. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Peternakan.
  - j. Program Kesehatan Masyarakat Veterinair.
  - k. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perikanan.
  - l. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Pemasaran Produk Perikanan.
  - m. Program Pelestarian Plasma Nutfah.
4. Peningkatan keterampilan dan peningkatan akses tenaga kerja terhadap lapangan kerja, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan hubungan industrial melalui :
    - a. Program Pembinaan, Peningkatan Keterampilan dan Penempatan Tenaga Kerja.
    - b. Program Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Hubungan Industrial.
    - c. Program Penyiapan dan Fasilitasi Transmigran.
  5. Peningkatan daya saing komparatif dan kompetitif UMKM serta akses pasar melalui peningkatan produktivitas dan kualitas produk dengan :
    - a. Program Penumbuhan dan Pengembangan UMKM.
    - b. Program Peningkatan Produktivitas, Kualitas Produk dan Daya Saing UMKM.
  6. Pengembangan dan peningkatan kapasitas lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank terutama lembaga keuangan masyarakat (LKM) guna semakin meningkatkan akses modal bagi usaha ekonomi rakyat melalui Program Fasilitasi Permodalan bagi UMKM.
  7. Peningkatan peran dan fungsi koperasi dan lembaga keuangan masyarakat sebagai penggerak ekonomi rakyat dengan menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas manajemen melalui Program Penumbuhan, Pengembangan, dan Peningkatan Kualitas Manajemen Koperasi.



8. Penciptaan lingkungan bisnis (*business environment*) yang semakin kondusif untuk meningkatkan kegiatan usaha dan investasi dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas sistem pelayanan perizinan, peningkatan penyediaan dan kualitas infrastruktur penunjang, kemudahan akses terhadap lahan usaha, serta kepastian usaha melalui Program Promosi dan Pemasaran Potensi Daerah serta Fasilitasi Investasi.
9. Menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya, serta meningkatkan perlindungan konsumen melalui Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
10. Peningkatan peran usaha perdagangan sebagai katalisator perekonomian daerah antara lain melalui revitalisasi pasar tradisional dan fasilitasi pedagang kecil, serta pengaturan pasar modern dengan Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan.
11. Peningkatan peran industri sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan industri kecil menengah dan industri padat karya yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal, memiliki nilai tambah tinggi, dan ramah lingkungan, untuk semakin memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dengan :
  - a. Program Pengembangan Sentra Industri Potensial.
  - b. Program Peningkatan Kapasitas Iptek dalam Sistem Produksi Industri Kecil dan Menengah.
12. Peningkatan kapasitas, kualitas, dan promosi obyek-obyek wisata untuk meningkatkan daya tarik dan meningkatkan angka kunjungan wisatawan sehingga akan semakin meningkatkan perannya sebagai *primemover* perekonomian daerah melalui :
  - a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.
  - b. Program Pengembangan Promosi Pariwisata.

**VI.2.5. Kebijakan untuk Mencapai Tujuan Misi ke-5 (Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Prasarana Wilayah, Terutama untuk Mendorong Keserasian Pertumbuhan Antarwilayah dan Pemerataan Pelayanan Sosial)**

1. Peningkatan pemenuhan kebutuhan energi melalui peningkatan penyediaan jaringan listrik serta pengembangan energi alternatif dengan :
  - a. Program Pendayagunaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Alternatif.
  - b. Program Optimalisasi dan Pengendalian Pendayagunaan Potensi Geologi, Pertambangan dan Air Tanah.
2. Peningkatan dan perluasan pemanfaatan teknologi telekomunikasi dan informatika (TI) dalam berbagai sektor dengan menitikberatkan pengembangan infrastruktur TI hingga ke wilayah perdesaan melalui Program Pengembangan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana transportasi guna mewujudkan keserasian pertumbuhan antar wilayah dan pemerataan pembangunan sosial ekonomi di seluruh wilayah melalui Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
4. Peningkatan manajemen pengelolaan sumberdaya air melalui penyediaan serta peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana irigasi dan pengairan melalui pembangunan dan pemeliharaan bangunan irigasi dan bangunan air lainnya serta peningkatan peran dan fungsi kelembagaan pengelolaan air dengan Program Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Irigasi dan Pengairan.
5. Penyehatan lingkungan permukiman melalui penataan lingkungan permukiman dan peningkatan kualitas sanitasi dengan :
  - a. Program Penataan Lingkungan Permukiman dan Peningkatan Kualitas Sanitasi.
  - b. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan.

6. Peningkatan tata kelola transportasi lokal dengan menitikberatkan pada revitalisasi prasarana dan sarana transportasi, pengembangan kemampuan transportasi serta pengembangan jaringan transportasi regional melalui :
  - a. Program Peningkatan Manajemen dan Fasilitas Lalu Lintas.
  - b. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.
7. Peningkatan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni bagi masyarakat dengan melanjutkan kebijakan penyediaan rumah layak huni bagi keluarga miskin dan fasilitasi penyediaan rumah sederhana melalui Program Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni.

**VI.2.6. Kebijakan untuk Mencapai Tujuan Misi ke-6 (Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, serta Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Hayati)**

1. Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian sumberdaya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui :
  - a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.
  - b. Program Pelestarian Plasma Nutfah.
2. Peningkatan pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup, pengembangan dan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan berbasis masyarakat, serta penegakan hukum lingkungan dengan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

## **BAB VII. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Pembangunan daerah merupakan bagian dari upaya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan daerah harus selaras dan sinergis serta menunjang perencanaan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi. Oleh karena itu penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah. Di samping itu penyusunan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009. Guna mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 juga merujuk pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga.

Mengingat RPJMD merupakan dokumen induk dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Purbalingga, maka dengan sendirinya harus menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya baik yang bersifat jangka menengah maupun tahunan. RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu lima tahun ke depan. Di samping itu, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 juga akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan di tingkat SKPD. Selanjutnya Renstra SKPD akan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di tingkat SKPD.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 dalam bentuk Renstra-SKPD dan Renja-SKPD.
2. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Guna mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015, setiap SKPD berkewajiban mencapai target kinerja yang telah ditentukan melalui implementasi Renstra dan Renja SKPD.
4. Untuk mengetahui kinerja pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terhadap capaian kinerja sasaran sesuai indikator yang telah ditetapkan.
5. Capaian kinerja RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga periode 2010-2015.
6. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Purbalingga tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 50 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 menjadi pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sampai dengan tahun 2015. Namun untuk menghindari kekosongan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan pada masa peralihan periode kepemimpinan di Kabupaten Purbalingga, maka RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan Bupati-Wakil Bupati Purbalingga periode 2015-2020 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2016 sebelum tersusunnya RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 – 2020.

## **BAB VIII. P E N U T U P**

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, implementasi RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 2010-2015. Terwujudnya Visi pembangunan Kabupaten Purbalingga akan sangat ditentukan oleh sejauh mana efektifitas pelaksanaan Misi yang dilihat dari terwujudnya tujuan-tujuan pada setiap bidang pembangunan. Sedangkan untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan, terlebih dahulu harus dapat dicapai sasaran-sasaran pembangunan. Dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 ini, sasaran-sasaran pembangunan telah dijabarkan dalam bentuk indikator-indikator kinerja yang bersifat kuantitatif sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan sesuai indikator-indikator yang telah ditetapkan tersebut, di samping melalui pelaksanaan seluruh program pembangunan yang ada dalam RPJMD oleh seluruh SKPD, yang lebih penting adalah sejauh mana efektivitas pelaksanaan program yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan bukan hanya diukur dari tingkat pencapaian *output* dibandingkan dengan *input* yang digunakan, tetapi lebih dari itu diukur juga dari sejauh mana pencapaian *outcome* dan *benefit* serta dampak dari kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Di tengah terbatasnya kemampuan keuangan daerah dan semakin meningkatnya beban kebutuhan belanja pemerintah daerah serta semakin kompleksnya kebutuhan dan permasalahan pembangunan yang dihadapi, maka semakin dirasakan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2010-2015 tidak serta merta menentukan keberhasilan pembangunan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu lima tahun yang akan datang. Keberhasilan pembangunan Kabupaten

Purbalingga di samping ditentukan oleh konsistensi dalam mengimplementasikan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, juga ditentukan oleh sejauh mana semangat, dedikasi, dan integritas seluruh aparatur Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta dukungan dari pemangku kepentingan lainnya.

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Purbalingga  
Nomor 06 Tanggal 30 September 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PURBALINGGA  
Cap ttd  
SUBENO**

**Ditetapkan di Purbalingga  
Pada tanggal 29 September 2011  
BUPATI PURBALINGGA  
Cap, ttd  
HERU SUDJATMOKO**

Salinan sesuai aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga

TRI GUNAWAN SETYADI, SH. MH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19690222 199603 1 004